



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
a. Mandat Kinerja	2
b. Peta Proses Bisnis	3
c. Struktur Organisasi	9
C. ISU-ISU STRATEGIS	10
D. DUKUNGAN SDM, SARANA-PRASARANA DAN ANGGARAN	11
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN LALU	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
A. TUJUAN,SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGDA.....	23
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	55
D. INSTRUMENT PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA.....	62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	65
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	66
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	67
2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2025....	79
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah...88	
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	95
5. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.....	95
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	103

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	107
B. REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KABUPATEN KENDAL.....	117
C. INOVASI	122
D. PENGHARGAAN	123
BAB IV PENUTUP.....	125
A. KESIMPULAN	125
B. REKOMENDASI	130
LAMPIRAN	
1. RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO 2021-2026	
2. RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO 2025-2029	
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DISKOMINFO 2021-2026	
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DISKOMINFO 2025-2029	
5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DISKOMINFO TAHUN 2026	
6. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025	
7. LKjIP DISKOMINFO TAHUN 2024	
8. AKUNTABILITAS (LHE AKIP 2024 DAN MATRIKS TINDAK LANJUT LHE AKIP 2024)	
9. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
10. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	12
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 1.3	Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	14
Tabel 1.4	Rincian Alokasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025.....	15
Tabel 1.5	Matriks Rencana Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	20
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kendal 2021-2026.....	28
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kendal 2025-2029.....	30
Tabel 2.3	Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2021-2026 Dinas Kominfo Kabupaten Kendal.....	37
Tabel 2.4	Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2025-2029 Dinas Kominfo Kabupaten Kendal.....	46
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025.....	56
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	57
Tabel 2.7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2026.....	58
Tabel 2.8	Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025.....	59
Tabel 3.1	Skala Capaian Kinerja.....	67
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025.....	68
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025.....	71

Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2025.....	80
Tabel 3.5	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025.....	89
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.....	96
Tabel 3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025.....	105
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025.....	108
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025	119
Tabel 3.10	Penghargaan yang Diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	5
Gambar 1.2	Peta Proses Bisnis Level 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	6
Gambar 1.3	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan bimbingan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun bukan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, melainkan sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas strategis. Di dalamnya, kami memaparkan sejauh mana efektivitas program kerja dalam mendukung akselerasi transformasi digital dan keterbukaan informasi di Kabupaten Kendal sepanjang tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang diraih merupakan buah sinergi seluruh tim dan mitra kerja. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan langkah kami di masa mendatang.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL,

ARDHI PRASETIYO, S.STP., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19810925 200012 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kendal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal. Dinas Kominfo Kabupaten Kendal merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Adapun tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang mencakup komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja sesuai RKPD Perubahan Tahun 2025, maka dilaksanakan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, serta dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

B. MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Mandat Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

b. Peta Proses Bisnis

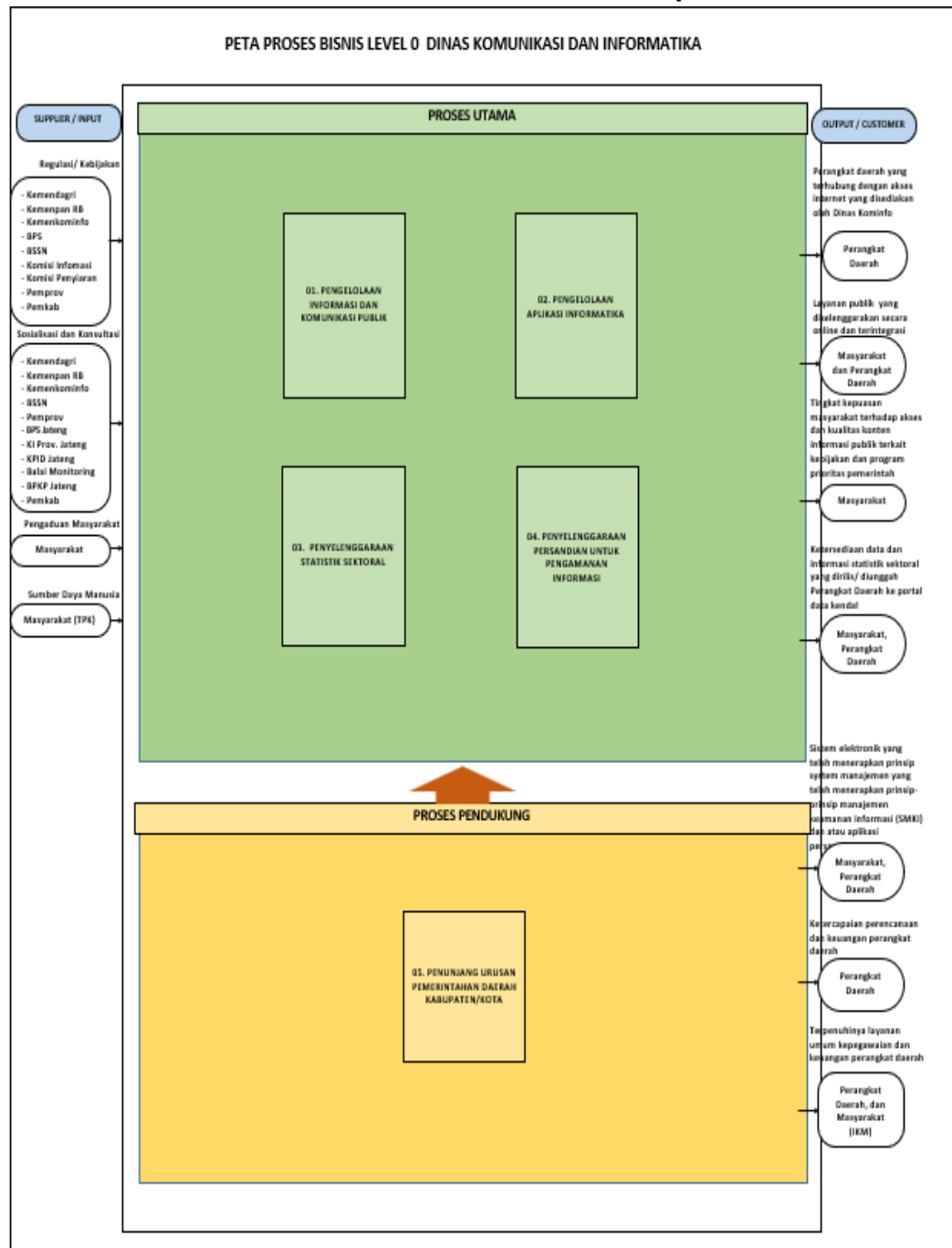
Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi perangkat daerah agar menghasilkan Output yang bernilai tambah bagi semua pihak. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, telah disusun Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal meliputi :

- 1. Proses Utama, yang meliputi :
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Pengelolaan Aplikasi Informatika;
 - c. Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - d. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

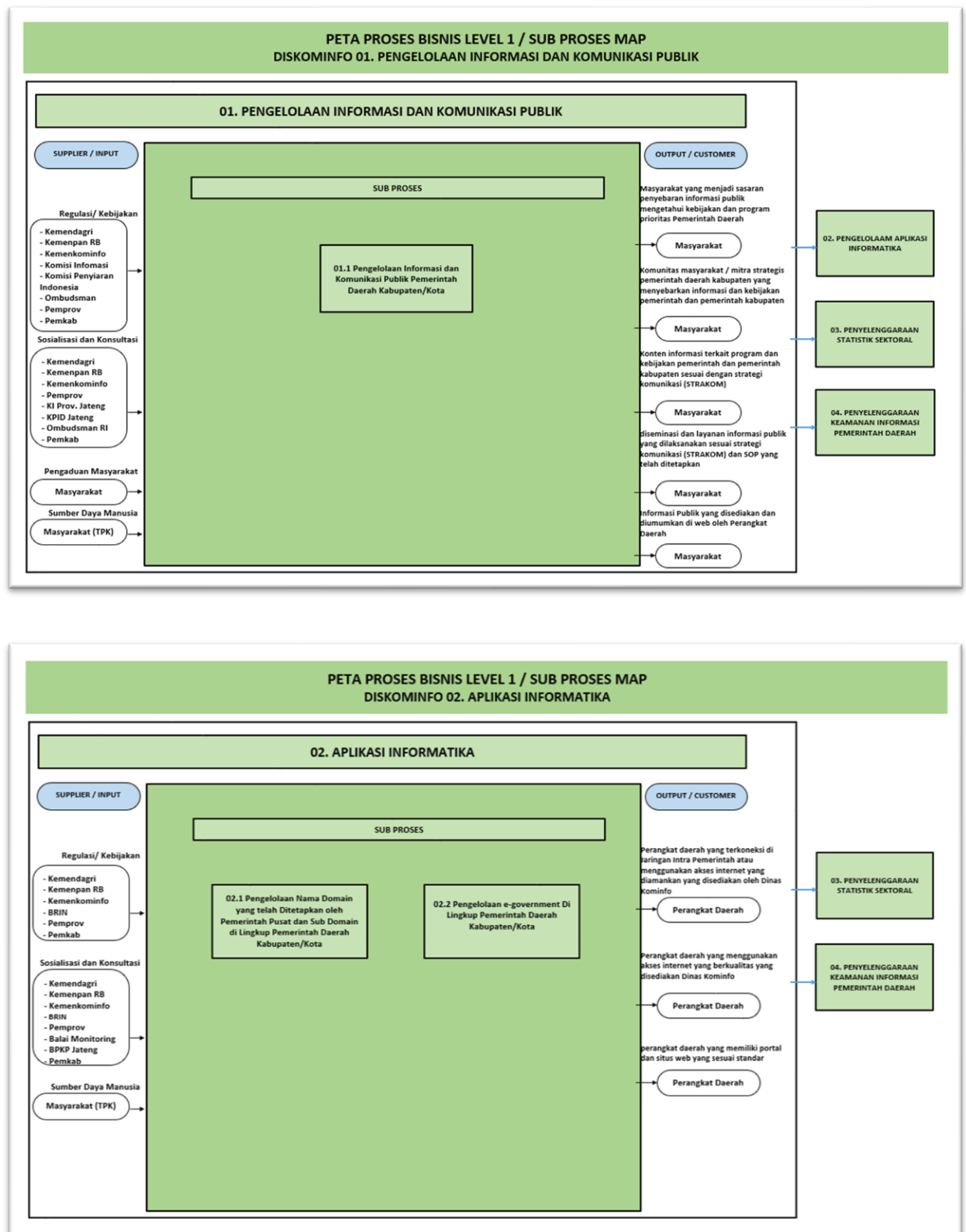
2. Proses Pendukung, yang meliputi : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

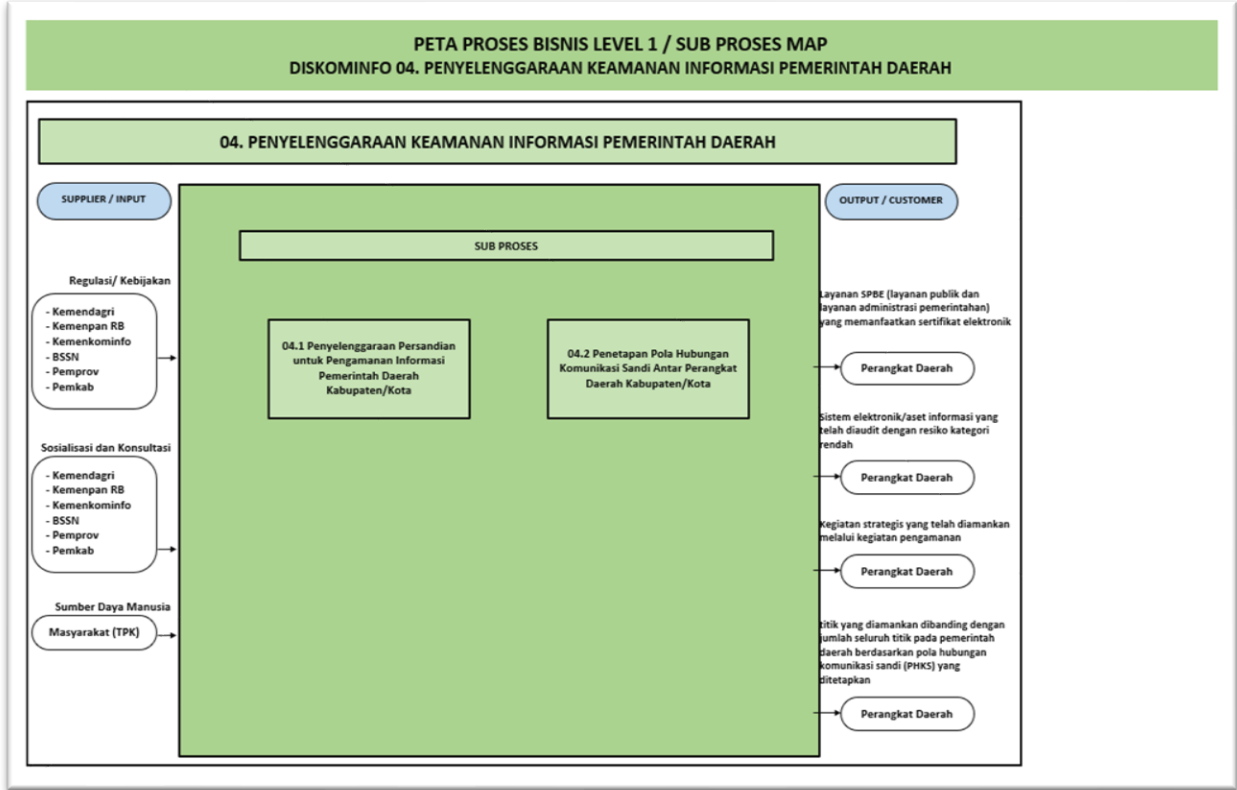
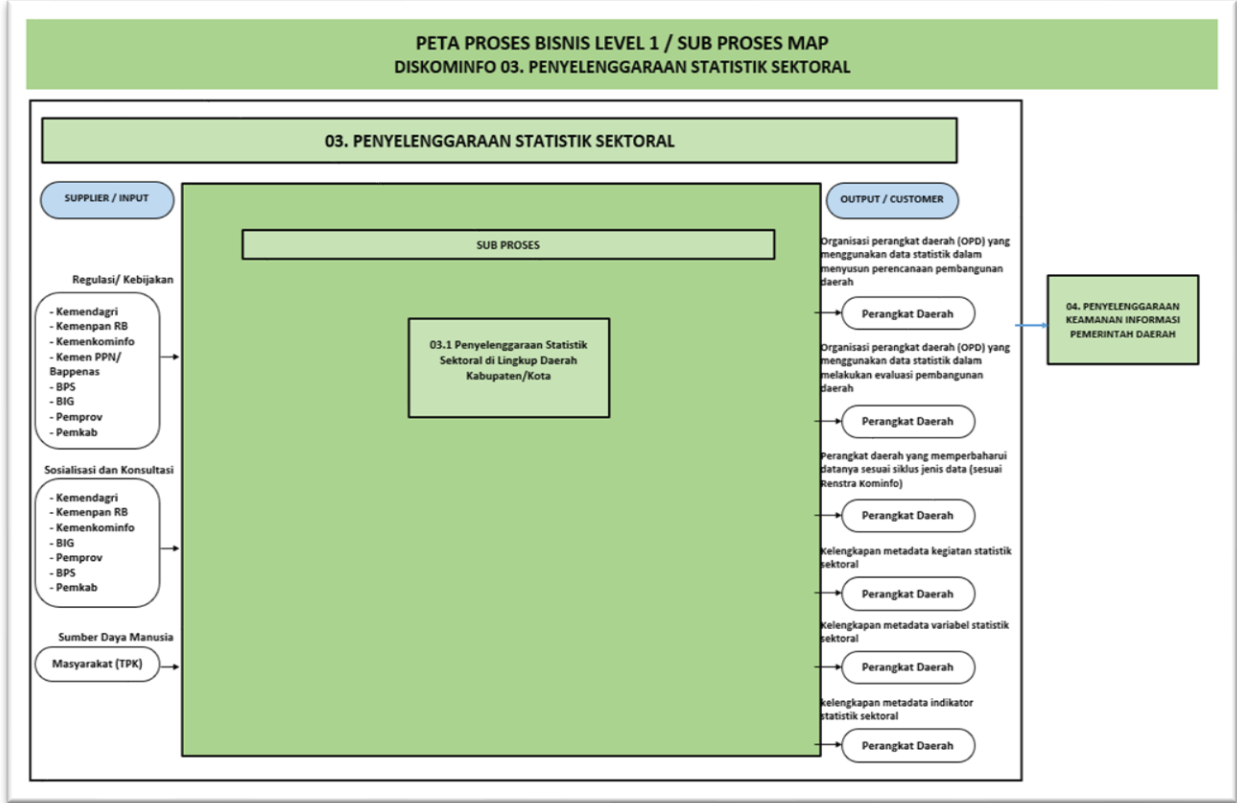
Adapun gambaran Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

**Gambar 1.1 Peta Proses Bisnis Level 0
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal**

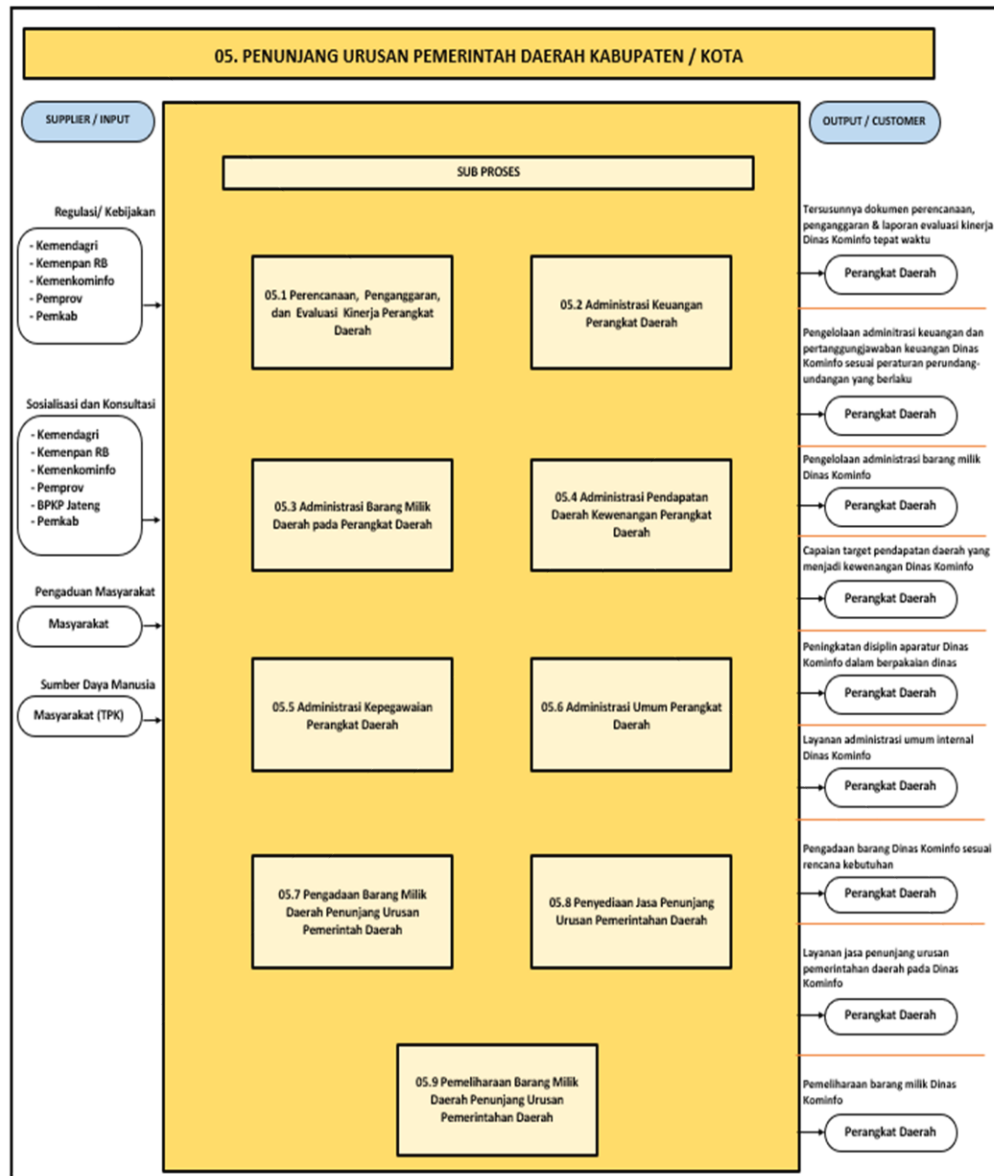


**Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Level 1
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal**





PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
DISKOMINFO 05. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA



c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik.

4. Bidang Aplikasi Informatika;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang aplikasi informatika

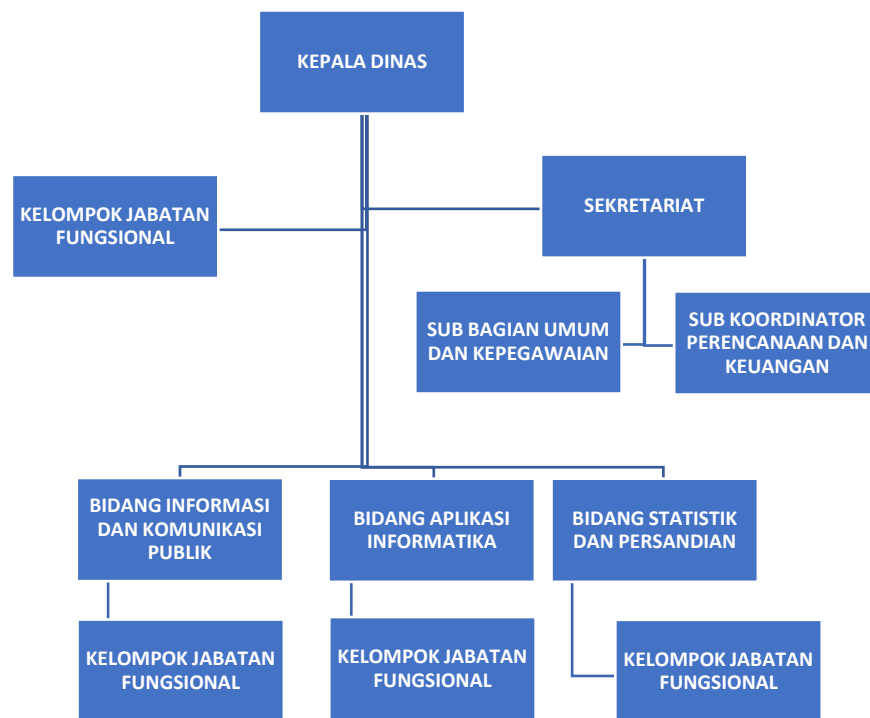
5. Bidang Statistik dan Persandian;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang statistik dan persandian.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.3
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal



C. ISU-ISU STRATEGIS

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan SPBE untuk menunjang smart city dan pelayanan informasi publik yang belum optimal;
2. Tuntutan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dalam rangka mengkonter narasi negatif, hoax,

dan informasi misleading, serta diseminasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;

3. Pengelolaan keamanan informasi yang belum optimal;
4. Pengelolaan satu data dan validitas data statistik sektoral yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
5. Belum optimalnya pelayanan persandian dalam pengamanan informasi terkait Inovasi pemanfaatan teknologi dan penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal didukung oleh sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun aset/modal yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

Adapun jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		CPNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	S2/ Magister	4	2	0	0	0	0	0	0	0
2	S1/ Sarjana	7	2	0	2	14	5	5	1	36
3	Diploma3	5	1	2	1	2	0	0	0	11
4	Diploma 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Diploma 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMA/ Sederajat	2	2	0	0	3	0	2	1	10
7	SMP/ Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SD	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah		18	7	2	3	20	5	7	2	64

Sumber : data simpeg 31 Desember 2025

Berdasarkan data Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 menurut tingkat pendidikan, sebagian besar merupakan lulusan S1/Sarjana, yaitu sebanyak 36 orang. Selanjutnya, pegawai lulusan D3/Diploma 3 berjumlah 11 orang, lulusan SMA/Sederajat berjumlah 10 orang, lulusan S2/ Magister berjumlah 6 orang, dan lulusan SD/Sederajat berjumlah 1 orang. Dengan demikian, total keseluruhan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berjumlah 64 orang.

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	12	8	20
4	Golongan IV	6	0	6
5	PPPK IX	14	5	19
6	PPPK VII	2	0	2
7	PPPK V	3	0	3
9	PPPK I	1	0	1
10	PPPK Paruh Waktu	7	2	9
Jumlah		47	17	64

Sumber : data simpeg 31 Desember 2025

Berdasarkan golongan, sebagian besar pegawai berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 20 orang. Selanjutnya, terdapat 4 orang pegawai pada Golongan II dan 6 orang pada Golongan IV. Selain itu, pegawai berstatus PPPK terdiri atas 19 orang pada kelas jabatan IX, 2 orang pada kelas jabatan VII, 3 orang pada kelas jabatan V, dan 1 orang pada kelas jabatan I. Selain itu ada 9 orang PPPK paruh waktu. Dengan demikian, total keseluruhan pegawai dalam data ini berjumlah 64 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jenjang golongan menengah dan kelas jabatan fungsional, yang mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia yang relatif matang dan berpengalaman dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika.

Sedangkan Sumberdaya Aset/Modal yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sarana Prasarana Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal

No	Kode Barang	Uraian	Volume	Nilai asset (Rp)
1	2	3	4	5
1.	1.3.2.01	Alat Besar	6	366.210.077
2.	1.3.2.02	Alat Angkutan	29	1.382.225.960
3.	1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	6	21.100.000
4.	1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	677	1.870.341.636
5.	1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	495	4.312.889.282
6.	1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	2	10.923.000
7.	1.3.2.08	Alat Laboratorium	7	182.855.000
8.	1.3.2.10	Alat Komputer	1.239	8.805.208.253
9.	1.3.3.01	Bangunan Gedung	3	751.451.631
10.	1.3.3.02	Monumen	10	308.930.440
11.	1.3.3.03	Bangunan Menara	5	2.128.326.924
		Jumlah	2.479	20.140.462.203

data SimAset Diskominfo, 31 Desember 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 13.562.976.120,00** yang teralokasi di masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.4
Rincian Alokasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kendal Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.394.578.146,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.250.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.650.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4.600.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.018.853.001,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.018.853.001,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.590.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	116.590.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.172.113,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.917.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.065.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.460.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.195.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	476.535.113,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.378.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.818.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.560.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328.335.032,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.214.032,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.721.000,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.968.333.000,00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.968.333.000,00
Relasi Media	889.816.000,00
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	42.530.000,00
Pelayanan Informasi Publik	268.578.000,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	661.701.000,00
Penyusunan Konten	105.708.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.529.493.114,00
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.985.300,00
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	40.985.300,00
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.488.507.814,00
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	51.050.600,00
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	398.391.214,00
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	120.480.000,00
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	570.938.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4.668.000,00

Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2.342.980.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	105.348.860,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	105.348.860,00
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	99.809.560,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	5.539.300,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	565.223.000,00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	554.740.000,00
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	554.740.000,00
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10.483.000,00
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.483.000,00
TOTAL ANGGARAN (Rp)	13.562.976.120,00

Sumber : Fungsional 31 Desember 2025

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN LALU

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2024 berdasarkan surat Bupati Kendal Nomor 000.8.6.3/433/Insp Tanggal 4 November 2025 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kab. Kendal Tahun 2024. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Matriks Rencana Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE 2024	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Penyelesaian (in progress/selesai)
1	Dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian anggaran, agar memprioritaskan pencapaian kinerja pada program / kegiatan yang belum tercapai kinerjanya	Melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan memprioritaskan program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum tercapai, disertai percepatan pelaksanaan, penajaman target kinerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan target dapat tercapai.	Penyusunan Anggaran 2026	Kepala Dinas	Telah dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan memprioritaskan program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum tercapai kinerjanya pada APBD 2026 (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1Begklri16O4RQQHKuRzRLP1WapIKWOcA?usp=drive_link
2	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ tepat waktu dengan memunculkan tanggal dan tahun upload pada website resmi	Mengupload dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Diskominfo dan https://esr.menpan.go.id/ tepat waktu	Januari 2026	Sekretaris	Dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja tahun 2025 telah dipublikasikan pada website resmi Diskominfo dan https://esr.menpan.go.id/ (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1TMC9KzH0yZS1rdoqtv-j_Z7xzM46B-h1?usp=drive_link
3	Agar menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja	Melakukan penyusunan revisi SOP tentang pengumpulan data kinerja	Januari 2026	Kepala Dinas	SOP Pengumpulan Data Kinerja telah disusun dan dilakukan revisi pertama (melalui aplikasi arutala) (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/167uMHj5GgGZo1SuvOFCfHX_CPLJNdc2w?usp=drive_link

4	Agar dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan /kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik , terutama terkait indikator kinerja yang belum tercapai	Melaksanakan kegiatan desk capaian kinerja untuk mengumpulkan data capaian kinerja tahun 2025 beserta menggali informasi faktor pendukung, penghambat, upaya yang sudah dilakukan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja.	Januari 2026	Kepala Dinas	Desk capaian kinerja TW IV tahun 2025 telah dilaksanakan (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1wKwrv0DPqssm0x-OXL2y4NFzS7p3dAvJ?usp=drive_link
		Menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan /kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik pada dokumen LKjIP	Januari 2026	Kepala Dinas	Informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan /kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik pada dokumen LKjIP Bab III (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1wKwrv0DPqssm0x-OXL2y4NFzS7p3dAvJ?usp=drive_link
5	Agar secara rutin menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal	Melaksanakan rapat koordinasi rutin setiap bulan untuk struktural dan sub koordinator untuk pengawasan, pemantauan atau pengukuran kinerja (rapat internal dan POK)	Rutin setiap bulan	Kepala Dinas	Rapat hasil evaluasi kinerja internal / monev POK telah dilaksanakan setiap bulan, yang dihadiri oleh Pejabat Struktural, Ketua Tim dan Bendahara (BP dan BPP) (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1g1FdJeRFyp92K1iKQ6oV6MwqeSLBuUwE?usp=drive_link
		Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal	Rutin setiap bulan		Laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal telah disusun dan dikirimkan melalui Bagian Administrasi Pembangunan (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1g1FdJeRFyp92K1iKQ6oV6MwqeSLBuUwE?usp=drive_link

6	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya sesuai Rencana Aksi dan menyampaikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 dengan mekanisme monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran / rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sudah ditindaklanjuti	Tahun 2025 dan 2026	Kepala Dinas	Rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 sudah dilaksanakan (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1V4ral30xFYU4FTGSTRl5hfqRCY1UOFYk?usp=drive_link
---	--	---	---------------------	--------------	---

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Diskominfo Kab. Kendal Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGDA

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2021-2026 yaitu “Kendal Handal, Unggul, Makmur, Berkeadilan”, didukung oleh lima misi yang telah dirumuskan.

- Misi 1 : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);
- Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
- Misi 3 : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. Ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan;
- Misi 4 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sedangkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2025-2029 adalah “Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”, didukung oleh lima misi yang telah dirumuskan.

Misi 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi;

Misi 2 : Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif;

Misi 3 : Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan;

Misi 4 : Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat;

Misi 5 : Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara urusan pemerintahan wajib dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian pada periode 2021-2026 telah menetapkan tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, melekat pada misi keempat yaitu “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; dan misi kelima yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”.

Adapun tujuan daerah yang ingin dicapai adalah “Mewujudkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik”, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, dan sasaran daerah yang ingin diwujudkan adalah Meningkatnya birokrasi yang Kapabel dengan indikator sasaran daerah Indeks SPBE.

Untuk mewujudkan indikator Sasaran Daerah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal memiliki tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tujuan : Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal

: Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)

Sasaran jangka menengah dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal, indikator kinerja :
 - Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo;
 - Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
2. Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan indikator kinerja : Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP).
3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, dengan indikator kinerja : persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang

memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019).

4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan indikator kinerja : Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI).
5. Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, dengan indikator kinerja :
 - Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal; dan
 - Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal).

Sedangkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tahun 2025-2029, selaras dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 melekat dalam misi ke-2 yaitu Terciptanya Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif. Adapun tujuan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029 yang ingin dicapai adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani” dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan” dengan Indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi General.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tujuan : Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital

Indikator : Indeks Pemerintah Digital

Sasaran jangka menengah dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja : Indeks Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatnya layanan publik berbasis IT, dengan indikator kinerja : Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;
3. Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral, dengan indikator kinerja : Indeks Pembangunan Statistik (IPS);
4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah, dengan indikator kinerja : Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI);
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator kinerja : Nilai SAKIP.

Adapun gambaran lebih detail tentang penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah, indikator kinerja dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kendal 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata Kelola pemerintahan yang baik		Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)	2,76	3,13	3,43	3,75	3,91	3,91
		1.1	Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kab. Kendal	45	50	55	65	70	75
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20,90	22,03	23,16	24,29	25,42	26,55
		1.2	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab. Kendal	88,8	89	89,5	90	90,5	91

		1.3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kab. Kendal sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	10	15	25	40	50	70
		1.4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kab. Kendal	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	45	50	55	65	70	75
		1.5	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	20,90	22,03	23,16	24,29	25,42	26,55
				Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal)	88,8	89	89,5	90	90,5	91

Renstra Diskominfo Kabupaten Kendal 2021-2026

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kendal 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital			Indeks Pemerintah Digital	N/A	2	2	2,3	2,3	2,6
		1.1	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	96,32	96,33	96,34	96,35	96,36	96,37
		1.2	Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50,15	50,20	50,25	50,30	50,35	50,40
		1.3	Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25
		1.4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	407	407	415	420	425	430
		1.5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	77.6	77.65	77.70	77.75	77.80	77.85

Renstra Diskominfo Kabupaten Kendal 2025-2029

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan akan dicapai yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Strategi dan Arah Kebijakan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan rumusan arah kebijakan diharapkan dapat merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal merupakan langkah terarah yang dirancang sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusannya dilakukan melalui kajian menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sebagai dasar dalam pengembangan kelembagaan yang optimal.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo 2021-2026, diuraikan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal.

Strategi :

1. Perluasan Akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet Pemerintah Daerah;

2. Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem elektronik berbagi pakai untuk layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan); dan
3. Pengembangan ekosistem SPBE.

Arah Kebijakan :

1. pembangunan jaringan intra Pemerintah Daerah sampai ke tingkat UPTD/UPTB/ Korwil
2. penyediaan fasilitas internet yang berkualitas dan diamankan bagi semua perangkat daerah;
3. pembangunan sistem elektronik komunikasi intra Pemerintah Daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah;
4. fasilitasi layanan pusat data pemerintah bagi perangkat daerah;
5. pemanfaatan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten Kendal untuk kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah secara daring;
6. fasilitasi pengelolaan dan pengawasan portal dan situs website agar sesuai standar;
7. implementasi layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. implementasi Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis) Pemerintah Kabupaten Kendal;
9. pendaftaran sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. integrasi layanan SPBE kedalam SPLPD (Sistem Penghubung Layanan Pemda); dan

11. fasilitasi implementasi inovasi yang mendukung smartcity.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal.

Strategi :

1. Integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik;
2. Peningkatan kualitas layanan informasi publik; dan
3. Pemberdayaan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah.

Arah Kebijakan :

1. penyusunan konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM);
2. penyebarluasan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah;
3. penyelenggaraan diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan; dan
4. penyediaan dan pengumuman Informasi Publik sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- c. Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data indonesia.

Strategi :

1. percepatan pembangunan satu data kendal;
2. pembangunan metadata statistik sektoral.

Kebijakan :

1. pembangunan portal data kendal;
 2. pengunggahan data statistik sektoral oleh perangkat daerah pada portal data kendal;
 3. pembaruan/ pemutakhiran data statistik sektoral secara periodik;
 4. integrasi dan interoperabilitas data statistik sektoral;
 5. kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral;
 6. kelengkapan metadata variabel statistik sektoral; dan
 7. kelengkapan metadata indikator statistik sektoral.
- d. Sasaran 4 : Adanya peningkatan risiko dan celah keamanan informasi dalam penerapan digitalisasi pemerintahan (penyelenggaraan SPBE) sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era siber.

Strategi :

1. pengamanan kegiatan strategis Pemerintah daerah;
2. Percepatan penerapan prinsip-prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) pada sistem elektronik (SE).

Arah Kebijakan :

1. pengamanan kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan

sinyal/ akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan;

2. penerapan sertifikat elektronik pada sistem elektronik (SE) milik Pemerintah Daerah (termasuk layanan SPBE yang meliputi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan);
 3. audit sistem elektronik (SE) Pemerintah Daerah;
 4. pengamanan informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS); dan
 5. peningkatan kualitas layanan keamanan informasi.
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

Strategi :

1. penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja;
2. Peningkatan layanan administrasi;
3. penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
4. penyediaan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dinas kominfo.

Arah Kebijakan :

1. peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja dinas;
2. peningkatan layanan administrasi keuangan;
3. peningkatan layanan administrasi pendapatan daerah;
4. peningkatan layanan administrasi barang;
5. peningkatan layanan administrasi kepegawaian;
6. peningkatan layanan administrasi umum;

7. pengadaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana kantor;
8. pemeliharaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana kantor; dan
9. pemenuhan kebutuhan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dinas kominfo.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2021-2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal	1. pengembangan ekosistem SPBE; 2. perluasan Akses dan peningkatan infratraktur digital dan penyediaan layanan internet Pemerintah Daerah; dan 3. percepatan digitalisasi dan integrasi sistem elektronik berbagi pakai untuk layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	1. pembangunan jaringan intra Pemerintah Daerah sampai ke tingkat UPTD/UPTB/ Korwil; 2. penyediaan fasilitas internet yang berkualitas dan diamankan bagi semua perangkat daerah; 3. pembangunan sistem elektronik komunikasi intra Pemerintah Daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah; 4. fasilitasi layanan pusat data pemerintah bagi perangkat daerah; 5. pemanfaatan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten Kendal untuk kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah secara daring; 6. fasilitasi pengelolaan dan pengawasan portal dan situs website agar sesuai standar; 7. implementasi layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. implementasi Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis) Pemerintah Kabupaten Kendal; 9.pendaftaran sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 10.integrasi layanan SPBE kedalam SPLPD (Sistem Penghubung

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			Layanan Pemda); dan 11.fasilitasi implementasi inovasi yang mendukung smartcity.
2.	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal	1. integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik; 2. peningkatan kualitas layanan informasi publik; dan 3. pemberdayaan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah.	1. penyusunan konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM); 2. penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah; 3. penyelenggaraan diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan; dan 4. penyediaan dan pengumuman Informasi Publik sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data indonesia	1. percepatan pembangunan satu data kendal; dan 2. pembangunan metadata statistik sektoral.	1. pembangunan portal data kendal; 2. pengunggahan data statistik sektoral oleh perangkat daerah pada portal data kendal; 3. pembaruan/ pemutakhiran data statistik sektoral secara periodik; 4. integrasi dan interoperabilitas data statistik sektoral; 5. kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral; 6. kelengkapan metadata variabel statistik sektoral; dan 7. kelengkapan metadata variabel statistik sektoral.
4.	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung	1. pengamanan kegiatan strategis Pemerintah daerah; dan	1. pengamanan kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
	penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal	2. percepatan penerapan prinsip-prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) pada sistem elektronik (SE)	kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/ akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan; 2. penerapan sertifikat elektronik pada sistem elektronik (SE) milik Pemerintah Daerah (termasuk layanan SPBE yang meliputi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan); 3. audit sistem elektronik (SE) Pemerintah Daerah; 4. pengamanan informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS); dan 5. peningkatan kualitas layanan keamanan informasi.
5.	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	1. penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja; 2. peningkatan layanan administrasi; 3. penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan 4. penyediaan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dinas kominfo.	1. peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja dinas; 2. peningkatan layanan administrasi keuangan; 3. peningkatan layanan administrasi kepegawaian; 4. peningkatan layanan administrasi umum; 5. pengadaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana kantor; 6. pemeliharaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana kantor; dan 7. pemenuhan kebutuhan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dinas kominfo.

Renstra Dinas Kominfo 2021-2026

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo 2025-2029, diuraikan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas jaringan internet antar perangkat daerah;
2. Mengembangkan data center daerah;
3. Peningkatan Literasi Digital dan Partisipasi Publik;
4. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Informasi.

Arah kebijakan :

1. penyusunan konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM);
2. penyebarluasan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah;
3. penyelenggaraan diseminasi dan layanan informasi public yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan;
4. penyediaan Informasi Publik sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya layanan publik berbasis IT

Strategi :

1. Penguatan infrastruktur teknologi informasi;

2. Merancang aplikasi/website dengan tampilan sederhana, mudah digunakan, dan mobile friendly;
3. Penyusunan regulasi dan SOP untuk tata kelola layanan digital.

Arah kebijakan :

1. Peningkatan kapasitas dan jangkauan jaringan internet untuk seluruh perangkat daerah, termasuk wilayah pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan desa, guna memastikan konektivitas yang andal dan stabil;
2. Pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional layanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan memastikan kesesuaian kebutuhan teknologi dan keberlanjutan pemanfaatannya;
3. Modernisasi infrastruktur teknologi informasi melalui pemanfaatan teknologi cloud computing, virtualisasi server, dan sistem backup otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan data;
4. Mendorong percepatan implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah melalui penyusunan peta rencana SPBE daerah yang terintegrasi dan terukur;
5. Integrasi berbagai aplikasi layanan publik dalam satu platform yang mudah diakses oleh masyarakat untuk meminimalkan duplikasi layanan dan meningkatkan efisiensi pelayanan;
6. Integrasi layanan emergency call center untuk memudahkan akses masyarakat yang membutuhkan pertolongan/bantuan kegawatdaruratan;

7. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan digital berbasis kebutuhan masyarakat, seperti layanan administrasi daring, aduan masyarakat, perizinan online, dan informasi publik;
8. Penguatan tata kelola SPBE/Pemerintahan digitan melalui penyusunan regulasi, pembentukan tim koordinasi SPBE/ Pemerintahan Digital daerah, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk semua layanan berbasis elektronik;
9. Monitoring dan evaluasi penerapan SPBE/ Pemerintahan Digital secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan berkelanjutan;
10. Peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang penggunaan dan pengelolaan layanan elektronik untuk memastikan kesiapan SDM mendukung implementasi SPBE/ Pemerintahan Digital.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas statistik sektoral

Strategi :

1. Meningkatkan peran Wali Data, Produsen Data, dan Pembina Data sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
2. Pengembangan portal data daerah sebagai pusat data sektoral yang terintegrasi;
3. Pemanfaatan teknologi digital (dashboard, e-survey, integrasi data spasial) untuk meningkatkan akurasi;
4. Menyelaraskan data daerah dengan statistik nasional untuk menjaga konsistensi;
5. Mendorong keterbukaan data (open data) sesuai prinsip transparansi.

Arah kebijakan :

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan data daerah untuk mengatur standar, mekanisme, dan prosedur pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data sektoral secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah.
2. Pengembangan sistem basis data daerah yang terpusat dan terintegrasi, berbasis statistik sektoral, untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan ketersediaan data yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.
3. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam hal penyediaan, pembaruan, dan validasi data sektoral agar data yang dikumpulkan relevan, mutakhir, dan dapat digunakan untuk analisis lintas sektor.
4. Pemanfaatan teknologi *big data* dan *dashboard* analitik untuk mendukung visualisasi data, monitoring capaian program, serta evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur.
5. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data statistik melalui pelatihan pengumpulan data, pengolahan data, analisis statistik, dan penggunaan aplikasi pengelolaan data.
6. Penerapan prinsip keterbukaan dan keamanan data dengan memperhatikan perlindungan data pribadi serta akses publik terhadap data yang boleh dibuka untuk meningkatkan akuntabilitas;
7. Pengembangan dan pengelolaan data center daerah yang aman, terintegrasi, dan berbasis standar nasional, untuk mendukung penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data antar instansi secara efektif.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah

Strategi :

1. Membentuk dan mengoptimalkan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Daerah..
2. Menjalin kerja sama dengan BSSN, Kominfo, dan akademisi dalam penguatan kapasitas keamanan informasi.
3. Menyusun mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas insiden atau kelemahan keamanan informasi.
4. Meningkatkan kesadaran dan budaya keamanan informasi.

Arah kebijakan :

1. Penerapan standar keamanan jaringan di seluruh perangkat daerah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik secara digital.
2. Penyusunan dan penerapan kebijakan keamanan informasi daerah yang mengatur perlindungan data, pengelolaan akses informasi, dan penanganan insiden keamanan siber.
3. Penerapan standar keamanan siber berdasarkan regulasi nasional (seperti SNI ISO/IEC 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi) untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
4. Pelaksanaan audit keamanan sistem informasi secara berkala untuk menilai kerentanan sistem, memperbaiki celah keamanan, dan meningkatkan ketahanan sistem dari serangan siber.
5. Pengembangan sistem backup data secara rutin dan terintegrasi dengan prosedur pemulihan data (*disaster recovery*) untuk menjamin

kelangsungan layanan publik jika terjadi gangguan sistem.

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi melalui pelatihan, simulasi penanganan insiden, dan penyusunan rencana mitigasi risiko siber.
7. Penguatan kesadaran keamanan informasi di seluruh perangkat daerah dengan kampanye internal tentang pentingnya menjaga data pribadi, penggunaan *password* yang kuat, dan kewaspadaan terhadap serangan siber.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis hasil (SAKIP);
2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen pelayanan;
4. Mendorong akuntabilitas, transparansi, dan inovasi layanan publik berbasis digital.

Arah kebijakan :

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja dinas.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2025-2029
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya layanan publik berbasis IT	• Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi • Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Sosialisasi dan Literasi Digital kepada Masyarakat	• Peningkatan kapasitas dan jangkauan jaringan internet untuk seluruh perangkat daerah, termasuk wilayah pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan desa, guna memastikan konektivitas yang andal dan stabil • Pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional layanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan memastikan kesesuaian kebutuhan teknologi dan keberlanjutan pemanfaatannya. • Modernisasi infrastruktur teknologi informasi melalui pemanfaatan teknologi <i>cloud computing</i>, <i>virtualisasi server</i>, dan sistem <i>backup</i> otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan data • Mendorong percepatan implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah melalui penyusunan peta rencana SPBE daerah yang terintegrasi dan terukur. • Integrasi berbagai aplikasi layanan publik dalam satu platform yang mudah diakses oleh masyarakat untuk meminimalkan duplikasi layanan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. • Integrasi layanan <i>emergency call center</i> untuk memudahkan

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			akses masyarakat yang membutuhkan pertolongan/bantuan kegawatdaruratan • Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan digital berbasis kebutuhan masyarakat, seperti layanan administrasi daring, aduan masyarakat, perizinan <i>online</i>, dan informasi publik. • Penguatan tata kelola SPBE/Pemerintahan digitan melalui penyusunan regulasi, pembentukan tim koordinasi SPBE/ Pemerintahan Digital daerah, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk semua layanan berbasis elektronik. • Monitoring dan evaluasi penerapan SPBE/ Pemerintahan Digital secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. • Peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang penggunaan dan pengelolaan layanan elektronik untuk memastikan kesiapan SDM mendukung implementasi SPBE/ Pemerintahan Digital.
2.	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat;	• Integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik;	• Penyusunan konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM); • penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah dan

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		• Peningkatan kualitas layanan informasi publik; dan • Pemberdayaan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah.	pemerintah daerah dengan melibatkan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah; • penyelenggaraan diseminasi dan layanan informasi public yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan; • penyediaan Informasi Publik sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral daerah	• Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terintegrasi	• Penyusunan kebijakan pengelolaan data daerah untuk mengatur standar, mekanisme, dan prosedur pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data sektoral secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah. • Pengembangan sistem basis data daerah yang terpusat dan terintegrasi, berbasis statistik sektoral, untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan ketersediaan data yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. • Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam hal penyediaan, pembaruan, dan validasi data sektoral agar data yang dikumpulkan relevan, mutakhir, dan dapat digunakan untuk analisis lintas sektor. • Pemanfaatan teknologi big data dan dashboard analitik untuk mendukung visualisasi data, monitoring capaian program, serta evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur. • Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			statistik melalui pelatihan pengumpulan data, pengolahan data, analisis statistik, dan penggunaan aplikasi pengelolaan data. • Penerapan prinsip keterbukaan dan keamanan data dengan memperhatikan perlindungan data pribadi serta akses publik terhadap data yang boleh dibuka untuk meningkatkan akuntabilitas. • Pengembangan dan pengelolaan data center daerah yang aman, terintegrasi, dan berbasis standar nasional, untuk mendukung penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data antar instansi secara efektif.
4.	Meningkatnya kemananan data dan informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Keamanan Data dan Informasi	• Penerapan standar keamanan jaringan di seluruh perangkat daerah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik secara digital. • Penyusunan dan penerapan kebijakan keamanan informasi daerah yang mengatur perlindungan data, pengelolaan akses informasi, dan penanganan insiden keamanan siber. • Penerapan standar keamanan siber berdasarkan regulasi nasional (seperti SNI ISO/IEC 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi) untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. • Pelaksanaan audit keamanan sistem informasi secara berkala untuk menilai kerentanan sistem, memperbaiki celah keamanan,

No	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			dan meningkatkan ketahanan sistem dari serangan siber. • Pengembangan sistem backup data secara rutin dan terintegrasi dengan prosedur pemulihan data (disaster recovery) untuk menjamin kelangsungan layanan publik jika terjadi gangguan sistem. • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi melalui pelatihan, simulasi penanganan insiden, dan penyusunan rencana mitigasi risiko siber. • Penguatan kesadaran keamanan informasi di seluruh perangkat daerah dengan kampanye internal tentang pentingnya menjaga data pribadi, penggunaan password yang kuat, dan kewaspadaan terhadap serangan siber.
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja dinas

Renstra Dinas Kominfo 2025-2029

Rencana Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Relasi Media
 - b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - d. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Konten
 - h. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

c. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

d. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral

e. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Bupati) kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Dinas) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Selain berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2021–2026, Tahun 2025 merupakan masa peralihan dari pelaksanaan Renstra 2021–2026 menuju Renstra 2025–2029. Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam perencanaan kinerja agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta menjamin keberlanjutan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Gambaran detail tentang Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
A	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal	Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)	skor	3,91
1	Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal	% Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	70
		% layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	50,15
2	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	skor	90,50
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	% perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	persen	91,23

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	skor	359
5	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal	Nilai Hasil Evaluasi LKJIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	skor	77

Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tahun 2025 (Renstra 2025-2029) dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A
1	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	96,32
2	Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,15
3	Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2
4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Indeks	407
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	77.6

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3		4	5	6
1.	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital			Indeks Pemerintah Digital	Indeks	2
		1.1	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	96.33
		1.2	Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50.20
		1.3	Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,05
		1.4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Indeks	407
		1.5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,65

RKT Dinas Kominfo Tahun 2026

Program dan Kegiatan, Indikator kinerja dan target tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 Periode 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kendal Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Laporan Keuangan</i>	<i>%</i>	<i>100</i>
	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sesuai ketentuan</i>	<i>%</i>	<i>100</i>
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan</i>	<i>%</i>	<i>100</i>
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	100
	<i>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>
		<i>Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten</i>	<i>%</i>	<i>58</i>
		<i>Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan</i>	<i>%</i>	<i>70</i>

		<i>Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</i>	%	33
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	70
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100
	<i>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai PM Kominfo 5/2015</i>	%	100
	<i>Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	%	100
		<i>Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	%	83,49
		<i>Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	%	70
		<i>Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</i>	%	100
		<i>Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terdaftar di Kemenkominfo)</i>	%	100
		<i>Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</i>	%	100
		<i>Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah</i>	%	100
		<i>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city</i>	%	100

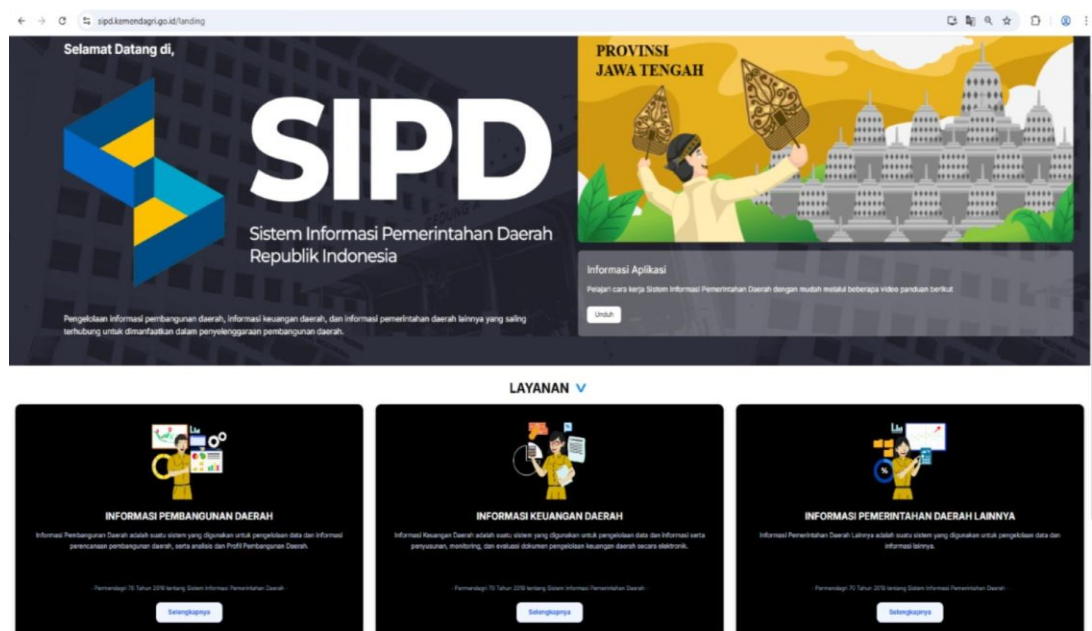
		<i>Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo</i>	95	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase data yang dapat berbagi pakai</i>	%	95
		<i>Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)</i>	%	100
		<i>Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral</i>	%	94,2
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	%	77,73
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i>	%	91
		<i>Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</i>	%	12
	<i>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan</i>	%	100

D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dalam upaya pencapaian kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Komukasi dan Informatika Kabupaten Kendal memanfaatkan beberapa instrumen pendukung berbasis sistem informasi. Adapun sistem informasi yang digunakan Dinas Kominfo Kabupaten sebagai instrumen pendukung untuk pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut :

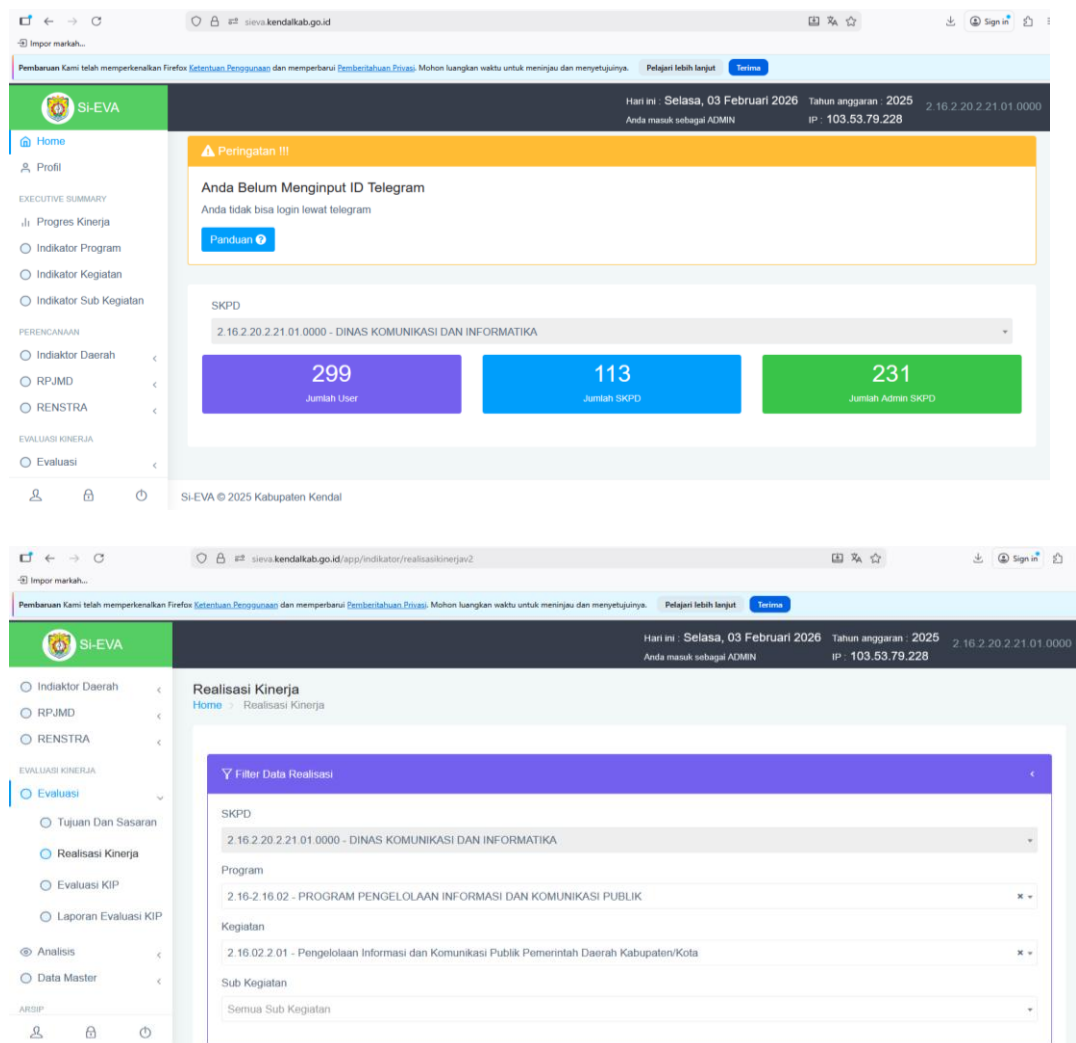
a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri

Adalah aplikasi terintegrasi dari Kementerian Dalam Negeri atas *e-planning*, *e-budgetting* dan e-penatausahaan keuangan yang membantu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan Dinas Kominikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Adapun screenshoot aplikasi SIPD adalah sebagai berikut :



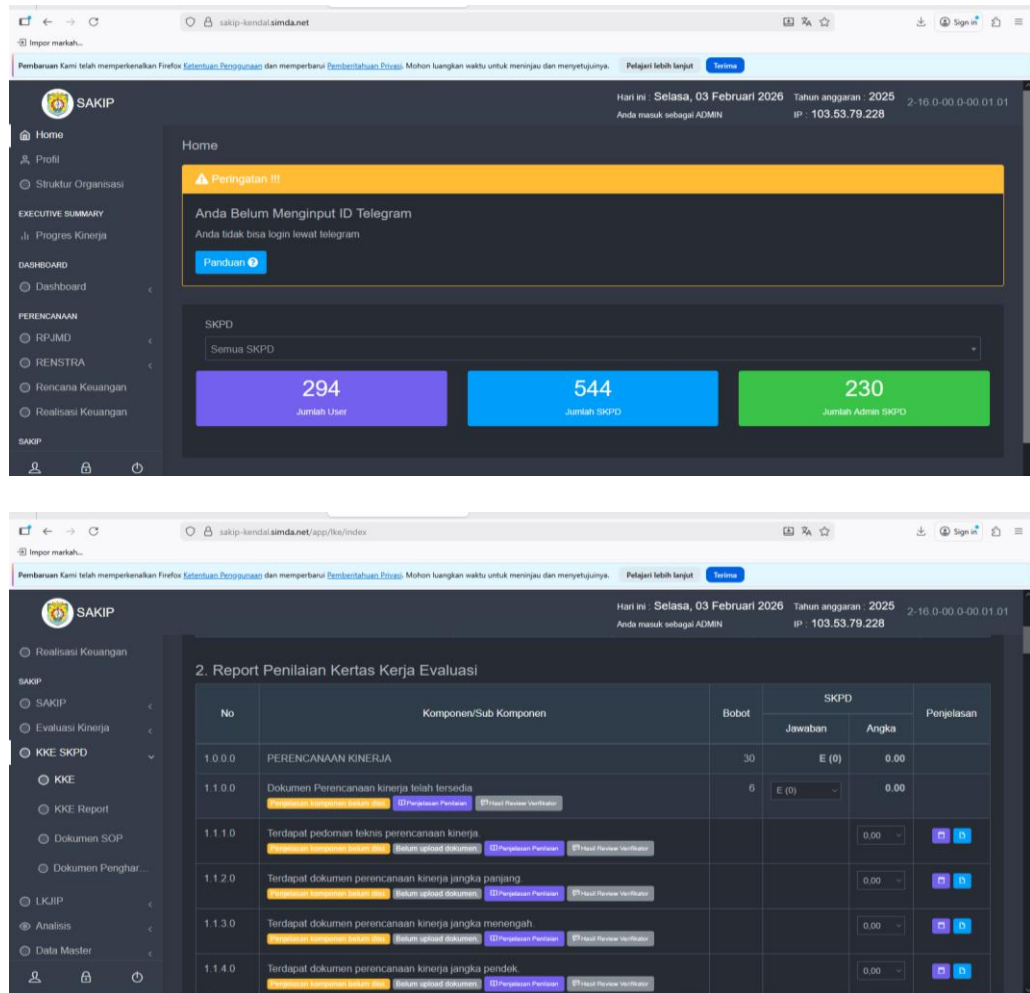
b. Si-EVA (Sistem Informasi Evaluasi)

Sistem Informasi Evaluasi/ Si-EVA adalah instrument pendukung yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja RKPD periode Tribulanan. Si-EVA digunakan untuk mengukur capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, serta Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan. Adapun screenshoot aplikasi Si-EVA adalah sebagai berikut :



c. Aplikasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

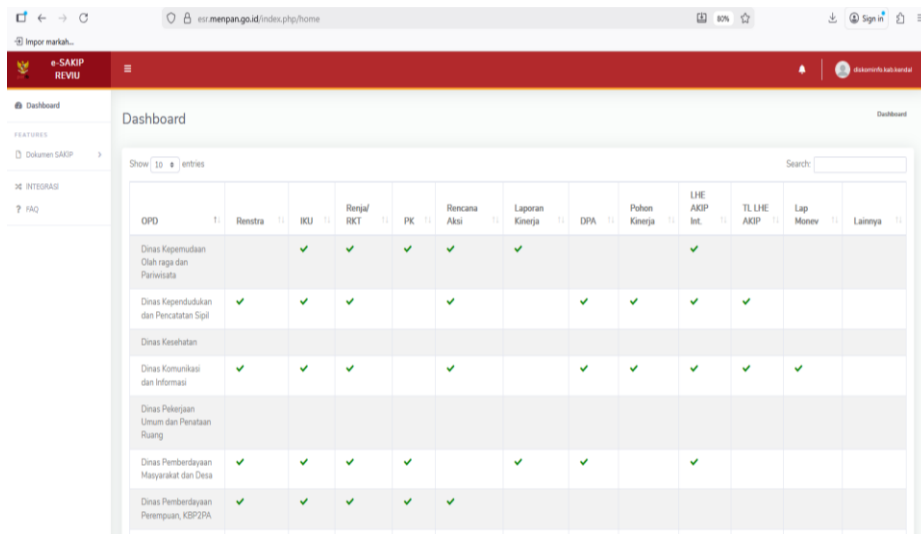
Aplikasi SAKIP adalah instrument pendukung yang digunakan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah. Adapun screenshoot aplikasi SAKIP adalah sebagai berikut :



d. Aplikasi esr menpan (e-sakip review)

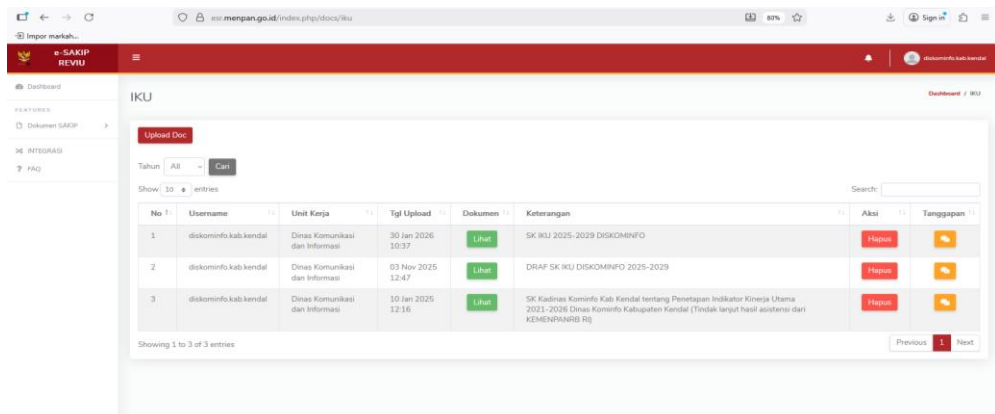
E-SAKIP Reviu (ESR) adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Situs ini dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). .

Adapun screenshoot aplikasi e-sakip review adalah sebagai berikut :



The screenshot shows the ESR Dashboard with a table of performance indicators. The table has columns for different indicators and rows for various government agencies. Green checkmarks indicate that the indicators are being monitored or controlled.

OPD	Renstra	IKU	Rencana BKT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	DPA	Pohon Kinerja	LHE AKOP Int.	TL LHE AKOP	Lap. Manuev	Lainnya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		✓	✓	✓	✓	✓			✓			
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
Dinas Kesehatan												
Dinas Komunikasi dan Informasi	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
Dinas Pemberdayaan Perempuan, KSP2PA	✓	✓	✓	✓	✓							



The screenshot shows the ESR IKU page with a table of uploaded documents. The table has columns for No, Username, Unit Kerja, Tgl Upload, Dokumen, Keterangan, Aksi, and Tanggapan. The documents are listed with their respective upload dates and descriptions.

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	diskominfo.kab.kendal	Dinas Komunikasi dan Informasi	30 Jan 2026 10:37	Uraian	SK IKU 2025-2029 DISKOMINFO	Uraian	
2	diskominfo.kab.kendal	Dinas Komunikasi dan Informasi	03 Nov 2025 12:47	Uraian	DRAF SK IKU DISKOMINFO 2025-2029	Uraian	
3	diskominfo.kab.kendal	Dinas Komunikasi dan Informasi	10 Jan 2025 12:16	Uraian	SK Kadinas Kominfo Kab Kendal tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2021-2026 Dinas Kominfo Kabupaten Kendal (Tidak terlampir hasil evaluasi dari KEMENPANRB RI)	Uraian	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab instansi pemerintah dalam menyampaikan secara terbuka dan transparan atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima laporan pertanggungjawaban. Prinsip ini menuntut setiap perangkat daerah untuk mampu menunjukkan capaian kerja secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, pengukuran kinerja dijadikan sebagai dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Proses pengukuran tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan indikator kinerja yang mencakup aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact), sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh atas kinerja organisasi.

Capaian kinerja Tahun 2025 diperoleh melalui evaluasi terhadap indikator sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2021–2026 serta perencanaan periode 2025–2029.

Adanya pengukuran dan evaluasi yang terarah, diharapkan kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kendal.

Evaluasi capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) rentang capaian dan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Capaian Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	>100%	Sangat Baik
2	85-100%	Baik
3	65-84,99%	Cukup
4	50-64,99%	Kurang
5	<50%	Sangat Kurang

Gambaran realisasi pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital (Tujuan Renstra 2025-2029)	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A	N/A	N/A	2,6
1	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	96,32	97,28	101,00	96,37
2	Meningkatnya layanan publik berbasis IT (Sasaran Renstra 2025-2029)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,15	50,15	100,00	50,40
3	Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2	2,97	148,50	2,25
4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Indeks	407	539	132,43	430
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Sasaran Renstra 2025-2029)	Nilai SAKIP	Nilai	77,6	77,9	100,39	77,85
	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal (Tujuan Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)	Skor	3,91	3,66	93,61	3,91
1	Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	70	70,18	100,26	75
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,15	50,15	100	26,55
2	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	Skor	90,50	97,28	107,49	91

3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data Indonesia (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	%	91,23	91,23	100	70
4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	359	539	150,14	250
5	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	Skor	77	77,9	101,17	74
		Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal)	Skor	90	90	100	85

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun anggaran dapat diketahui tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal pada tahun 2025.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital (Tujuan Renstra 2025-2029)	Indeks Pemerintah Digital	N/A	N/A	N/A	-	
1	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	96,32	97,28	101,00	Sangat Baik	Dokumen Hasil Monev/Penilaian Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Kabupaten/ Kota Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
2	Meningkatnya layanan publik berbasis IT (Sasaran Renstra 2025-2029)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50,15	50,15	100,00	Baik	Dokumen pemetaan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi
3	Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Pembangunan Statistik	2	2,97	148,50	Sangat Baik	Dokumen hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024
4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	407	539	132,43	Sangat Baik	Laporan Assessment Indeks KAMI yang diterbitkan oleh BSSN RI Tahun 2024
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Sasaran Renstra 2025-2029)	Nilai SAKIP	77,6	77,9	100,39	Sangat Baik	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024
		Rata-Rata Capaian (Renstra 2025-2029)			116,46	Sangat Baik	
	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal (Tujuan Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)	3,91	3,66	93,61	Baik	Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB RI

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	70	70,18	100,26	Sangat baik	Registrasi Kontinyu atas Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang terhubung dengan dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50,15	50,15	100	Baik	Dokumen pemetaan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi
2	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	90,50	97,28	107,49	Sangat baik	Dokumen Hasil Monev/Penilaian Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Kabupaten/ Kota Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data Indonesia (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	91,23	91,23	100	Baik	Registrasi Kontinyu atas Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah dengan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia Tahun 2025 oleh Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Kendal
4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	359	539	150,14	Sangat baik	Laporan Assessment Indeks KAMI yang diterbitkan oleh BSSN RI Tahun 2024
5	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	77	77,9	101,17	Sangat baik	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024
		Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal)	90	90	100	Baik	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kominfo Kabupaten Kendal Tahun 2025
		Rata-Rata Capaian (Renstra 2021-2026)			106,58	Sangat baik	

Capaian kinerja Renja Diskominfo 2025

Realisasi pencapaian sasaran Renstra 2025-2029 berdasarkan pencapaian indikator kinerja tujuan jangka menengah dan sasaran strategis, sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebesar **116,46 %**. Pada tahun 2025, capaian kinerja indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, yaitu Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) belum diukur, karena belum dilaksanakan penilaian dari KemenpanRB.

Realisasi kinerja sasaran Diskominfo (Renstra 2025-2029) dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada Masyarakat dengan indikator kinerja :
 - Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP) tercapai dalam kategori sangat baik. Adapun faktor yang mendukung capaian sasaran strategis tersebut adalah Komitmen Pemerintah Daerah dalam agenda Transformasi Digital, Tersedianya website resmi, kanal layanan informasi online, dan aplikasi layanan aduan, Petugas PPID yang terlatih dalam pengelolaan informasi publik, Kerja sama dengan komisi informasi dan instansi lain lainnya, Hubungan baik dengan media massa dan komunitas informasi Masyarakat lainnya.
2. Meningkatnya layanan publik berbasis IT dengan indikator kinerja :
 - Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan capaian baik. Faktor utama ketercapaian indikator tersebut adalah integrasi aplikasi yang dimiliki perangkat daerah dengan data warehouse Diskominfo serta pembangunan aplikasi integrasi layanan. Namun demikian, beberapa pemilik layanan tidak berkenan

memberikan API aplikasi dengan alasan keamanan data, sehingga integrasi tidak dapat dilakukan.

3. Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral dengan indikator kinerja :

- Indeks Pembangunan Statistik dengan capaian sangat baik. Indeks tersebut merupakan hasil evaluasi tahun 2024 (evaluasi per 2 tahun). Penyelenggaraan statistik sektoral telah berjalan dengan baik, didukung oleh kualitas data yang andal, tata kelola statistik yang kuat, serta koordinasi yang efektif antarprodusen data. Upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan Coaching clinic dan sosialisasi SDI dengan tujuan mengembangkan pengetahuan dan keahlian Tim Upating Data dalam pengelolaan data sektoral; Pendampingan penyiapan data dukung produsen data yang akan dijadikan sampel kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kendal serta pengembangan aplikasi Kudasakti.

4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah dengan indikator kinerja :

- Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) yang tercapai dalam kategori sangat baik. Indeks tersebut merupakan hasil penilaian tahun 2024. Pada tahun 2025, Assesment Indeks KAMI tidak dilaksanakan karena telah dievaluasi berdasarkan ISO 27001:2022, yang merupakan standar internasional sistem manajemen keamanan informasi. ISO 27001:2022 memiliki ruang lingkup yang lebih komprehensif, mencakup kebijakan, pengelolaan risiko, pengendalian keamanan, serta proses audit dan perbaikan berkelanjutan. Penilaian

berdasarkan ISO 27001:2022 dilakukan melalui audit internal dan eksternal yang terstruktur, objektif, serta mengacu pada kontrol keamanan yang diakui secara global. Dengan demikian, tujuan utama evaluasi indeks, yaitu mengukur tingkat kematangan dan efektivitas pengelolaan keamanan informasi telah terpenuhi melalui penerapan ISO 27001:2022.

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja :

- Nilai SAKIP tercapai dalam kategori sangat baik. Adapun faktor pendorong tercapainya target kinerja antara lain dikarenakan adanya sinkronisasi antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja, serta adanya evaluasi internal pencapaian sasaran kinerja yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan baik evaluasi bulanan, evaluasi triwulanan, evaluasi semesteran dan evaluasi tahunan.

Realisasi pencapaian sasaran Renstra 2021-2026 berdasarkan pencapaian indikator kinerja tujuan jangka menengah dan sasaran strategis, sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebesar **106,58 %**. Pada tahun 2025, capaian kinerja indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, yaitu Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE) sebesar 93,61% atau dalam kategori baik. Indeks tersebut merupakan hasil penilaian tahun 2024. Indeks SPBE di Kabupaten Kendal tahun 2024 sudah melampaui target pembangunan nasional di tahun 2025 yaitu 3,00 (Lampiran Perpres RPJMN 2025-2029),

sehingga pada tahun 2025 Kabupaten Kendal tidak diwajibkan melakukan evaluasi Indeks SPBE.

Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja adalah belum maksimalnya kinerja tim koordinasi SPBE Kabupaten Kendal sehingga kurang maksimal dalam pemenuhan data dukung evaluasi SPBE oleh Kemenpan RB serta masih lemahnya aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE dan audit TIK. Sedangkan faktor pendorongnya adalah komitmen Kepala Daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan Indeks SPBE dan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan SPBE.

Realisasi kinerja sasaran Diskominfo (Renstra 2021-2026) dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal dengan 2 indikator :
 - Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan capaian sangat baik. Faktor utama ketercapaian indikator tersebut adalah pembangunan jaringan intra Pemerintah Daerah sampai ke tingkat UPTD/ UPTB/ Korwil secara bertahap;
 - Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan capaian baik. Faktor utama ketercapaian indikator tersebut adalah integrasi aplikasi yang dimiliki perangkat daerah dengan data warehouse Diskominfo serta pembangunan aplikasi integrasi

layanan. Namun demikian, beberapa pemilik layanan tidak berkenan memberikan API aplikasi dengan alasan keamanan data, sehingga integrasi tidak dapat dilakukan.

2. Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal dengan 1 indikator kinerja :

- Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP) yang tercapai dalam kategori sangat baik. Adapun faktor yang mendukung capaian sasaran strategis tersebut adalah Komitmen Pemerintah Daerah dalam agenda Transformasi Digital, Tersedianya website resmi, kanal layanan informasi online, dan aplikasi layanan aduan, Petugas PPID yang terlatih dalam pengelolaan informasi publik, Kerja sama dengan komisi informasi dan instansi lain lainnya, Hubungan baik dengan media massa dan komunitas informasi Masyarakat lainnya.

3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dengan 1 indikator kinerja :

- Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) yang tercapai dalam kategori baik. Faktor pendorong ketercapaian indikator sasaran tersebut adalah kolaborasi Forum SDI Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan satu data kabupaten Kendal dan pelaksanaan desk metadata untuk seluruh OPD secara bertahap. Pada tahun 2025, penyusunan metadata difokuskan untuk menambah metadata baik kegiatan, variabel, maupun indikator

pada OPD yang sebelumnya pernah menyusun metadata (tidak ada penambahan OPD).

4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal dengan 1 indikator kinerja :

- Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) yang tercapai dalam kategori sangat baik. Indeks tersebut merupakan hasil penilaian tahun 2024. Pada tahun 2025, Assesment Indeks KAMI tidak dilaksanakan karena telah dievaluasi berdasarkan ISO 27001:2022, yang merupakan standar internasional sistem manajemen keamanan informasi. ISO 27001:2022 memiliki ruang lingkup yang lebih komprehensif, mencakup kebijakan, pengelolaan risiko, pengendalian keamanan, serta proses audit dan perbaikan berkelanjutan. Penilaian berdasarkan ISO 27001:2022 dilakukan melalui audit internal dan eksternal yang terstruktur, objektif, serta mengacu pada kontrol keamanan yang diakui secara global. Dengan demikian, tujuan utama evaluasi indeks, yaitu mengukur tingkat kematangan dan efektivitas pengelolaan keamanan informasi telah terpenuhi melalui penerapan ISO 27001:2022.

5. Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal dengan 2 indikator kinerja :

- Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal) yang tercapai dalam kategori capaian kinerja baik. Nilai SKM Diskominfo termasuk kategori sangat baik, Diskominfo Kabupaten Kendal berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan publik

sesuai dengan Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kendala yang sering ditemui adalah masyarakat pengguna layanan tidak mengisi survey dan kurang paham pentingnya hasil SKM, sehingga pengisian survei tidak dilakukan dengan serius.

2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Perbandingan realisasi serta capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital (Tujuan Renstra 2025-2029)	Indeks Pemerintah Digital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,8	82,96	93,42	89	82,96	93,21	89,5	95,88	107,13	90	96,32	107,02	96,32	97,28	101,00
2	Meningkatnya layanan publik berbasis IT (Sasaran Renstra 2025-2029)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20,90	56,96	272,54	22,03	53,82	244,30	23,16	50,15	216,49	24,29	50,15	206,46	50,15	50,15	100,00
3	Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Pembangunan Statistik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,86	N/A	N/A	2,94	N/A	2	2,97	148,50
4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	130	207,56	159,66	150	359	239,33	175	515	294,29	200	539	269,50	407	539	132,43
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Sasaran Renstra 2025-2029)	Nilai SAKIP	73,76	73,93	100,23	73,8	73,93	100,18	73,85	77	104,27	73,9	77,6	105,01	77,6	77,9	100,39

	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal (Tujuan Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)	2,76	3,27	118,48	3,13	2,93	93,61	3,43	2,95	86,01	3,75	3,66	97,60	3,91	3,66	93,61
1	Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	45	45,87	101,93	50	50	100	55	56,42	102,59	65	65,14	100,22	70	70,18	100,26
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20,90	56,96	272,54	22,03	53,82	244,30	23,16	50,15	216,49	24,29	50,15	206,46	50,15	50,15	100
2.	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	88,8	82,96	93,42	89	82,96	93,21	89,5	95,88	107,13	90	96,32	107,02	90,50	97,28	107,49
3.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data Indonesia (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	10	21,05	210,53	15	47,37	316	25	57,89	231,58	40	91,23	228,08	91,23	91,23	100

4.	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	130	207,56	159,66	150	359	239,33	175	515	294,29	200	539	269,50	359	539	150,14
5.	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	73,76	73,93	100,23	73,8	73,93	100,18	73,85	77	104,27	73,9	77,6	105,01	77	77,9	101,17
		Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal)	83,26	83,76	100,59	83,5	96,93	116,08	83,75	92,06	109,92	84	90	107,14	90	90	100

Pada tahun 2021 s.d 2025 capaian kinerja indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Renstra 2021-2026) yaitu Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE) mengalami fluktuasi. Realisasi Indeks SPBE sempat mengalami penurunan di tahun 2022, namun realisasi tahun 2023 sampai 2024 berhasil naik dan bertahan di tahun 2025 (Skor 3,66), meskipun belum mencapai target. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator dari tahun 2021 s.d 2025 naik turun. Pada tahun 2025 turun 3,99% dari 97,60% menjadi 93,61%. Capaian kinerja turun karena target kinerja naik, namun realisasi sama.

Analisis realisasi serta capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2025 :

1. Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan indikator kinerja utama perangkat daerah :
 - Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, dari tahun 2021 s.d 2025 mengalami kenaikan. Tahun 2025 realisasi naik sebesar 5,04% (realisasi tahun 2025 sebesar 70,18% dibandingkan tahun 2024 sebesar 65,14%). Sedangkan untuk capaian kinerja indikator dari tahun 2021 s.d 2025 naik turun. Tahun 2025 capaian kinerja indikator naik 0,04% (capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100,26% dibanding capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,22%);
 - Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, dari tahun 2021 s.d 2025 mengalami penurunan karena jumlah layanan online semakin banyak, namun belum terintegrasi.

Tahun 2025 realisasi sama dengan tahun 2024 yaitu 50,15%. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator dari tahun 2021 s.d 2025 mengalami penurunan. Tahun 2024 capaian kinerja indikator turun 106,46% (capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% dibanding capaian kinerja tahun 2024 sebesar 206,46%). Hal ini karena target sudah disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya.

2. Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan indikator kinerja utama perangkat daerah : Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP), dari tahun 2021 s.d 2025 mengalami kenaikan. Tahun 2025 realisasi naik sebesar 0,96 poin (realisasi tahun 2025 sebesar skor 97,28 dibandingkan tahun 2024 sebesar skor 96,32). Sedangkan untuk capaian kinerja indikator dari tahun 2021 s.d 2025 naik turun. Tahun 2025 capaian kinerja indikator turun 0,47% (capaian kinerja tahun 2024 sebesar 107,49% dibanding capaian kinerja tahun 2023 sebesar 107,02%).
3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data indonesia, dengan indikator kinerja utama perangkat daerah : persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019), dari tahun 2021 s.d 2024 mengalami kenaikan. Tahun 2025 realisasi tetap sebesar 91,23%. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator dari tahun 2021 s.d 2025 naik turun. Tahun 2025 capaian kinerja indikator turun 128,08% (capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% dibanding

capaian kinerja tahun 2024 sebesar 228,08%). Hal ini karena target sudah disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya.

4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan indikator kinerja utama perangkat daerah : Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI), dari tahun 2021 s.d 2024 mengalami kenaikan. Tahun 2025 realisasi tetap (skor 539) karena tahun 2025 tidak dilaksanakan assessment. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator dari tahun 2021 s.d 2025 naik turun. Tahun 2025 capaian kinerja indikator turun 119,36% (capaian kinerja tahun 2025 sebesar 150,14% dibanding capaian kinerja tahun 2024 sebesar 269,5%) karena penyesuaian target.
5. Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kabupaten Kendal, untuk indikator kinerja :
 - Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal, dari tahun 2021 s.d 2025 mengalami kenaikan. Tahun 2025 realisasi naik sebesar 0,3 poin (realisasi tahun 2025 sebesar 77,9 dibandingkan tahun 2024 sebesar 77,6). Sedangkan untuk capaian kinerja indikator dari tahun 2021-2025 naik turun. Tahun 2025 capaian kinerja indikator turun 3,84% (capaian kinerja tahun 2025 sebesar 101,17% dibanding capaian kinerja tahun 2024 sebesar 105,01%);
 - Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal), dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan, namun 2022 s.d 2024 mengalami penurunan dan bertahan di tahun 2025 pada skor 90. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator dari tahun 2021 s.d 2024 naik turun. Tahun 2025

capaian kinerja indikator turun 7,14% (capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% dibanding capaian kinerja tahun 2023 sebesar 107,14%).

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan, di mana selain menjadi bagian akhir evaluasi kinerja Renstra 2021–2026, juga mulai mengadopsi indikator kinerja sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029. Pada Renstra tersebut, tujuan strategis diarahkan pada Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, dengan indikator kinerja utama antara lain Indeks Pemerintah Digital, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dan Nilai SAKIP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator Indeks Pemerintah Digital belum ditargetkan karena evaluasi dari Kemenpan RB belum dimulai. Sedangkan untuk indikator sasaran, sebagai berikut :

- Indeks Keterbukaan Informasi Publik, realisasi Indeks 97,28 dari target Indeks 96,32 dengan capaian kinerja 101,00%. Tercapainya target Indeks Keterbukaan Informasi Publik mengindikasikan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
- Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi realisasi 50,15 dari target Indeks 50,15%, dengan capaian kinerja 100,00%, mengindikasikan bahwa penyelenggaraan layanan publik berbasis digital telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, serta mencerminkan keberhasilan integrasi layanan guna

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

- Indeks Pembangunan Statistik (IPS), realisasi Indeks 2,97 dari target Indeks 2,05, dengan capaian kinerja 144,88%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral telah berjalan dengan baik, didukung oleh kualitas data yang andal, tata kelola statistik yang kuat, serta koordinasi yang efektif antarprodusen data. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Kendal pada awal periode Renstra 2025–2029.
- Indeks Keamanan Informasi (KAMI), realisasi Indeks 539 dari target Indeks 407, dengan capaian kinerja 132,43%. Capaian ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem manajemen keamanan informasi telah berjalan dengan baik, didukung oleh kebijakan, pengendalian, serta pengelolaan risiko keamanan informasi yang memadai. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi aset informasi dan mendukung penyelenggaraan layanan digital yang aman dan andal. Target Indeks KAMI pada Renstra 2025-2029 turun karena arena penilaian Indeks KAMI (Kesiapan Pengamanan Informasi) mulai tahun 2025 menggunakan Versi 5.0. Indeks KAMI 5.0 merupakan pembaruan dari Indeks KAMI 4.2 dan fokus pada implementasi, bukan sekadar penilaian. Perbedaan utamanya terletak pada cakupan dan pendekatan implementasi. Indeks KAMI 5.0 mengacu pada SNI ISO/IEC 27001:2022.
- Nilai SAKIP, realisasi nilai 77,9 dari target nilai 77,6, dengan capaian

kinerja 100,39% menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan dengan baik, serta mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang baik dan cenderung meningkat, serta mampu menjaga kesinambungan kebijakan pada masa transisi Renstra. Hasil capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Tahun 2025–2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital (Tujuan Renstra 2025-2029)	Indeks Pemerintah Digital	N/A	2,6	-
1	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	97,28	96,37	100,94%
2	Meningkatnya layanan publik berbasis IT (Sasaran Renstra 2025-2029)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50,15	50,40	99,50%
3	Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Pembangunan Statistik	2,97	2,25	132,00%
4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	539	430	125,35%
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Sasaran Renstra 2025-2029)	Nilai SAKIP	77,9	77.85	100,06%
	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kab. Kendal	Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)	Skor 3,66	Skor 3,91	93,61%
1.	Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kab. Kendal	% Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	70,18%	75%	93,57%
		% layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50,15%	26,55%	188,89%
2.	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	Skor 97,28	Skor 91	106,90%
3.	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data indonesia	% perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	91,23%	70%	130,33%

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
4.	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor 539	Skor 250	215,60%
5.	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	Skor 77,9	Skor 74	105,27%
		Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal)	Skor 90	Skor 85	105,88%

Dari Tabel 3.5 tersebut diatas, perbandingan capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dengan target akhir RPJMD menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penilaian ini mencakup indikator kinerja yang bersumber dari Renstra dan RPJMD Tahun 2021–2026, serta indikator awal Renstra dan RPJMD Tahun 2025–2029, mengingat tahun pelaporan merupakan masa transisi perencanaan.

Pada capaian kinerja indikator tujuan pada RPJMD dan Renstra 2025-2029, Indeks Pemerintah Digital belum dilaksanakan penilaian di tahun 2025. Penilaian akan dimulai pada tahun 2026. Sedangkan untuk indikator sasaran, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada Masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik, realisasi sebesar Indeks 97,28 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar Indeks 96,37, sehingga tingkat kemajuan yang dicapai sebesar 100,94%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD.
2. Meningkatnya layanan publik berbasis IT dengan indikator Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, realisasi sebesar 50,15% dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 50,40%, sehingga tingkat kemajuan yang dicapai sebesar

99,50%. Kondisi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi informasi telah berjalan sangat baik dan hampir sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

3. Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik, realisasi sebesar Indeks 2,97 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar Indeks 2,25, sehingga tingkat kemajuan yang dicapai sebesar 132,00%. Peningkatan kualitas data dan statistik sektoral telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan, kualitas, konsistensi, serta pemanfaatan data statistik di perangkat daerah semakin meningkat dan telah mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berbasis data.
4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah dengan indikator kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI), realisasi sebesar Indeks 539 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar Indeks 430, sehingga tingkat kemajuan yang dicapai sebesar 125,35%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah telah meningkat sangat signifikan dan melampaui target RPJMD. Evaluasi Indeks KAMI ke depan akan menggunakan Indeks KAMI Versi 5 (V.5), dengan indikator yang lebih komprehensif untuk menilai tingkat kematangan keamanan

informasi. Indeks KAMI V.5 menekankan kesesuaian penerapan keamanan informasi terhadap standar SNI ISO/IEC 27001 serta kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko keamanan informasi. Sehingga, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan dengan Indeks KAMI V.5, melakukan evaluasi keamanan informasi secara berkala, memperkuat pengelolaan risiko dan aset informasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta memastikan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi.

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP, realisasi sebesar Nilai 77,9 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar Nilai 77,85, sehingga tingkat kemajuan yang dicapai sebesar 100,06%.

Perbandingan capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 2021-2026. Pada capaian kinerja indikator tujuan, Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE) sudah mendekati target akhir Renstra, yaitu 93,61%. Secara umum progress capaian kinerja sasaran mengarah ketercapaian target akhir kinerja RPJMD dan Renstra 2021-2026, bahkan capaian beberapa indikator sudah melebihi target kinerja akhir.

1. Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan indikator kinerja utama perangkat daerah :

- Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, tingkat kemajuannya 93,57% dari target akhir RPJMD 2021-2026.
 - Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, tingkat kemajuannya 188,89% artinya sudah melebihi target akhir RPJMD 2021-2026.
2. Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan indikator kinerja utama perangkat daerah : Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP), tingkat kemajuannya 106,90% artinya sudah melebihi target akhir RPJMD 2021-2026.
 3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data indonesia, dengan indikator kinerja utama perangkat daerah : persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019), tingkat kemajuannya 130,33% artinya sudah melebihi target akhir RPJMD 2021-2026.
 4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan indikator kinerja utama perangkat daerah : Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI), tingkat kemajuannya 215,60% artinya sudah melebihi target akhir RPJMD 2021-2026.
 5. Indikator sasaran ke lima, Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kabupaten Kendal, untuk indikator kinerja :

- Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal, tingkat kemajuannya 105,27% artinya sudah melebihi target akhir RPJMD 2021-2026.
- Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal), tingkat kemajuannya 105,88% artinya sudah melebihi target akhir RPJMD 2021-2026.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan Standar Nasional tidak dapat dilakukan analisis karena tidak ada standar nasional yang menjadi acuan untuk pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dimaksud.

5. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Secara terperinci analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital (Tujuan Renstra 2025-2029)	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A	N/A	N/A	Belum dilakukan penilaian/assessment	Upaya yang dilakukan : - Memperkuat koordinasi dan komitmen perangkat daerah dalam pemenuhan indikator pemdi. - Penyesuaian menyeluruh terhadap tata kelola, kebijakan, dan dokumen pendukung seiring dengan peralihan dari SPBE ke skema PEMDI, serta memastikan kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi indikator evaluasi yang baru agar capaian kinerja dapat meningkat pada periode berikutnya.
1	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	96,32	97,28	101,00	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : - Tersedianya website resmi, kanal layanan informasi online, dan aplikasi layanan aduan - Petugas PPID yang terlatih dalam pengelolaan informasi publik. - Kerja sama dengan komisi informasi dan instansi lain lainnya	

2	Meningkatnya layanan publik berbasis IT (Sasaran Renstra 2025-2029)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,15	50,15	100,00	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : - Pembangunan super app layanan terintegrasi dengan SSO "GAMPIL" yang mengintegrasikan beberapa layanan public, seperti layanan ketenagakerjaan, layanan perijinan, layanan pajak bumi dan bangunan, layanan administrasi kependudukan dan layanan pengujian kendaraan bermotor. - Integrasi aplikasi yang dimiliki perangkat daerah dengan data warehouse Diskominfo. Faktor Penghambat Capaian Kinerja : - Masih adanya pemilik layanan untuk mengintegrasikan layanan, dikarenakan layanan pusat dan beberapa masih belum dapat berbagi API alasan keamanan.	Upaya yang dilakukan : - Koordinasi dengan OPD terkait integrasi dan pengelolaan layanan digital
3	Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2	2,97	148,50	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : Adanya pendampingan pembina data dan kolaborasi intensif penyelenggara SDI tingkat daerah selama proses penilaian serta pengumpulan data dukung EPSS	Upaya yang dilakukan : - Mengingat lokus sampling yang baru, untuk mempertahankan/meningkatkan capaian nilai indeks, pendampingan dan pembinaan telah dilakukan sebelum s/d saat proses penilaian dan akan dilakukan evaluasi secara reguler terhadap

								penyusunan data dukungnya
4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah (Sasaran Renstra 2025-2029)	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Indeks	407	539	132,43	Capaian kinerja ini merupakan hasil assessment tahun 2024, dengan faktor pendukung capaian kinerja : - Penetapan regulasi penyelenggaraan manajemen keamanan informasi telah tercukupi - Dukungan pendampingan dari institusi pembina, yaitu BSSN dan Diskominfo Prov. Jateng - Telah dilaksanakannya sebagian layanan keamanan informasi yang sesuai prosedur dan pengendaliannya	Upaya yang dilakukan : - Telah dilaksanakan sertifikasi ISO 27001:2022, yang merupakan standar internasional sistem manajemen keamanan informasi.
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Sasaran Renstra 2025-2029)	Nilai SAKIP	Nilai	77.6	77,9	100,39	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : Pencapaian target kinerja antara lain dikarenakan adanya sinkronisasi antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja, serta adanya evaluasi internal pencapaian sasaran kinerja yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Upaya yang dilakukan : - Rapat koordinasi dan evaluasi bulanan (internal dan POK), evaluasi tribulanan (monev capaian kinerja RKPD) dan evaluasi tahunan pada Dinas Kominfo Kabupaten Kendal.
	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal (Tujuan Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)	Skor	3,91	3,66	93,61	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : - Nilai yang digunakan masih mengacu pada hasil evaluasi SPBE tahun sebelumnya, karena tidak	Upaya yang dilakukan : - Memperkuat koordinasi dan komitmen perangkat daerah dalam pemenuhan indikator pemdi. - Penyesuaian menyeluruh

							dilaksanakannya self-assessment pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat pembaruan data dukung maupun peningkatan indikator penilaian.. - Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya belum berjalan optimal, baik dari sisi koordinasi tim, penguatan kebijakan internal, maupun perbaikan tata kelola SPBE.	terhadap tata kelola, kebijakan, dan dokumen pendukung seiring dengan peralihan dari SPBE ke skema PEMDI, serta memastikan kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi indikator evaluasi yang baru agar capaian kinerja dapat meningkat pada periode berikutnya.
1	Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	70	70,18	100,26	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : - Analisis keberhasilan : Tercapainya target di mana seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD/UPTD), termasuk kecamatan memiliki akses internet stabil, serta Jaminan koneksi dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) sehingga layanan publik digital tidak terganggu. Faktor Penghambat Capaian Kinerja : - Kurangnya tenaga ahli jaringan di tingkat kecamatan untuk melakukan <i>troubleshooting</i> ringan tanpa menunggu tim dari kabupaten dan kegagalan dalam memitigasi serangan	Upaya yang dilakukan : - Perlu menyediakan jalur cadangan (seperti satelit atau <i>microwave link</i>) untuk wilayah yang sulit dijangkau kabel fisik agar koneksi tetap terjaga jika jalur utama terputus, serta perlu adanya penggunaan dashboard <i>Network Management System</i> (NMS) yang dapat dipantau langsung untuk mendeteksi gangguan di titik manapun secara instan.

							<i>Ransomware</i> atau kebocoran data pada jaringan internal yang terhubung antar instansi.	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,15	50,15	100	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : - Pembangunan super app layanan terintegrasi dengan SSO "GAMPIL" yang mengintegrasikan beberapa layanan public, seperti layanan ketenagakerjaan, layanan perijinan, layanan pajak bumi dan bangunan, layanan administrasi kependudukan dan layanan pengujian kendaraan bermotor. - Integrasi aplikasi yang dimiliki perangkat daerah dengan data warehouse Diskominfo. Faktor Penghambat Capaian Kinerja : - Masih adanya pemilik layanan untuk mengintegrasikan layanan, dikarenakan layanan pusat dan beberapa masih belum dapat berbagi API alasan keamanan.	Upaya yang dilakukan : Koordinasi dengan OPD terkait integrasi dan pengelolaan layanan digital
2	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	Skor	90,50	97,28	107,49	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : - Tersedianya website resmi, kanal layanan informasi online, dan aplikasi layanan aduan - Petugas PPID yang terlatih	

							dalam pengelolaan informasi publik. - Kerja sama dengan komisi informasi dan instansi lain lainnya	
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data Indonesia (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	%	91,23	91,23	100	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : - Sebagian besar data sektoral dari perangkat daerah (produsen data) telah didiseminasikan dalam portal data daerah dan sudah melalui verifikasi berjenjang terkait pemenuhan prinsip SDI. Namun terdapat beberapa data yang belum memenuhi aspek interoperabilitas karena portal data produsen data yang belum terintegrasi dan butuh pembaruan sistem mandiri	Penyusunan metadata kegiatan akan dilakukan terhadap data sektoral perangkat daerah yang belum memenuhi prinsip SDI. Selain itu, programmer dari Diskominfo akan memfasilitasi proses integrasi portal data perangkat daerah yang masih memungkinkan untuk diintegrasikan dengan portal data daerah secara bertahap.
4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	359	539	150,14	Capaian kinerja ini merupakan hasil assessment tahun 2024, dengan faktor pendukung capaian kinerja : - Penetapan regulasi penyelenggaraan manajemen keamanan informasi telah tercukupi - Dukungan pendampingan dari institusi pembina, yaitu BSSN dan Diskominfo Prov. Jateng - Telah dilaksanakannya sebagian layanan keamanan informasi yang	Upaya yang dilakukan : - Telah dilaksanakan sertifikasi ISO 27001:2022, yang merupakan standar internasional sistem manajemen keamanan informasi.

							sesuai prosedur dan pengendaliannya	
5	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	Skor	77	77,9	101,17	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : - Pencapaian target kinerja antara lain dikarenakan adanya sinkronisasi antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja, serta adanya evaluasi internal pencapaian sasaran kinerja yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Upaya yang dilakukan : - Rapat koordinasi dan evaluasi bulanan (internal dan POK), evaluasi tribulanan (monev capaian kinerja RKPD) dan evaluasi tahunan pada Dinas Kominfo Kabupaten Kendal.
		Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal)	Skor	90	90	100	Faktor Pendukung Capaian Kinerja : - Diskominfo Kabupaten Kendal berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Faktor penghambat : - masyarakat pengguna layanan tidak mengisi survey dan kurang paham pentingnya hasil SKM, sehingga pengisian survei tidak dilakukan dengan serius.	Upaya yang dilakukan : - Menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam pengisian survey layanan

e-monev rkpd Diskominfo 2025

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam mencapai tujuan dan sasarannya pada tahun 2025 sebanyak Rp. 13.562.976.120,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.839.054.138,00 atau 94,66% terdapat efisiensi sebesar 5,34%, dengan rincian per sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 1.968.333.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.897.517.028,00 atau 96,40% terdapat efisiensi sebesar 3,60%.
2. Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kab. Kendal pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 3.529.493.114,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.466.355.855,00 atau 98,21% terdapat efisiensi sebesar 1,79%.
3. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data indonesia pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 105.348.860,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.742.999,00 atau 85,19% terdapat efisiensi sebesar 14,81%.
4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kab. Kendal pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 565.223.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 535.865.705,00 atau 94,81% terdapat efisiensi sebesar 5,19%.

5. Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 7.394.578.146,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.849.572.551,00 atau 92,63% terdapat efisiensi sebesar 7,37%.

Secara keseluruhan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal (Tujuan Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)	3,91	3,66	93,61	13.562.976.120,00	12.839.054.138,00	94,66%	5,34%
1	Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	70	70,18	100,26	3.529.493.114,00	3.466.355.855,00	98,21%	1,79%
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50,15	50,15	100				
2	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	90,50	97,28	107,49	1.968.333.000,00	1.897.517.028,00	96,40%	3,60%
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data Indonesia (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	91,23	91,23	100	105.348.860,00	89.742.999,00	85,19%	14,81%

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	359	539	150,14	565.223.000,00	535.865.705,00	94,81%	5,19%
5	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	77	77,9	101,17	7.394.578.146,00	6.849.572.551,00	92,63%	7,37%
		Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal)	90	90	100				

SPJ Fungsional dan e-monev RPJMD Dinas Kominfo Tahun 2025

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, didukung 5 (lima) program dengan analisis kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan tercantum pada Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8

**Analisis Keberhasilan/Kegagalan Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal (Tujuan Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)	93,61				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	101,17				
		Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab Kendal)	100				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	100,00	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran & laporan evaluasi kinerja Dinas Kominfo tepat waktu (%)	100,00	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100,00	Menunjang
					Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, dan RTP SPIP yang disusun (Dokumen)	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100,00	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100,00	Menunjang

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi dan laporan keuangan Dinas Kominfo (%)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100,00	Menunjang
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	100,00	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur Dinas Kominfo dalam berpakaian dinas (%)	100,00	Menunjang
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100,00	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo (%)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100,00	Menunjang
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100,00	Menunjang

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang Dinas Kominfo sesuai rencana kebutuhan (%)	100,00	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100,00	Menunjang
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kominfo (%)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Dinas Kominfo (%)	100,00	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100,00	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100,00	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	107,49				
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif) (Score)	125,68	Menunjang

				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah (%)	125,00	Menunjang
					Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten (%)	142,86	Menunjang
					Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) (%)	138,89	Menunjang
					Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan (%)	155,17	Menunjang
					Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan di web oleh Perangkat Daerah (%)	100,00	Menunjang
				Relasi Media	jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	100,00	Menunjang
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	100,00	Menunjang
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	100,00	Menunjang
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	100,00	Menunjang
				Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	100,00	Menunjang
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	100,00	Menunjang
3	Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet	100,26				

	Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100				
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100,26	Menunjang
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	112,35	Menunjang
					Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (%)	100,26	Menunjang
					Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar (%)	100,00	Menunjang
					Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai PM Kominfo 5/2015 (%)	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	100,00	Menunjang
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengimplemen tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (%)	100,00	Menunjang
					Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah (%)	100,00	Menunjang

					Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah (%)	100,00	Menunjang
					Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city (%)	146,16	Menunjang
					Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo (%)	108,57	Menunjang
					Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik (%)	100,00	Menunjang
					Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terdaftar di Kemenkominfo) (%)	100,00	Menunjang
					Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah (%)	100,00	Menunjang
				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda (Dokumen)	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Dokumen)	100,00	Menunjang
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Aplikasi)	100,00	Menunjang
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas (Orang)	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Orang)	100,55	Menunjang
				Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Dokumen)	100,00	Menunjang

				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo (Orang)	104,93	Menunjang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data Indonesia (Sasaran Renstra 2021-2026)	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	100				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendal (%)	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perangkat daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100,00	Menunjang
					Persentase organisasi perangkat daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100,00	Menunjang
					Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo) (%)	100,00	Menunjang
					Persentase data yang dapat berbagi pakai (%)	100,00	Menunjang
					Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral (%)	136,24	Menunjang
					Persentase kelengkapan metadata variabel statistik sektoral (%)	115,00	Menunjang
					Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sektoral (%)	119,74	Menunjang
				Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan (Orang)	100,00	Menunjang

				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Kegiatan)	122,62	Menunjang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
5	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal (Sasaran Renstra 2021-2026)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	150,14				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian (%)	116,48	Menunjang
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik (%)	122,29	Menunjang
					Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah (%)	1705,00	Menunjang
					Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan (%)	284,13	Menunjang
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serangan siber pada sistem elektronik yang dilaksanakan (SE)	236,36	Menunjang
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	108,64	Menunjang
					Jumlah layanan keamanan informasi yang dilaksanakan (Layanan)	107,73	Menunjang
					Jumlah OPD yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (OPD)	100,00	Menunjang
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan	100,00	Menunjang

				Kabupaten/Kota	pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)		
				Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data, informasi dan berita yg masuk dalam sistem persandian (Item)	80,80	Menunjang
					Jumlah jaringan komunikasi sandi yang dilaksanakan sesuai dengan PHKS (Titik)	93,03	Menunjang
					Jumlah opd yg terpasang ip phone (OPD)	100,00	Menunjang
					Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	200,00	Menunjang

e-monev rkpd diskominfo 2025

B. REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2025 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Bidang dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 didanai dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13.562.976.120,00 (*tiga belas milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah*). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir Desember tahun 2025 telah menyerap anggaran sebesar Rp. 12.839.054.138,00 (*dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*) atau tercapai 94,66% dari total anggaran, dengan rincian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung APBD sebesar Rp. 7.394.578.146,- terealisasi sebesar Rp. 6.849.572.551,00 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 92,63%. Realisasi anggaran seluruh kegiatan memiliki capaian diatas 80%, namun ada beberapa sub kegiatan dengan realisasi dibawah 80% yaitu sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena bersifat penyediaan.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung APBD sebesar Rp. 1.968.333.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.897.517.028,00 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 96,40%. Capaian realisasi anggaran seluruh kegiatan dan sub kegiatan diatas 80%.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika didukung APBD sebesar Rp. 3.529.493.114,00 terealisasi sebesar Rp. 3.466.355.855,00 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 98,21%. Capaian realisasi anggaran seluruh kegiatan dan sub kegiatan diatas 80%.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung APBD sebesar Rp. 105.348.860,00 terealisasi sebesar Rp. 89.742.999,00 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 85,19%. Realisasi anggaran kegiatan memiliki capaian diatas 80%, namun ada sub kegiatan dengan realisasi dibawah 80% yaitu sub kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia karena adanya efisiensi pada beberapa rekening belanja yaitu BBM, ATK dan berkurangnya jumlah pendamping kegiatan metadata dari BPS .

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi didukung APBD sebesar Rp. 565.223.000,00 terealisasi sebesar Rp. 535.865.705,00 sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 94,81%. Capaian realisasi anggaran seluruh kegiatan dan sub kegiatan diatas 80%.

Gambaran akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sampai dengan akhir Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.394.578.146,00	6.849.572.551,00	92,63
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.250.000,00	45.380.100,00	96,04
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.650.000,00	41.248.300,00	96,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4.600.000,00	4.131.800,00	89,82
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.018.853.001,00	5.594.372.324,00	92,95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.018.853.001,00	5.594.372.324,00	92,95
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.590.000,00	103.093.959,00	88,42
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	116.590.000,00	103.093.959,00	88,42
Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.172.113,00	500.316.004,00	89,31
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	9.917.000,00	9.917.000,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.065.000,00	29.214.260,00	81,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	11.132.200,00	55,66
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.460.000,00	4.611.600,00	34,26
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.195.000,00	3.495.256,00	83,32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	476.535.113,00	441.945.688,00	92,74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.378.000,00	300.532.081,00	92,94
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.818.000,00	24.808.831,00	77,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.560.000,00	275.723.250,00	94,57
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328.335.032,00	305.878.083,00	93,16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.214.032,00	91.884.600,00	88,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.721.000,00	70.666.000,00	88,64
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	118.927.483,00	99,11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000,00	24.400.000,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.968.333.000,00	1.897.517.028,00	96,40
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.968.333.000,00	1.897.517.028,00	96,40
Relasi Media	889.816.000,00	874.582.776,00	98,29
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	42.530.000,00	38.834.800,00	91,31
Pelayanan Informasi Publik	268.578.000,00	266.657.500,00	99,28
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	661.701.000,00	617.369.482,00	93,30
Penyusunan Konten	105.708.000,00	100.072.470,00	94,67
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.529.493.114,00	3.466.355.855,00	98,21
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	40.985.300,00	35.371.011,00	86,30

Daerah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	40.985.300,00	35.371.011,00	86,30
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.488.507.814,00	3.430.984.844,00	98,35
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	51.050.600,00	50.150.000,00	98,24
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	398.391.214,00	378.009.131,00	94,88
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	120.480.000,00	111.533.872,00	92,57
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	570.938.000,00	552.335.350,00	96,74
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4.668.000,00	3.998.413,00	85,66
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2.342.980.000,00	2.334.958.078,00	99,66
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	105.348.860,00	89.742.999,00	85,19
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	105.348.860,00	89.742.999,00	85,19
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	99.809.560,00	86.627.995,00	86,79
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	5.539.300,00	3.115.004,00	56,23
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	565.223.000,00	535.865.705,00	94,81
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	554.740.000,00	526.512.688,00	94,91

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	554.740.000,00	526.512.688,00	94,91
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10.483.000,00	9.353.017,00	89,22
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.483.000,00	9.353.017,00	89,22
TOTAL	13.562.976.120,00	12.839.054.138,00	94,66

SPJ Fungsional Dinas Kominfo Desember 2025

C. INOVASI

Adapun inovasi yang sudah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. SIAP Kendal

SIAP Kendal adalah aplikasi layanan digital milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang digunakan untuk mengajukan permohonan informasi publik secara mudah, cepat, dan transparan. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi, sekaligus mendukung pelayanan yang akuntabel, responsif, dan berbasis teknologi.

2. GAMPIL (Gerbang Masuk aPlikasi Integrasi Layanan)

Aplikasi yang menjadi portal dimana didalamnya terdapat layanan dari berbagai aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintah Kabupaten Kendal, dimana dalam hal ini masyarakat tidak perlu menghafal url atau link pada setiap layanan karena semua layanan tersebut akan terintegrasi menjadi satu.

3. JOSS Kendal

JOSS Kendal adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan melacak surat secara digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Aplikasi ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan surat Bupati Kabupaten Kendal, sehingga proses administrasi menjadi lebih tertib, efisien, dan mudah dipantau.

4. KUDASAKTI (Kumpulan Data Statistik Terintegrasi)

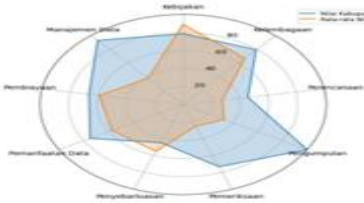
Pembaruan portal data daerah (Kudasakti) secara keseluruhan termasuk dalam mekanisme unggah data, interoperabilitas data, keamanan sistem dan integrasi dengan portal yang dimiliki Perangkat Daerah

D. PENGHARGAAN

Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berhasil membawa Pemerintah Kabupaten Kendal meraih beberapa penghargaan baik di level Provinsi maupun Nasional, yang terangkum dalam Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Penghargaan yang Diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Uraian Prestasi	Dokumentasi
1	Diskominfo Kendal mendapat penghargaan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kendal dalam ajang Top Digital Awards atas keberhasilan implementasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik dan operasional pemerintah	

2	Pemerintah Kabupaten Kendal kembali meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award dengan predikat Informatif dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 97,28 .																																																													
3	Peningkatan nilai evaluasi SDI Bappenas secara signifikan dari 39,91 (Predikat Kurang) menjadi 70,30 (Predikat Baik)	Tabel 2 Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI <table><tr><th>No</th><th>Indeks</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>Domain Kebijakan dan Kelembagaan</td><td>20%</td><td>79.10</td></tr><tr><td>2</td><td>Domain Penyelenggaraan SDI</td><td>56%</td><td>64.12</td></tr><tr><td>3</td><td>Domain Data Leadership</td><td>24%</td><td>77.38</td></tr><tr><td colspan="3">Indeks Satu Data Indonesia</td><td>70.30</td></tr></table> Tabel 3 Nilai Indeks Aspek <table><tr><th>No</th><th>Aspek</th><th>Bobot</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>Aspek Kebijakan</td><td>8%</td><td>78.60</td></tr><tr><td>2</td><td>Aspek Kelembagaan</td><td>12%</td><td>79.44</td></tr><tr><td>3</td><td>Aspek Perencanaan</td><td>14%</td><td>45.97</td></tr><tr><td>4</td><td>Aspek Pengumpulan</td><td>12%</td><td>100.00</td></tr><tr><td>5</td><td>Aspek Pemeriksaan</td><td>14%</td><td>73.38</td></tr><tr><td>6</td><td>Aspek Penyebarluasan</td><td>16%</td><td>45.00</td></tr><tr><td>7</td><td>Aspek Pemanfaatan Data</td><td>12%</td><td>75.00</td></tr><tr><td>8</td><td>Aspek Pembiayaan</td><td>6%</td><td>66.67</td></tr><tr><td>9</td><td>Aspek Manajemen Data</td><td>6%</td><td>92.86</td></tr></table>  Gambar 2 Hasil Penilaian Evaluasi SDI	No	Indeks	Bobot	Nilai	1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	79.10	2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	64.12	3	Domain Data Leadership	24%	77.38	Indeks Satu Data Indonesia			70.30	No	Aspek	Bobot	Nilai	1	Aspek Kebijakan	8%	78.60	2	Aspek Kelembagaan	12%	79.44	3	Aspek Perencanaan	14%	45.97	4	Aspek Pengumpulan	12%	100.00	5	Aspek Pemeriksaan	14%	73.38	6	Aspek Penyebarluasan	16%	45.00	7	Aspek Pemanfaatan Data	12%	75.00	8	Aspek Pembiayaan	6%	66.67	9	Aspek Manajemen Data	6%	92.86
No	Indeks	Bobot	Nilai																																																											
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	79.10																																																											
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	64.12																																																											
3	Domain Data Leadership	24%	77.38																																																											
Indeks Satu Data Indonesia			70.30																																																											
No	Aspek	Bobot	Nilai																																																											
1	Aspek Kebijakan	8%	78.60																																																											
2	Aspek Kelembagaan	12%	79.44																																																											
3	Aspek Perencanaan	14%	45.97																																																											
4	Aspek Pengumpulan	12%	100.00																																																											
5	Aspek Pemeriksaan	14%	73.38																																																											
6	Aspek Penyebarluasan	16%	45.00																																																											
7	Aspek Pemanfaatan Data	12%	75.00																																																											
8	Aspek Pembiayaan	6%	66.67																																																											
9	Aspek Manajemen Data	6%	92.86																																																											
4	Sertifikasi ISO 27001:2022 Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan Pusat Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal																																																													

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LKjIP Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, yaitu Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital dengan indikator Indeks Pemerintah Digital belum diukur
 - 1.1. Pencapaian sasaran strategis 1 Renstra 2025-2029 “Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat ” tahun 2025 terhadap target dengan indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 101,00% (Sangat Baik). Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2025-2029 sebesar 100,94%% artinya sudah melebihi target. Pemasangan target Renstra sebelum nilai tahun

2025 dirilis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada perubahan Renstra.

- 1.2. Pencapaian sasaran strategis 2 Renstra 2021-2026 “Meningkatnya layanan publik berbasis IT” tahun 2025 terhadap target dengan indikator kinerja Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100% (Baik). Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2021-2026 sebesar 99,50%.
- 1.3. Pencapaian sasaran strategis 3 Renstra 2025-2029 “Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral” tahun 2025 terhadap target dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 148,50 % (Sangat Baik). Indeks tersebut merupakan hasil penilaian tahun 2024. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2025-2029 sebesar 132,00% artinya sudah melebihi target akhir. Pemasangan target Renstra mengikuti RPJPD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada perubahan Renstra.
- 1.4. Pencapaian sasaran strategis 4 Renstra 2025-2029 “Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah” tahun 2025 terhadap target dengan indikator kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sebesar 132,43% (Sangat Baik). Indeks tersebut merupakan hasil penilaian tahun 2024. Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2025-2029 sebesar 125,35%% artinya sudah melebihi target akhir. Namun, evaluasi kematangan keamanan informasi tahun 2024 menggunakan Kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013, sedangkan mulai tahun 2026 menggunakan Kriteria SNI ISO/IEC

27001:2022 dengan beberapa penyesuaian indikator dan lebih kompleks.

1.5. Pencapaian sasaran strategis 5 Renstra 2021-2026 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” tahun 2025 terhadap indikator kinerja Nilai SAKIP sebesar 100,39% (Sangat Baik). Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2025-2029 sebesar 100,06% artinya sudah melebihi target akhir Renstra. Pemasangan target Renstra sebelum nilai SAKIP dirilis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada perubahan Renstra.

2. Capaian kinerja indikator tujuan Renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, yaitu Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE) sebesar 93,61% atau dalam kategori baik. Indeks tersebut merupakan hasil penilaian tahun 2024. Tahun 2025 tidak dilaksanakannya self-assessment, sehingga tidak ada pembaruan data dukung maupun peningkatan indikator penilaian. Indeks SPBE di Kabupaten Kendal tahun 2024 sudah melampaui target pembangunan nasional di tahun 2025 yaitu 3,00 (Lampiran Perpres RPJMN 2025-2029), sehingga pada tahun 2025 Kabupaten Kendal tidak diwajibkan melakukan evaluasi Indeks SPBE. Kabupaten Kendal memperoleh **skor 3,66**, skor tersebut masih dibawah target Renstra yaitu skor 3,91. Persentase capaian kinerja sebesar 97,60% (Kategori Baik). Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya belum berjalan optimal, baik dari sisi koordinasi tim, penguatan kebijakan internal, maupun perbaikan tata kelola SPBE.

2.1. Pencapaian sasaran strategis 1 Renstra 2021-2026 “Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal” tahun 2025 terhadap target dengan indikator kinerja :

- Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebesar 100,26% (Sangat Baik). Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2021-2026 sebesar 93,57%. Pada Renstra 2025-2029 indikator ini kembali diukur sebagai indikator sasaran.
- Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100% (Baik). Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2021-2026 sebesar 188,89% artinya sudah melebihi target akhir.

2.2. Pencapaian sasaran strategis 2 Renstra 2021-2026 “Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal” tahun 2025 terhadap target dengan indikator kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP) sebesar 107,49% (Sangat Baik). Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2021-2026 sebesar 106,90% artinya sudah melebihi target akhir Renstra 2021-2026. Hal ini didukung dengan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award dengan predikat Informatif dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah.

2.3. Pencapaian sasaran strategis 3 Renstra 2021-2026 “Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data Indonesia” tahun 2025 terhadap target dengan indikator kinerja Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata

sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) sebesar 100% (Baik). Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2021-2026 sebesar 130,33% artinya sudah melebihi target akhir. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal untuk memberikan pembinaan kepada perangkat daerah serta melaksanakan kegiatan penyusunan metadata statistik sektoral perangkat daerah Kabupaten Kendal.

2.4. Pencapaian sasaran strategis 4 Renstra 2021-2026 “Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal” tahun 2025 terhadap target dengan indikator kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sebesar 150,14% (Sangat Baik). Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2021-2026 sebesar 215,60% artinya sudah melebihi target akhir. Hal ini didukung dengan evaluasi kematangan keamanan informasi dari BSSN dengan hasil Tingkat Kesiapan PSE dalam Pemenuhan Kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 : 539 (Cukup Baik).

2.5. Pencapaian sasaran strategis 5 Renstra 2021-2026 “Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal” tahun 2024 terhadap indikator kinerja :

- Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal sebesar 101,17% (Sangat Baik). Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2021-2026 sebesar 105,27% artinya sudah melebihi target akhir.

- Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab. Kendal) sebesar 100% (Baik).
Tingkat kemajuan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2021-2026 sebesar 105,88% artinya sudah melebihi target akhir.
3. Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Renstra 2025-2029) sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebesar 116,46 % dalam kategori sangat baik dengan capaian rata rata telah melampaui target yang ditetapkan.
 4. Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Renstra 2021-2026) sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebesar 106,58 % dalam kategori sangat baik.
 5. Realisasi Keuangan sampai akhir bulan Desember 2025 sebesar Rp. 12.839.054.138,00 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) atau tercapai 94,66% dari total anggaran Rp. 13.562.976.120,00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah). Efisiensi sebesar Rp. 723.921.982,00,- (5,34%) karena silpa kegiatan maupun efisiensi pada beberapa kegiatan.

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal pada tahun selanjutnya, maka perlu dilakukan :

1. Pengawasan, pemantauan atau pengukuran kinerja sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan;

2. Penyusunan anggaran, agar memprioritaskan pencapaian kinerja pada program / kegiatan yang belum tercapai kinerjanya;
3. Publikasi dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Diskominfo dan <https://esr.menpan.go.id/> tepat waktu dan dapat dibuktikan;
4. Penyusunan SOP teknis dan administrative serta SOP layanan yang ada di Diskominfo;
5. Penyusunan dokumen Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan /kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik , terutama terkait indikator kinerja yang belum tercapai;
6. Penyusunan laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal secara rutin;
7. Perbaikan pelayanan dan manajemen kinerja secara berkelanjutan, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah;
8. Penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan Pemerintah Digital/SPBE dan Smart City.
9. Kerja sama dan kemitraan dengan dinas/ instansi terkait untuk mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kendal guna mewujudkan e-government.
10. Pengembangan SuperApp berkelanjutan dan integrasi aplikasi layanan Pemerintah Kabupaten Kendal.
11. Pembangunan jaringan intra Pemerintah Daerah sampai ke tingkat UPTD/UPTB/ Korwil secara bertahap.
12. Pembinaan dan pendampingan ke PPID Pelaksana maupun PPID Desa

terkait penyusunan DIP dan DIK serta penyampaian informasi berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat di website dan media sosial.

13. Pembinaan dan pendampingan kepada produsen data dalam rangka penerapan Penyelenggaraan SDI.
14. Pengintegrasian antar sistem elektronik untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia yaitu interoperabilitas data.
15. Pelaksanaan IT Assessment dan Self Assessment serta penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi (Indeks KAMI), serta penyelenggaraan operasional persandian.
16. Peningkatan IT asessment, penetration test (PENTEST), dan implementasi sertifikat elektronik.



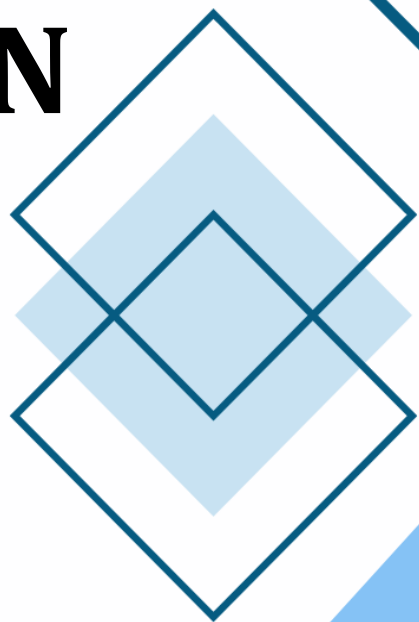
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL,

ARDHI PRASETIYO, S.STP., M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19810925 200012 1 002

LAMPIRAN

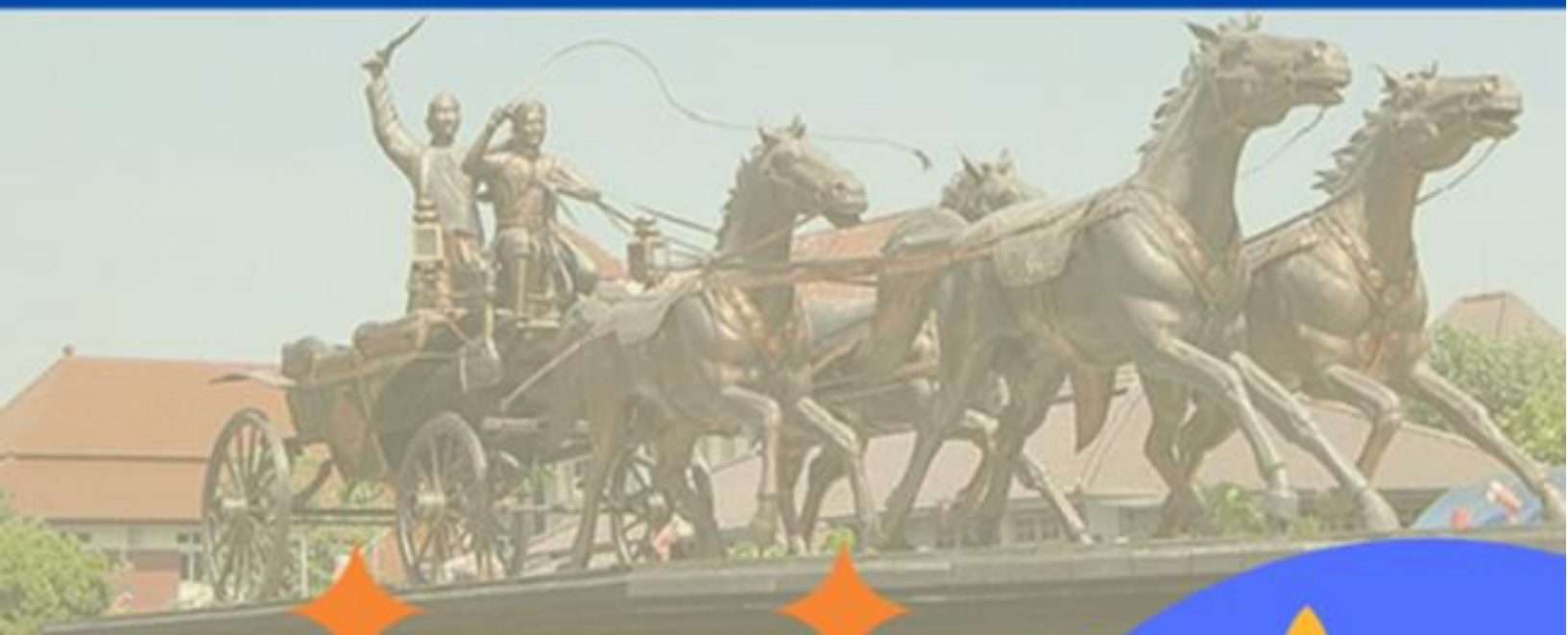




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021 - 2026**



**KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 disusun karena terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengharuskan adanya penyesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan Kepmendagri tersebut. Disamping mengacu Kepmendagri No. 050-5889, penyusunan Perubahan Renstra Diskominfo 2021-2026 ini telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal 2021-2026, Renstra Kemenkominfo RI, Renstra BSSN RI, Renstra BPS RI, dan Perubahan Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Sehingga perumusan program dan kegiatan sudah memperhatikan berbagai kebijakan baik nasional maupun regional.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah di tingkat Kabupaten berupaya untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat mencapai target RPJMD tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Diskominfo ini akan berfungsi menjadi acuan dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kominfo selama lima tahun ke depan.

Kendal, 14 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL



WIWIT ANDARIYONO, S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760402 199703 1 003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....ii

Daftar Isi.....iii

Daftar Tabel.....v

Daftar Gambarvii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 2

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 9

 1.4. Sistematika Penulisan.....10

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO KABUPATEN KENDAL.....12

 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....12

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....33

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 34

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 54

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... 56

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....56

 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....63

 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi..... 74

 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....91

 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis..... 102

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..... 104

 4.1. Visi dan Misi Kabupaten Kendal..... 104

 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....111





BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....117

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan PD117

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....128

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 174

BAB VIII PENUTUP.....189

8.1. Kaidah Pelaksanaan.....189

8.2. Pedoman Transisi..... 190

LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV PERANGKAT DAERAH DINAS KOMINFO KABUPATEN KENDAL

LAMPIRAN 2 CASCADING PERANGKAT DAERAH DINAS KOMINFO KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026

LAMPIRAN 3 POHON KINERJA DAN *CROSSCUTTING*

LAMPIRAN 4 SK BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMINFO KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Kominfo Kab. Kendal..... 33

Tabel 2.2. Daftar Asset Dinas Kominfo Kabupaten Kendal..... 34

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Renstra Dinas Kominfo Kabupaten
Kendal Tahun 2016-2021 Periode Sampai Dengan
Akhir Tahun 2020..... 35

Tabel 2.4. Existing Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang
Statistik, dan Bidang Persandian.....43

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kominfo Kabupaten Kendal.....52

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo
Kabupaten Kendal.....57

Tabel 3.2. Matrik Persandingan Faktor Penghambat dan
Pendukung atas Pencapaian Misi Bupati..... 71

Tabel 3.3. Telaah keterkaitan Renstra Kemenkominfo RI dengan
Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Kendal..... 76

Tabel 3.4. Telaah keterkaitan Renstra BPS RI dengan Renstra
Dinas Kominfo Kabupaten Kendal 81

Tabel 3.5. Telaah Keterkaitan Renstra BSSN RI dengan Renstra
Dinas Kominfo Kabupaten Kendal.....85

Tabel 3.6. Telaah Keterkaitan Renstra Dinas Kominfo Prov. Jawa
Tengah dengan Renstra Dinas Kominfo Kab. Kendal..... 89

Tabel 3.7. Sasaran Strategis Daerah Menurut Pilar Pembangunan
Berkelanjutan yang Menjadi Tugas Dinas Kominfo..... 100

Tabel 3.8. Rekomendasi Program Kegiatan..... 101

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah.....114

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....122

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
serta Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Kominfo
Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026..... 136





Tabel 6.2. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
printout rpjmd-kendal.simda.net.166

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kendal yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....175

Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dinas Kominfo Kab. Kendal.....177

Tabel 7.3. Penetapan Indikator Utama (IKU) Perangkat Daerah
Dinas Kominfo Kabupaten Kendal..... 184





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kominfo Kabupaten Kendal 32

Gambar 2.2 Diagram Rasio Capaian Kinerja Pelayanan Dinas
Kominfo Kabupaten Kendal 40

Gambar 2.3 Existing Tingkat Kematangan SPBE Kab. Kendal..... 48

Gambar 2.4 Existing Infrastruktur TIK Pemerintah Kabupaten
Kendal..... 49

Gambar 2.5 Existing Pelayanan SPBE Pemerintah Kabupaten
Kendal..... 49

Gambar 2.6 Existing Keterbukaan Informasi dan Komunikasi
Publik Pemerintah Kabupaten Kendal..... 50

Gambar 2.7 Existing Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Pemerintah Kabupaten Kendal..... 50

Gambar 2.8 Existing Persandian dan Keamanan Informasi
Pemerintah Kabupaten Kendal..... 51

Gambar 2.9 Diagram Rasio Serapan Anggaran Dinas Kominfo
Kabupaten Kendal..... 53

Gambar 2.10 Diagram Rasio Penerimaan Pendapatan Dinas
Kominfo Kabupaten Kendal..... 53

Gambar 3.1 Peta Existing Jaringan Fiber Optic (FO) Pemerintah
Kabupaten Kendal..... 95

Gambar 3.2 Topografi Existing Jaringan Wireless Antar OPD
di Kabupaten Kendal.....95

Gambar 3.3 Peta Rencana Rute Outside Plant Fiber Optic (FO)
Pemerintah Kabupaten Kendal.....97

Gambar 3.4 Potongan Peta Jalan Nasional di Kabupaten
Kendal.....98

Gambar 4.1 Keterkaitan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati
Kendal dengan Tujuan Renstra Dinas Kominfo
Tahun 2021-2026..... 113

Gambar 5.1 Isu Strategis, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Jangka Menengah Dinas Kominfo Kab. Kendal..... 126



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal untuk kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal agar mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2021-2026, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Kendal, maka dapat dilakukan lagi perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal 2021-2026 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Pada saat Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal masih berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 serta dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Kendal, 14 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL



WIWIT ANDARIYONO, S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760402 199703 1 003



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2029



KABUPATEN KENDAL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renstra ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Kendal,

2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,



ARDHI PRASETIYO, S.STP,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19810925 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	37
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN	44
3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	
Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.....	44
3.2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	
Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.....	44
3.3. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	
Kendal Tahun 2025-2029.....	47
3.4. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika	
Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.....	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
4.1. Uraian Program	64
4.2. Uraian Kegiatan	86
4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator, Target	
dan Pagu Indikatif	87
4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program	
Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah	104
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	
Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja	
Utama (IKU) Perangkat Daerah	111

4.6.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	111
BAB V	PENUTUP	114
5.1.	Kesimpulan Substansial	114
5.2.	Kaidah Pelaksanaan	114
5.3.	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	115
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 Berdasarkan Golongan	27
Tabel 2.3	Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025	27
Tabel 2.4	Tabel Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026	29
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024	34
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	37
Tabel 2.7	Teknik Merumuskan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	42
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	45
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	48
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	50
Tabel 3.4	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	55
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	66
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	91
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	106
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	111
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kendal 25

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati baru, khususnya dalam menurunkan potensi dan kejadian konflik sosial yang ada di Kabupaten Kendal.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh ASN, dukungan pimpinan daerah, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kendal yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Kendal. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2030, serta menjadi dasar dalam penyusunan Manajemen Pengelolaan Risiko dengan melakukan analisis atas resiko penyebab dan dampak pada rencana strategis organisasi dan rencana operasional organisasi.

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memantau capaian kinerja dan

mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, penyesuaian strategi, dan perbaikan berkelanjutan. Laporan capaian kinerja akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,



ARDHI PRASETIYO, S.STP,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19810925 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. SOEKARNO HATTA 193 KENDAL 51352 Telp./FAX (0294) 384353

Email : diskominfo@kendalkab.go.id website : www.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 060/878/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai perkembangan yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama 2021-2026 di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2021-2026 di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/ 09/ M.PAN/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Inikator Kinerja Utama 2021-2026 di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk :
1. perencanaan jangka menengah;
 2. perencanaan tahunan;
 3. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 4. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 5. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dan disampaikan kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 27 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,



WIWIT ANDARIYONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 060/878/2021
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal
2. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Fungsi :
 1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 6. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULA INDIKATOR	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal	1.1 Tingkat Kematangan SPBE (Indeks SPBE)	Indeks SPBE Pemda merupakan Skore Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Daerah Kendal yang didapat dari rata- rata skore tingkat	Bidang Aplikasi Informatika	Laporan Hasil Evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh	Bidang aplikasi informatika

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULA INDIKATOR	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		kematangan domain 1 (Kebijakan Internal SPBE, domain 2 (Tata Kelola SPBE), domain 3 (Manajemen SPBE), dan domain 4 (Layanan SPBE)		Kementerian PAN dan RB RI	
1.2 Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kendal	1.2.1 Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik merupakan rata-rata dari tingkat penilaian indikator 1 (SAQ/ Self Assessment Questionnaire yang terdiri dari : 1. Mengumumkan Informasi Publik, 2. Menyediakan Informasi Publik, 3. Pelayanan Informasi Publik, dan 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik), indikator 2 (Website), indikator 3 (Informasi Berkala), indikator 4 (Informasi Setiap Saat), indikator 5 (DIP dan Informasi Dikecualikan), dan indikator 6 (kelembagaan)	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Laporan Penilaian Pemeriksaan Badan Publik Keterbukaan Informasi Publik pada Kabupaten/ Kota yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULA INDIKATOR	UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.3 Meningkatnya ketersediaan statistik sektoral Pemkab Kendal sesuai dengan prinsip satu data indonesia	1.3.1 Prosentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	(Jumlah perangkat daerah dengan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia / Total Jumlah perangkat daerah) x 100%	Bidang Statistik dan Persandian	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah dengan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia	Bidang Statistik dan Persandian
1.4 Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung SPBE Pemkab Kendal	1.4.1 Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi merupakan rata-rata dari tingkat kelengkapan dan kematangan area 1 (tata kelola KAMI), area 2 (pengelolaan resiko KAMI), area 3 (kerangka kerja KAMI), area 4 (pengelolaan aset informasi), area 5 (teknologi dan KAMI), dan area 6 (suplemen)	Bidang Statistik dan Persandian	Laporan Assesment Indeks KAMI pada Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal yang diterbitkan oleh BSSN RI	Bidang Statistik dan Persandian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,


WIWIT ANDARIYONO



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 060/6/DISKOMINFO

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasara strategis organisasi sesuai perkembangan yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama 2025-2029 di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2025-2029 di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/ 09/ M.PAN/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 79);

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama 2025-2029 di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk :
1. perencanaan jangka menengah;
 2. perencanaan tahunan;
 3. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 4. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 5. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dan disampaikan kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL,



ARDHI PRASETIYO, S.STP., M.M,

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 060/6/DISKOMINFO
TANGGAL : 2 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029

DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal
2. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Fungsi :
 1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 6. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai Indeks Pemerintah Digital	Indeks	Dokumen Hasil Evaluasi Pemerintahan Digital pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB RI	Bidang Aplikasi Informatika

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik suatu badan publik dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik	Indeks	Dokumen Hasil Monev/Penilaian Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Kabupaten/ Kota yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.	Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah keseluruhan Layanan Publik secara online di Instansi Pemerintah Daerah yang sudah maupun belum terintegrasi	%	Dokumen pemetaan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	Bidang Aplikasi Infomatika
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretariat

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
5.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Suatu ukuran yang mengambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	Dokumen hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Bidang Statistik dan Persandian
6.	Meningkatnya kemampuan informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang mengambarkan tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi	Indeks	Laporan Assessment Indeks KAMI yang diterbitkan oleh BSSN RI	Bidang Statistik dan Persandian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,

ARDHI PRASETYO, S.STP., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Soekarno-Hatta 193 Kendal 51313, Telepon (0294) 384353 Faksimili (0294) 384353
Laman www.diskominfo.kendalkab.go.id, Pos-el diskominfo@kendalkab.go.id

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintah Digital	Indeks 2
1.1	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks 96.33
1.2	Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50,20 %
1.3	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks 2,05
1.4	Meningkatnya kemandirian informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Indeks 407
1.5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai 77,65

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL



ARDHI PRASETIYO, S.STP., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19810925 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Soekarno - Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 384353 Fax. (0294) 384353

e-mail : diskominfo@kendalkab.go.id

website : www.kendalkab.go.id

Kendal, 13 Januari 2025

Nomor : 005/68/Diskominfo
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Seluruh Pejabat Struktural pada Diskominfo Kendal
2. Seluruh Sub Koordinator pada Diskominfo Kendal
3. Bendahara dan Bendahara Pembantu pada Diskominfo Kendal
di
KENDAL

Mengharap dengan hormat atas kehadirannya pada kegiatan Rapat Internal dan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), pada :

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025

Waktu : 11.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfo Kendal

Acara : Rapat Internal dan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Bulan Januari 2025

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,



ARDHI PRASETIYO, S.STP,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19810925 200012 1 001

**LAPORAN RAPAT KOORDIANSI PENGENDALIAN INTERNAL
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KENDAL
BULAN JANUARI 2025**

A. DISKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

Rapat Koordinasi Pengendalian Internal Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Bulan Januari 2025 dilaksanakan pada :

- a. Hari/ Tanggal : Senin, 13 Januari 2025
- b. Waktu : Jam. 11.00 – 12.30 WIB
- c. Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfo Kab. Kendal
- d. Pimpinan Rakor : Kepala Dinas Kominfo Kab. Kendal
- e. Peserta Rakor : 1. Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Kendal
2. Kabid IKP, Kabid Aptika dan Kabid SP
3. Kasubbag Umpeg
4. Ketua Tim di lingkungan Dinas Kominfo Kab. Kendal;

B. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN LALU

Adapun serapan anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Kendal sampai dengan akhir Desember 2024 Rp 17.166.885.073 dari total anggaran sebesar Rp 18.570.843.625 (92.44%), Realisasi Fisik sebesar 100 %. Adapun print out laporan SIMPOK terlampir.

C. PERMASALAHAN/ HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIAN

No	Permasalahan	Faktor Penyebab Masalah	Upaya yang dilakukan
1	Beberapa sub kegiatan dan rekening belanja serapannya dibawah 80%	Efisiensi Anggaran	Membuat rekap alasan rekening belanja dengan serapan dibawah 80%
2	Penginputan RKA belum sesuai	Beberapa belanja belum masuk SHS di SIPD ataupun belum tertagging	Merekap usulan SSH, SBU dan tagging SSH di SIPD dan melaporkan ke Aset
3	Beberapa sub kegiatan dan rekening belanja masih belum bisa dilaksanakan	Efisiensi Anggaran	Koordinasi dengan Pimpinan dan PnK terkait pemberlakuan dan pelaksanaan kegiatan
4	administrasi kepegawaian beberapa ASN masih berproses	Berproses secara sistem dan seluruh ASN Kabupaten Kendal	Koordinasi dengan BKPP
5	Studio Radio Swara Kendal perlu perbaikan atau pemeliharaan karena sudah lapuk dan rapuh.	Kondisi fisik sudah tua	Penanganan darurat kebocoran
6	Beberapa spaca baliho perlu perbaikan atau pemeliharaan karena sudah lapuk dan rapuh.	Kondisi Bangunan sudah tua	Ditutup MMT

7	Pelaksanaan Bintek Pengelolaan PPID bagi PPID Pelaksana se Ka. Kendal belum bisa terlaksana	Menunggu Nota Dinas Bupati turun	Menyusun Nota Dinas Bupati
8	Banyak Perangkat yang belum Menyusun dan menginformasikan Daftar Informasi Publik di website masing-masing OPD	Perangkat kurang memahami pentingnya keterbukaan informasi publik	Meningkatkan koordinasi dan menjadwalkan monev
9	Masih ada OPD dalam memberikan jawaban atas aduan aspirasi publik belum dalam bentuk solusi	Penyelesaian berjenjang yang membutuhkan waktu untuk koordinasi internal	Meningkatkan koordinasi dan menjadwalkan monev
10	Kekurangan personal	Adanya mutasi di internal Diskominfo dan pengalihan fungsi personal	Menggunakan personal seadanya dan meminjam dari subkor di bidang yang sama.
11	Adanya Perubahan SPBE	Adanya perubahan nomenklatur dan jadwal Evaluasi SPBE	Belum adanya Sosialisasi terkait SPBE

D. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1	Melaksanakan rakor internal dan POK
2	Penyusunan LKjIP 2024
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4	Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dan RKT 2026
5	Melaksanakan Beberapa sub kegiatan dan rekening belanja rutin
6	Melaksanakan Beberapa sub kegiatan DBHCHT
7	Monev kegiatan Kearsipan
8	Monev penatausahaan BMD
9	Melaksanakan perencanaan publikasi Pemerintah Kabupaten Kendal baik publikasi luar ruang (baliho, spanduk, dan poster), juga publikasi melalui website serta media sosial.
10	Melaksanakan perencanaan podcast atau talkshow OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
11	Pemeliharaan ringan mengatasi kebocoran pada gedung LPPL Radio Swara Kendal
12	Pemantauan space baliho yang sudah rapuh
13	Melaksanakan Rapat Koordinasi pelaksanaan evaluasi dan laporan bulanan monitoring aspirasi pelayanan publik.
14	Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Bintek dan Rakor bagi PPID Pelaksana se Kabupaten Kendal
15	Mempersiapkan kegiatan Bintek dan Rakor bagi PPID Desa se Kabupaten Kendal
16	Rapat Koordinasi terkait rencana realisasi anggaran dan kegiatan Bulan Januari
17	Fasilitasi peliputan, dokumentasi serta publikasi media kegiatan-kegiatan Pimpinan Daerah serta Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Kendal
18	Pembuatan video profil untuk gelar hasil pembangunan Pemkab Kendal tahun 2024
19	Koordinasi kerjasama publikasi dengan media
20	Pembahasan Index SPBE Kabupaten Kendal

21	Koordinasi dengan BRIN Terkait audit SPBE
22	Mengikuti sosialisasi perubahan Komdigi
23	Soialisasi Smart city
24	Pembahasan Rencana Giat Sosialisasi

E. KEGIATAN DENGAN CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN $\leq 5\%$

Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

Capaian : 0

Penyebab : Kesalahan input rekening di perubahan

Tindak lanjut : Melakukan koordinasi ke BPKAD

Kegiatan di efisiensi/ tidak dilaksanakan

F. PENUTUP

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal untuk bulan Desember 2024 sudah sesuai dengan rencana, baik secara fisik kegiatan maupun serapan anggarannya, dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara internal melalui koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan.

G. DOKUMENTASI



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,



ARDHI PRASETIYO, S.STP,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19810925 200012 1 001

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025				
No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.570.843.625	17.166.885.073	92,44%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.769.549.625	8.123.248.863	92,63%
a	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.080.000	37.158.500	70,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.190.000	26.853.700	72,21%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.120.000	7.796.800	64,33%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.770.000	2.508.000	66,53%
b	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.167.146.719	4.996.493.962	96,70%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.149.701.719	4.989.652.162	96,89%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.725.000	4.493.000	66,81%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.725.000	2.348.800	34,93%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.995.000	-	0,00%
c	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	347.802.546	317.874.600	91,40%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	347.802.546	317.874.600	91,40%
d	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.493.641.400	1.265.868.637	84,75%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	8.144.000	54,29%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.415.000	98.599.000	97,22%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	18.683.700	93,42%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.150.000	7.673.920	54,23%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.662.000	20.848.000	55,36%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.305.414.400	1.111.920.017	85,18%
e	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	462.627.200	457.455.000	98,88%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	447.627.200	442.555.000	98,87%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	14.900.000	99,33%

f	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.410.000	412.592.245	72,21%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.960.000	26.121.109	26,13%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.450.000	386.471.136	81,97%
g	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.841.760	635.805.919	94,36%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.875.000	140.145.650	88,21%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.866.760	105.944.550	95,56%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	377.700.000	366.690.719	97,09%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.400.000	23.025.000	87,22%
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.005.780.000	3.741.838.763	93,41%
a	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.005.780.000	3.741.838.763	93,41%
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	261.860.000	248.784.000	95,01%
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	45.800.000	44.999.000	98,25%
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	142.300.000	138.974.647	97,66%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	843.189.000	821.081.958	97,38%
	Pelayanan Informasi Publik	411.868.000	407.266.000	98,88%
	Layanan Hubungan Media	1.900.000.000	1.732.946.318	91,21%
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	99.960.000	93.036.000	93,07%
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	15.225.000	13.114.900	86,14%
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	285.578.000	241.635.940	84,61%
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKAS INFORMATIKA	4.666.634.000	4.259.782.022	91,28%
a	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.520.727.000	1.260.790.286	82,91%
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.967.000	48.319.209	98,68%

		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.471.760.000	1.212.471.077	82,38%
b		Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.145.907.000	2.998.991.736	95,33%
		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	128.479.500	118.199.500	92,00%
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	200.000.000	199.217.350	99,61%
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2.082.427.500	2.070.274.686	99,42%
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	525.200.000	419.294.760	79,84%
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	20.190.000	13.366.440	66,20%
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	189.610.000	178.639.000	94,21%
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	358.530.000	347.471.705	96,92%
a		Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	358.530.000	347.471.705	96,92%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	326.490.000	319.432.503	97,84%
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	32.040.000	28.039.202	87,51%
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	770.350.000	694.543.720	90,16%
a		Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	611.000.000	581.393.220	95,15%
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	611.000.000	581.393.220	95,15%
b		Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	159.350.000	113.150.500	71,01%
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	159.350.000	113.150.500	71,01%

SPJ Fungsional Dinas Kominfo Desember 2024

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD Kabupaten Kendal
TAHUN ANGGARAN 2024
OPD : 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kondisi sampai dengan : 31 Desember 2024

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni			Perubahan		
			Pagu	Realisasi Keuangan		Pagu	Realisasi Keuangan	
				Rp.	%		Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.943.490.679	108.621.355.704	545	114,12	18.570.843.625	108.621.355.704
2	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.483.255.079	56.393.463.224	595	124,37	8.769.549.625	56.393.463.224
3	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.750.000	246.924.800	302	162,56	53.080.000	246.924.800
4	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.250.000	214.829.600	389	154,16	37.190.000	214.829.600
5	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.450.000	52.781.600	559	100	9.450.000	52.781.600
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.900.000	108.000.000	339	165,28	19.300.000	108.000.000
7	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	250.000	2.000.000	800	100	250.000	2.000.000
8	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.650.000	52.048.000	381	166,67	8.190.000	52.048.000
9	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	13.351.200	67	178,8	12.120.000	13.351.200
10	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.240.000	13.351.200	315	100	4.240.000	13.351.200
11	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.800.000	-	-	200	4.900.000	-
12	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	500.000	-	-	200	250.000	-
13	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.460.000	-	-	200	2.730.000	-
14	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	18.744.000	288	184	3.770.000	18.744.000
15	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.040.000	5.520.000	531	100	1.040.000	5.520.000
16	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.460.000	13.224.000	242	200	2.730.000	13.224.000
17	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.969.876.719	37.016.295.440	620	133,54	5.167.146.719	37.016.295.440
18	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.949.701.719	36.995.337.840	622	133,76	5.149.701.719	36.995.337.840
19	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.778.000.000	11.989.236.800	674	108,83	1.633.716.701	11.989.236.800
20	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	780.060.000	3.793.062.400	486	141,86	549.879.040	3.793.062.400
21	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	252.000.000	1.189.984.560	472	131,04	192.307.672	1.189.984.560
22	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	104.000.000	200.929.792	193	334,93	31.051.652	200.929.792
23	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	98.000.000	712.840.000	727	97,01	101.023.627	712.840.000

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni			Perubahan		
			Pagu	Realisasi Keuangan		Pagu	Realisasi Keuangan	
				Rp.	%		Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	113.500.000	533.760.000	470	148,11	76.632.000	533.760.000
25	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	65.800.000	307.240.000	467	152,33	43.194.996	307.240.000
26	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	49.000.000	219.040.000	447	156,73	31.264.000	219.040.000
27	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	112.000.000	661.629.120	591	123,62	90.596.844	661.629.120
28	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	70.000.000	166.855.680	238	273,47	25.596.636	166.855.680
29	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	110.700.000	837.215.632	756	93,29	118.663.794	837.215.632
30	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	78.319	207.568	265	63,37	123.584	207.568
31	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	23.800	73.520	309	64,56	36.864	73.520
32	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	137.000.000	894.982.056	653	105,73	129.569.681	894.982.056
33	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	42.000.000	148.195.576	353	185,03	22.698.624	148.195.576
34	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.600.000	24.380.184	435	137,56	4.071.060	24.380.184
35	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.100.000	8.058.072	384	119,27	1.760.700	8.058.072
36	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.400.000	73.140.912	475	151,2	10.185.204	73.140.912
37	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.600.000	24.173.168	432	156,51	3.578.052	24.173.168
38	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	68.529.600	-	-	985,75	6.952.044	-
39	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	16.800.000	-	-	-	3.152.340	-
40	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.809.990.000	12.380.252.800	684	107,42	1.685.006.604	12.380.252.800
41	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	285.600.000	2.775.040.000	972	75,36	378.960.000	2.775.040.000
42	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	48.960.000	600	100	8.160.000	48.960.000
43	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	19.760.000	6.080.000	31	1.300	1.520.000	6.080.000
44	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.725.000	19.940.000	297	100	6.725.000	19.940.000
45	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.995.000	19.940.000	499	100	3.995.000	19.940.000
46	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.730.000	-	-	100	2.730.000	-
47	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.725.000	1.017.600	15	100	6.725.000	1.017.600
48	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.995.000	1.017.600	25	100	3.995.000	1.017.600
49	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.730.000	-	-	100	2.730.000	-
50	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.725.000	-	-	-	3.995.000	-
51	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.995.000	-	-	-	3.995.000	-

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni			Perubahan				
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.730.000	-	-	-	-	-	-	-
53	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
54	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
55	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-
56	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-
57	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
58	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	775.904.000	310	139,56	347.802.546	775.904.000	223	53,08
59	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	775.904.000	310	139,56	347.802.546	775.904.000	223	53,08
60	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	875.000	-	-	-	-	-	-	-
61	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.155.000	40.096.000	1.271	56,72	5.562.546	40.096.000	721	56,72
62	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.000	4.000.000	2.000	40	500.000	4.000.000	800	40
63	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.710.000	-	-	-	-	-	-	-
64	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaiain Olahraga	30.000.000	150.408.000	501	142,86	21.000.000	150.408.000	716	142,86
65	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48.600.000	108.000.000	222	84,73	39.300.000	108.000.000	275	84,73
66	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000	-	-	-	-	-	-	-
67	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	-	195.000.000	-	-	-
68	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	88.200.000	158.400.000	180	115,38	37.440.000	158.400.000	423	115,38
69	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.260.000	26.960.000	95	381,89	7.400.000	26.960.000	364	381,89
70	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000	-	-	160	5.000.000	-	-	160
71	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38.500.000	288.040.000	748	105,19	36.600.000	288.040.000	787	105,19
72	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.646.549.000	8.794.851.328	534	110,71	1.493.641.400	8.794.851.328	589	109,77
73	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	65.152.000	434	100	15.000.000	65.152.000	434	100
74	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.589.000	-	-	100	6.589.000	-	-	100
75	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.411.000	65.152.000	775	100	8.411.000	65.152.000	775	100
76	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.415.000	656.496.000	647	100	101.415.000	656.496.000	647	100
77	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.805.000	198.048.000	664	100	29.805.000	198.048.000	664	100
78	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70.330.000	451.280.000	642	100	70.330.000	451.280.000	642	100
79	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.280.000	7.168.000	560	100	1.280.000	7.168.000	560	100

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan				
			Pagu		Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
			Rp.	%	Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	121.921.600	610	100	20.000.000	121.921.600	610	100	
81	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.600.000	113.160.000	643	100	17.600.000	113.160.000	643	100	
82	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.400.000	8.761.600	365	100	2.400.000	8.761.600	365	100	
83	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.100.000	44.573.200	731	45,57	14.150.000	44.573.200	315	43,11	
84	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.950.000	8.160.000	418	62,5	3.120.000	8.160.000	262	62,5	
85	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.150.000	36.413.200	877	37,62	11.030.000	36.413.200	330	37,62	
86	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.662.000	122.600.000	326	100	37.662.000	122.600.000	326	100	
87	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.662.000	106.600.000	326	100	32.662.000	106.600.000	326	100	
88	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000	16.000.000	320	100	5.000.000	16.000.000	320	100	
89	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.459.322.000	7.784.108.528	533	112,8	1.305.414.400	7.784.108.528	596	111,79	
90	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.000.000	219.306.016	430	100	51.000.000	219.306.016	430	100	
91	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	462.828.000	2.142.352.000	463	109,67	422.018.000	2.142.352.000	508	109,67	
92	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.900.000	27.400.000	172	100	15.900.000	27.400.000	172	100	
93	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	754.294.000	4.424.650.512	587	120,94	623.696.400	4.424.650.512	709	120,94	
94	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	175.300.000	970.400.000	554	90,92	192.800.000	970.400.000	503	90,92	
95	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.050.000	-	-	-	-	-	-	-	
96	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	
97	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	200.000	-	-	-	-	-	-	-	
98	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
100	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.627.200	2.872.656.000	653	98,99	462.627.200	2.872.656.000	621	95,03	
101	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	424.627.200	2.753.456.000	648	98,95	447.627.200	2.753.456.000	615	94,86	
102	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	77.000	-	-	-	
103	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	127.200	-	-	100	127.200	-	-	100	
104	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	-	-	-	-	923.000	-	-	-	
106	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	
107	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	32.100.000	-	-	100	32.100.000	-	-	100	

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan					
			Pagu		Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu		Realisasi Keuangan		Fisik
			Rp.	%	Rp.	%		Rp.	%	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
108	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	8.000.000	-	-	44,44	18.000.000	-	-	44,44		
109	5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	33.000.000	-	-	100	33.000.000	-	-	100		
110	5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.000.000	-	-	100	3.000.000	-	-	100		
111	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	301.000.000	2.384.800.000	792	100	301.000.000	2.384.800.000	792	100		
112	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	44.400.000	348.656.000	785	100	44.400.000	348.656.000	785	100		
113	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000	20.000.000	667	100	3.000.000	20.000.000	667	100		
114	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	119.200.000	795	100	15.000.000	119.200.000	795	100		
115	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Kantor	5.000.000	40.000.000	800	100	5.000.000	40.000.000	800	100		
116	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.000.000	79.200.000	792	100	10.000.000	79.200.000	792	100		
117	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.960.000	2.813.111.504	477	115,26	571.410.000	2.813.111.504	492	103,25		
118	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.960.000	192.505.888	193	100	99.960.000	192.505.888	193	100		
119	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.000	-	-	100	76.000	-	-	100		
120	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	21.525.000	15.897.072	74	100	21.525.000	15.897.072	74	100		
121	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	13.559.000	28.312.896	209	100	13.559.000	28.312.896	209	100		
122	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	64.800.000	148.295.920	229	100	64.800.000	148.295.920	229	100		
123	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.000.000	2.620.605.616	535	118,37	471.450.000	2.620.605.616	556	103,94		
124	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	57.860.000	420.800.000	727	91,67	63.120.000	420.800.000	667	91,67		
125	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	63.120.000	420.800.000	667	100	63.120.000	420.800.000	667	100		
126	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	94.920.000	615.814.224	649	100	94.920.000	615.814.224	649	100		
127	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	31.560.000	63.120.000	200	400	7.890.000	63.120.000	800	400		
128	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	820.000	3.011.040	367	109,33	750.000	3.011.040	401	109,33		
129	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	820.000	3.763.680	459	109,33	750.000	3.763.680	502	109,33		
130	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	240.900.000	1.093.296.672	454	100	240.900.000	1.093.296.672	454	100		
131	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.492.160	3.873.720.152	766	79,6	673.841.760	3.873.720.152	575	75,02		
132	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.375.000	1.066.269.200	673	99,69	158.875.000	1.066.269.200	671	99,69		
133	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.565.000	2.400.000	43	96,53	5.765.000	2.400.000	42	96,53		
134	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.010.000	52.496.000	291	98,36	18.310.000	52.496.000	287	98,36		

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni			Perubahan		
			Pagu	Realisasi Keuangan		Pagu	Realisasi Keuangan	
				Rp.	%		Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	124.000.000	935.508.000	754	100	124.000.000	935.508.000
136	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.800.000	75.865.200	702	100	10.800.000	75.865.200
137	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.017.160	847.556.400	892	87,17	110.866.760	847.556.400
138	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	287.160	-	-	54,51	526.760	-
139	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.000.000	64.800.000	720	73,77	12.200.000	64.800.000
140	5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.150.000	79.076.400	779	100	10.150.000	79.076.400
141	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	44.530.000	455.520.000	1.023	78,21	56.940.000	455.520.000
142	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	31.050.000	248.160.000	799	100	31.050.000	248.160.000
143	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.700.000	1.775.694.552	780	60,29	377.700.000	1.775.694.552
144	5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	227.700.000	1.775.694.552	780	60,29	377.700.000	1.775.694.552
145	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000	184.200.000	755	99,87	26.400.000	184.200.000
146	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	1.965.000	-
147	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000	-	-	91,95	435.000	-
148	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.000.000	184.200.000	768	100	24.000.000	184.200.000
149	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.104.942.000	25.191.420.104	614	100,6	4.005.780.000	25.191.420.104
150	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.104.942.000	25.191.420.104	614	100,6	4.005.780.000	25.191.420.104
151	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	311.860.000	1.204.192.000	386	118,05	261.860.000	1.204.192.000
152	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000	7.120.000	593	99	1.200.000	7.120.000
153	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.700.000	12.672.000	745	99	1.700.000	12.672.000
154	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	560.000	2.400.000	429	99	560.000	2.400.000
155	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-
156	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000	-	-	99	8.400.000	-
157	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	300.000.000	1.182.000.000	394	118,8	250.000.000	1.182.000.000
158	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-
159	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	45.800.000	359.992.000	786	100	45.800.000	359.992.000
160	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	676.000	4.600.000	680	100	676.000	4.600.000

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni			Perubahan				
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.424.000	11.392.000	800	100	1.424.000	11.392.000	800	100
162	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700.000	-	-	100	700.000	-	-	100
163	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000	24.000.000	800	100	3.000.000	24.000.000	800	100
164	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	40.000.000	320.000.000	800	100	40.000.000	320.000.000	800	100
165	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	131.700.000	1.011.951.768	768	92,63	142.300.000	1.011.951.768	711	92,55
166	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.000.000	80.446.040	536	100	15.000.000	80.446.040	536	100
167	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000	777.600	778	100	100.000	777.600	778	100
168	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	115.720.000	925.760.000	800	91,67	126.240.000	925.760.000	733	91,67
169	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	440.000	2.208.096	502	91,67	480.000	2.208.096	460	91,67
170	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	440.000	2.760.032	627	91,67	480.000	2.760.032	575	91,67
171	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	835.339.000	5.985.849.632	717	84,81	843.189.000	5.985.849.632	710	85,02
172	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.595.000	52.800.000	944	84,2	6.645.000	52.800.000	795	84,2
173	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	470.632.000	3.746.890.000	796	90,58	519.582.000	3.746.890.000	721	90,58
174	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.640.000	10.400.000	634	100	1.640.000	10.400.000	634	100
175	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.000.000	112.000.000	800	100	14.000.000	112.000.000	800	100
176	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	83.000.000	355.200.000	428	21,43	70.000.000	355.200.000	507	21,43
177	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	202.510.000	1.283.440.000	634	116,67	173.580.000	1.283.440.000	739	116,67
178	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000	159.200.000	796	-	20.000.000	159.200.000	796	-
179	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.916.000	43.384.000	733	100	5.916.000	43.384.000	733	100
180	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000	11.600.000	232	-	5.000.000	11.600.000	232	-
181	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	770.000	3.061.224	398	116,67	660.000	3.061.224	464	116,67
182	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	770.000	3.826.408	497	116,67	660.000	3.826.408	580	116,67
183	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.306.000	26.448.000	800	-	3.306.000	26.448.000	800	-
184	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.000.000	144.000.000	800	-	18.000.000	144.000.000	800	-
185	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.200.000	33.600.000	800	-	4.200.000	33.600.000	800	-
186	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	474.268.000	2.783.408.000	587	132,34	411.868.000	2.783.408.000	676	104,81
187	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.500.000	109.200.000	1.040	56,62	18.360.000	109.200.000	595	56,62

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.448.000	173.488.000	773	102,14	21.758.000	173.488.000	797	102,14
189	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.550.000	13.200.000	372	96,29	3.650.000	13.200.000	362	96,29
190	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	-	-	-	-	-
191	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-
192	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	191.650.000	1.263.200.000	659	99	191.650.000	1.263.200.000	659	99
193	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	57.860.000	126.240.000	218	363	15.780.000	126.240.000	800	363
194	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	85.000.000	320.000.000	376	153	55.000.000	320.000.000	582	153
195	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	220.000	-	-	363	60.000	-	-	363
196	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	220.000	-	-	363	60.000	-	-	363
197	5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	38.220.000	-	-	-	-	-	-	-
198	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	262.080.000	-	-	40.950.000	262.080.000	640	-
199	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
200	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64.600.000	516.000.000	799	99	64.600.000	516.000.000	799	99
201	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	1.900.000.000	11.741.277.744	618	100	1.900.000.000	11.741.277.744	618	100
202	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.400.000	89.169.744	619	100	14.400.000	89.169.744	619	100
203	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.750.000	11.952.800	435	100	2.750.000	11.952.800	435	100
204	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.250.000	17.808.000	791	100	2.250.000	17.808.000	791	100
205	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	180.000.000	1.429.147.200	794	100	180.000.000	1.429.147.200	794	100
206	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.697.000.000	10.174.800.000	600	100	1.697.000.000	10.174.800.000	600	100
207	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000	18.400.000	511	100	3.600.000	18.400.000	511	100
208	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	105.172.000	696.608.000	662	95,04	99.960.000	696.608.000	697	100
209	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.380.000	9.280.000	672	100	1.380.000	9.280.000	672	100
210	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.044.000	15.840.000	262	100	6.044.000	15.840.000	262	100
211	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	330.000	2.640.000	800	100	330.000	2.640.000	800	100
212	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	16.000.000	128.000.000	800	100	16.000.000	128.000.000	800	100
213	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.900.000	223.200.000	722	100	30.900.000	223.200.000	722	100
214	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.000.000	83.200.000	693	100	12.000.000	83.200.000	693	100

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemoetretan	8.000.000	64.000.000	800	100	8.000.000	64.000.000	800	100
216	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.212.000	-	-	-	-	-	-	-
217	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.306.000	26.448.000	800	100	3.306.000	26.448.000	800	100
218	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.000.000	144.000.000	655	100	22.000.000	144.000.000	655	100
219	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	15.225.000	104.919.200	689	100	15.225.000	104.919.200	689	100
220	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	272.000	895.200	329	100	272.000	895.200	329	100
221	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.300.000	90.800.000	683	100	13.300.000	90.800.000	683	100
222	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.653.000	13.224.000	800	100	1.653.000	13.224.000	800	100
223	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	285.578.000	1.303.221.760	456	84,94	285.578.000	1.303.221.760	456	84,94
224	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.160.000	15.200.000	704	100	2.160.000	15.200.000	704	100
225	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.398.000	3.600.000	258	100	1.398.000	3.600.000	258	100
226	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.020.000	4.000.000	392	100	1.020.000	4.000.000	392	100
227	5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	90.000.000	364.700.000	405	53,33	90.000.000	364.700.000	405	53,33
228	5.1.02.03.02.0143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	40.000.000	320.000.000	800	100	40.000.000	320.000.000	800	100
229	5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	151.000.000	595.721.760	395	99,34	151.000.000	595.721.760	395	99,34
230	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.261.863.600	24.128.634.616	459	99,18	4.666.634.000	24.128.634.616	517	96,55
231	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.886.961.600	6.082.770.320	322	75,26	1.520.727.000	6.082.770.320	400	76,75
232	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.072.000	361.640.760	516	143,89	48.967.000	361.640.760	739	142,7
233	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.210.000	8.880.000	734	100	1.210.000	8.880.000	734	100
234	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.232.000	8.256.000	670	83,77	1.232.000	8.256.000	670	83,77
235	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000	7.200.000	554	100	1.300.000	7.200.000	554	100
236	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	66.000.000	336.000.000	509	146,67	45.000.000	336.000.000	747	146,67
237	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	154.000	552.024	358	146,67	105.000	552.024	526	146,67
238	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	176.000	752.736	428	146,67	120.000	752.736	627	146,67
239	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.816.889.600	5.721.129.560	315	72,61	1.471.760.000	5.721.129.560	389	74,56

No.	Kode	Urii OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni			Perubahan		
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	
				Rp.	%		Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.130.000	129.440.000	643	68,89	22.500.000	129.440.000
241	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.799.600	18.240.000	1.014	78,93	2.280.000	18.240.000
242	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000	16.000.000	800	100	2.000.000	16.000.000
243	5.1.02.01.04.0137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	220.000.000	26.211.096	12	2	220.000.000	26.211.096
244	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	111.100.000	684.000.000	616	120,24	92.400.000	684.000.000
245	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	330.000	1.104.048	335	122,22	270.000	1.104.048
246	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	330.000	1.380.016	418	122,22	270.000	1.380.016
247	5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	30.000.000	-	-	2	30.000.000	-
248	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	431.200.000	3.836.720.000	890	82,92	520.040.000	3.836.720.000
249	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	570.000.000	776.000.000	136	65,79	152.000.000	776.000.000
250	5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	430.000.000	232.034.400	54	100	430.000.000	232.034.400
251	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.374.902.000	18.045.864.296	535	112,56	3.145.907.000	18.045.864.296
252	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	179.819.500	945.596.000	526	225,62	128.479.500	945.596.000
253	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	787.500	6.300.000	800	100	787.500	6.300.000
254	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	192.000	-	-	100	192.000	-
255	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000	3.200.000	800	100	400.000	3.200.000
256	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000	24.000.000	200	100	12.000.000	24.000.000
257	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	66.000.000	120.000.000	182	440	15.000.000	120.000.000
258	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	220.000	-	-	440	50.000	-
259	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	220.000	-	-	440	50.000	-
260	5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000	792.096.000	792	100	100.000.000	792.096.000
261	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	200.000.000	1.593.738.800	797	100	200.000.000	1.593.738.800
262	5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	12.000.000	92.218.800	768	100	12.000.000	92.218.800
263	5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	188.000.000	1.501.520.000	799	100	188.000.000	1.501.520.000
264	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2.225.827.500	12.648.622.352	568	106,85	2.082.427.500	12.648.622.352
265	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000	24.000.000	800	100	3.000.000	24.000.000
266	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.600.000	4.800.000	73	80	8.250.000	4.800.000

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.427.500	13.416.000	940	85,1	1.677.500	13.416.000	800	85,1
268	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-
269	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	33.000.000	206.000.000	624	88	37.500.000	206.000.000	549	88
270	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	40.000.000	308.080.944	770	100	40.000.000	308.080.944	770	100
271	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.140.400.000	12.092.325.408	565	107,45	1.992.000.000	12.092.325.408	607	107,45
272	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	559.455.000	1.323.035.144	236	108,09	525.200.000	1.323.035.144	252	99,86
273	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.150.000	-	-	100	3.150.000	-	-	100
274	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.320.000	40.649.608	941	84,96	5.085.000	40.649.608	799	84,96
275	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.040.000	17.520.000	859	83,61	2.440.000	17.520.000	718	83,61
276	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.900.000	7.200.000	248	100	2.900.000	7.200.000	248	100
277	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	122.650.000	411.600.000	336	161,53	55.500.000	411.600.000	742	161,53
278	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	211.900.000	844.886.232	399	86,88	243.900.000	844.886.232	346	86,88
279	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-
280	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	231.000	552.024	239	220	105.000	552.024	526	220
281	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	264.000	627.280	238	220	120.000	627.280	523	220
282	5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	210.000.000	-	-	100	210.000.000	-	-	100
283	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	20.190.000	105.760.000	524	100	20.190.000	105.760.000	524	100
284	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.350.000	8.720.000	646	100	1.350.000	8.720.000	646	100
285	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.000	-	-	100	110.000	-	-	100
286	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.000.000	75.200.000	470	100	16.000.000	75.200.000	470	100
287	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.730.000	21.840.000	800	100	2.730.000	21.840.000	800	100
288	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	189.610.000	1.429.112.000	754	100	189.610.000	1.429.112.000	754	100
289	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.640.000	13.352.000	506	100	2.640.000	13.352.000	506	100
290	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	126.400.000	931.200.000	737	100	126.400.000	931.200.000	737	100
291	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	24.570.000	196.560.000	800	100	24.570.000	196.560.000	800	100
292	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.000.000	288.000.000	800	100	36.000.000	288.000.000	800	100
293	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	318.530.000	-	-	311,18	358.530.000	-	-	88,84

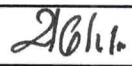
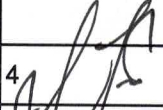
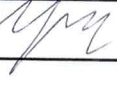
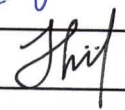
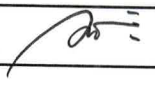
No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni			Perubahan		
			Pagu	Realisasi Keuangan		Pagu	Realisasi Keuangan	
				Rp.	%		Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
294	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	318.530.000	-	-	311,18	358.530.000	-
295	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	286.490.000	-	-	334,8	326.490.000	-
296	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.231.250	-	-	154,55	1.443.750	-
297	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.728.750	-	-	68,7	2.516.250	-
298	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.520.000	-	-	100	21.520.000	-
299	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000	-	-	100	350.000	-
300	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.200.000	-	-	100	36.200.000	-
301	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	-	-	-	200.000.000	-
302	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.460.000	-	-	100	5.460.000	-
303	5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	210.000.000	-	-	420	50.000.000	-
304	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.000.000	-	-	100	9.000.000	-
305	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	32.040.000	-	-	100	32.040.000	-
306	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.350.000	-	-	100	1.350.000	-
307	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.790.000	-	-	100	1.790.000	-
308	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.300.000	-	-	100	24.300.000	-
309	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	600.000	-	-	100	600.000	-
310	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000	-	-	100	4.000.000	-
311	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	774.900.000	2.907.837.760	375	80,69	770.350.000	2.907.837.760
312	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	601.550.000	2.723.833.760	453	72,54	611.000.000	2.723.833.760
313	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	601.550.000	2.723.833.760	453	72,54	611.000.000	2.723.833.760
314	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.275.000	-	-	100	1.275.000	-
315	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.035.000	4.720.000	456	109,52	945.000	4.720.000
316	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.970.000	3.600.000	183	171,3	1.150.000	3.600.000
317	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	90.000	400.000	444	180	50.000	400.000
318	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	111.700.000	494.800.000	443	121,68	91.800.000	494.800.000
319	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	60.000.000	-	-	60	100.000.000	-

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Murni				Perubahan			
			Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%		Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.030.000	35.200.000	117	183,33	16.380.000	35.200.000	215	183,33
321	5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	60.000.000	476.412.000	794	100	60.000.000	476.412.000	794	100
322	5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	210.750.000	1.636.701.760	777	63,79	330.400.000	1.636.701.760	495	63,79
323	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.000.000	72.000.000	800	100	9.000.000	72.000.000	800	100
324	5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	100.900.000	-	-	-	-	-	-	-
325	5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	14.800.000	-	-	-	-	-	-	-
326	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	173.350.000	184.004.000	106	108,97	159.350.000	184.004.000	115	108,78
327	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	173.350.000	184.004.000	106	108,97	159.350.000	184.004.000	115	108,78
328	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	525.000	-	-	100	525.000	-	-	100
329	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000	5.600.000	467	100	1.200.000	5.600.000	467	100
330	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	352.000	1.452.000	413	100	352.000	1.452.000	413	100
331	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.088.000	10.560.000	506	100	2.088.000	10.560.000	506	100
332	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000	400.000	800	100	50.000	400.000	800	100
333	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.080.000	40.232.000	792	100	5.080.000	40.232.000	792	100
334	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.730.000	13.840.000	800	100	1.730.000	13.840.000	800	100
335	5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	8.800.000	-	-	100	8.800.000	-	-	100
336	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	14.000.000	111.920.000	799	100	14.000.000	111.920.000	799	100
337	5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	139.525.000	-	-	111,15	125.525.000	-	-	111,15
		TOTAL	19.943.490.679	108.621.355.704	545	114,12	18.570.843.625	108.621.355.704	585	101,04

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Rapat Internal dan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	EKO Istanto	KPKid IKP	1	
2	AROH	KADIS	2	
3	Agung.	Katim mm	3	
4	Ulf. A	Shutper	4	
5	Khusnul K. daryat	Subko Smd. KI	5	
6	Heri Aryanto	Kabrd. Aptika	6	
7	M. Koduwin	Staf	7	
8	Muhammad H.	Statper	8	
9	Ida Sulistyaningsih	Subko Pnk	9	
10	Nur Siki	Subko Smd. Pnsdr	10	
11	Yoga Pamungkas	Katim PAK	11	
12	Ragun H	Sekretaris	12	
13	Heri Intoke	Katim PDK	13	
14	Heru Dumatmoko	Staf	14	
15	Maris W	Staf	15	
16	Sri Wahyuni	Subkor Infra	16	
17	Dewi N.	Katim PPIP	17	
18			18	
19			19	
20			20	

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KAB. KENDAL


ARDHI PRASETIYO, S.STP.MM.
NIP. 19810925 200012 1 001

KETUA TIM
PERENCANAAN DAN KEUANGAN


IDA SULISTYANINGSIH, S.Si
NIP. 19880802 201903 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp./Fax. (0294) 384353
Laman diskominfo.kendalkab.go.id Pos-el diskominfo@kendalkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Lewat : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Dari : Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan
Tanggal : 6 Januari 2026

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan laporan pelaksanaan Desk Evaluasi Renja PD dan RPJMD Kab Kendal s.d TW IV Tahun 2025, sebagai berikut :

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Kepala Baperlibang Nomor 000.7.5/2/BAPERLITBANG tanggal 5 Januari 2026 perihal Undangan Desk Evaluasi Renja PD dan RPJMD Kab Kendal s.d TW IV Tahun 2025
2. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Nomor 000.7.5/19/DISKOMINFO tanggal 5 Januari 2026 perihal Undangan Desk Evaluasi Renja PD dan RPJMD Kab Kendal s.d TW IV Tahun 2025

II. TUJUAN PELAKSANAAN

1. Menilai ketercapaian indikator kinerja Renja PD terhadap target tahunan
2. Menilai kontribusi Renja PD terhadap pencapaian sasaran RPJMD
3. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan
4. Merumuskan rencana tindak lanjut

III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Desk Evaluasi Renja PD dan RPJMD Kab Kendal s.d TW IV Tahun 2025 dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Januari 2026
Pukul : 07.30 – 10.00
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kabupaten Kendal

IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum, hasil Desk Evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Renja PD.

Ringkasan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021-2026
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025**

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	2024		2025 (s.d TW IV)			
				Target	Realisasi Capaian	Target	Realisasi	%	Status Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi									
1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks domain kebijakan internal SPBE merupakan tingkat kematangan aspek 1 (Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE)PermenPANRB 59 th 2020	Skor	3,40	4,40	3,40	3,40	100,00	Sangat Tinggi
2.	Indeks Domain Tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 2 (Perencanaan Strategis SPBE), aspek 3 (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan aspek 4 (Penyelenggara SPBE) PermenPANRB 59 th 2020	Skor	3,50	2,80	3,80	3,80	100,00	Sangat Tinggi
3.	Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks domain manajemen SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 5 (Penerapan Manajemen SPBE), dan aspek 6 (Pelaksanaan Audit TIK) PermenPANRB 59 th 2020	Skor	3,00	2,36	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi
4.	Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks domain layanan SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 7 (Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan aspek 8 (Layanan Publik Berbasis Elektronik) PermenPANRB 59 th 2020	Skor	4,26	4,38	4,44	4,44	100,00	Sangat Tinggi

5.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik merupakan rata-rata dari tingkat penilaian tahap 1 (informasi wajib berkala/ website), tahap 2 (SAQ/ Kuesioner Penilaian Mandiri yang terdiri dari : 1. Mengumumkan Informasi Publik, 2. Menyediakan Informasi Publik, 3. Pelayanan Informasi Publik, dan 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik), tahap 3 (verifikasi atas SAQ), tahap 4 (Uji publik penetapan peringkat) Per Komisi Informasi 5 th 2016	Skor	90,00	96,32	90,50	97,28	107,49	Sangat Tinggi
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
1.	Prosentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	Jumlah perangkat daerah dengan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia / jumlah perangkat daerah x 100%	Prosen	40	91,23	50	91,23	182,46	Sangat Tinggi
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
2.	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi merupakan rata-rata dari tingkat kelengkapan dan kematangan area 1 (tata kelola KAMI), area 2 (pengelolaan resiko KAMI), area 3 (kerangka kerja KAMI), area 4 (pengelolaan aset informasi), area 5 (teknologi dan KAMI), dan area 6 (suplemen) Permendagri 18 th 2020	Skore	200	539	225	539,00	239,56	Sangat Tinggi

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2021-2026

SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	2024		2025 (s.d TW III)				Urusan
				Target	Realisasi Capaian	Target	Realisasi	%	Status Capaian	
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi jumlah OPD	%	65	65,14	70	70,18	100,26	Sangat Tinggi	Komunikasi dan Informatika
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan	%	24,29	50,15	25,42	50,15	197,29	Sangat Tinggi	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk	%	65	88	67	100	149,25	Sangat Tinggi	
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah OPD	%	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Statistik
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi jumlah OPD	%	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai perarea keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian	skor	200	539	225	539	239,56	Sangat Tinggi	Persandian

SASARAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2021-2026

SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Satuan	2024		2025 (s.d TW IV)			
				Target	Realisasi Capaian	Target	Realisasi	%	Status Capaian
	Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.								
34	Indeks SPBE		indeks	3,75	3,66	3,91	3,66	93,61	Sangat Tinggi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

**TAHUN 2021-2026
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		2025 (s.d TW IV)				
			Target	Realisasi Capaian	Target	Realisasi	%	Status Capaian	
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.									
16	Indeks SPBE	indeks	3,75	3,66	3,91	3,66	93,61	Sangat Tinggi	

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025-2030
SAMPAI DENGAN TAHUN 2025**

No.	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2025			
					Target	Realisasi	%	Status
V	Aspek Pelayanan Umum							
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: dimana: Rumus Indeks SPBE (dapat dilihat pada SEB Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN)	Indeks	3,66	3,66	3,66	100	
3.	Indeks Pemerintahan Digital	Penghitungan ini melibatkan pengumpulan data melalui survei untuk mengukur berbagai pilar dan indikator, seperti infrastruktur digital, keterampilan digital masyarakat, pemberdayaan, dan ekosistem	Indeks	N/A	N/A	N/A		

CAPAIAN Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Kabupaten Kendal RPJMD 2025-2029

SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

URUSAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	CAPAIAN	2025			
					2024	Target	Realisasi	%	SC
Komunikasi Dan Informatika	T: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks Pemerintah Digital	Nilai Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A	N/A	N/A		

	S: Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik suatu badan publik dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik	Indeks	96,32	96,32	97,28		
	S: Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah keseluruhan Layanan Publik secara online di Instansi Pemerintah Daerah yang sudah maupun belum terintegrasi	%	50,15	50,15	50,15		
	S: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,6	77,6	77,90		
Statistik	S: Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	N/A	2	2,97		
Persandian	S: Meningkatnya kewanitaan informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang menggambarkan tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi	Indeks	539	407	539		

CAPAIAN Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (IKU PD) Kabupaten Kendal RPJMD 2025-2029
SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Capaian	2025			
				2024	Target	Realisasi	%	Status Capaian
2.j	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo /Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah x 100%	%	65,14	70	70,18		
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah tingkat kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah /Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah tingkat Kab/kota x 100%	%	83,49	83,49	83,49		
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan SPLPD /Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah x 100%	%	0	0	0		
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo (FO) / Jumlah Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Perangkat Daerah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo (FO) / Jumlah Perangkat Daerah x 100%	%	29,17	31,25	31,25		

5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik x 100%	%	50,15	50,15	50,15		
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya / Jumlah Penduduk x 100%	%	100	100	100	100,00%	
2.n	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	5 Domain: Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, Statistik Nasional. Setiap Domain terdiri dari beberapa aspek dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.	Indeks	N/A	2	2.97 (2024)		
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah/Jumlah Perangkat Daerah)x100%	%	100	100	100		
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	(Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah/Jumlah Perangkat Daerah)x100%	%	100	100	100		
2.o	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan secara <i>self assessment</i> untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN dibagi Jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645. (Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian)x100%	%	83,57	63,1	83.57 (2024)		

Laporan Evaluasi Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

Tahun 2025

Kode Rekening	Program	Outcome	Indikator Program	Definis Operasional	Satuan	2025				Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target		Realisasi		
						K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatkan kualitas pengelolaan urusan penunjang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja PD, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Persen	100,00	7.433.688.146	100,00		PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menerima dan mengetahui informasi kebijakan/program / Jumlah total masyarakat sasaran X 100%	Persen	100,00	1.835.913.000	100,00		PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah x 100%	Persen	70,00	3.442.573.114	70,18		
			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar / Jumlah Perangkat Daerah X 100%	Persen	100,00	-	100,00		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam dokumen perencanaan / Jumlah seluruh perangkat daerah X 100%	Persen	100,00	83.528.860	100,00		PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN STATISTIK

			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah Perangkat Daerah X 100%	Persen	100,00	-	100,00		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	Jumlah Sistem Elektronik yang menerapkan SMKI/Aplikasi Persandian / Jumlah seluruh Sistem Elektronik yang dikelola X 100%	Persen	77,73	592.273.000			PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PERSANDIAN

Permasalahan yang Ditemukan :

- Belum ada sinkronisasi antara peta rencana dan anggaran SPBE serta Belum adanya manajemen pengetahuan pada manajemen TIK dan Manajemen perubahan;
- Penerapan SPBE memiliki kelemahan khususnya pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, Perencanaan strategis SPBE, Penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE dan audit TIK;
- Topologi geografis yang ada di Kabupaten Kendal membutuhkan topologi jaringan yang mahal maka dari itu masih menggunakan jaringan Wi-fi;
- Integrasi antar sistem dan layanan digital pemerintah belum berjalan optimal sehingga data dan proses layanan belum sepenuhnya saling terhubung;
- Pengelolaan data sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas data, metadata, dan interoperabilitas;
- Infrastruktur jaringan dan konektivitas digital belum merata, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas, sehingga menghambat penerapan SPBE;
- Keamanan informasi dan perlindungan data belum sepenuhnya memenuhi standar, termasuk pengelolaan risiko siber dan kesiapan sistem cadangan;
- Tingkat literasi digital masyarakat masih rendah sehingga pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi belum optimal;
- Masih terdapat OPD dan pemerintah Desa yang belum memahami secara utuh sebagai badan publik sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Ketersediaan dan kualitas informasi publik berupa Daftar Informasi Publik masih

belum optimal dan belum sepenuhnya memanfaatkan media digital dan teknologi informasi;

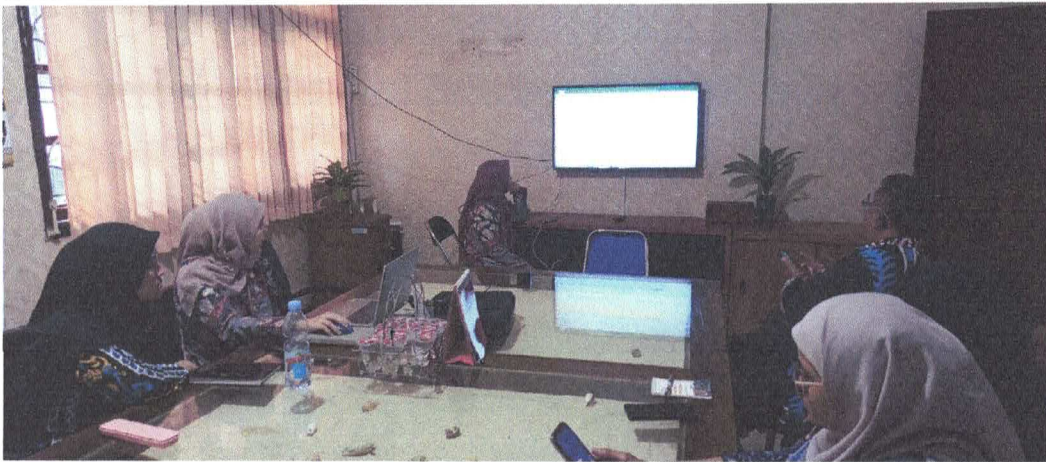
- Peran dan fungsi PPID di beberapa Badan Publik Pelaksana dan Badan Publik Desa belum berjalan maksimal.
- Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum memahami prosedur pengisian kuisisioner metadata sehingga tidak dapat menyelesaikan dengan tepat waktu;
- Perubahan sistem integrasi portal (API) milik produsen data yang menyebabkan interoperabilitas data sektoral tertentu mengalami kendala/error di portal data Kudasakti;
- Updating sistem terbaru geoportal menyebabkan data geospasial dari produsen yang sudah diunggah tidak dapat diakses kembali;
- Pengelola data belum memahami model penginputan data pada Kudasakti versi.2 karena belum dilaksanakan sosialisasi.
- Belum sesuainya sumber daya pendukung penyelenggaraan manajemen keamanan informasi agar dapat diterapkan secara menyeluruh;
- Belum optimalnya penerapan prosedur dan kebijakan penyelenggaraan manajemen keamanan informasi pada layanan digital yang dikelola;
- Belum diterapkannya Business Continuity Management dalam pengelolaan layanan digital pada Pemerintah Kabupaten Kendal.

Rekomendasi :

- Perlu penyusunan peta rencana sesuai dengan RPJMD, dan perlunya monev rutin terhadap manajemen pendukung SPBE;
- Perlunya reviu dan evaluasi manajemen berkelanjutan;
- Perlu Pembenahan/peremajaan topologi jaringan dan evaluasi alat-alat yang sudah lama;
- Mengembangkan integrasi antar sistem digital pemerintah melalui standarisasi arsitektur, interoperabilitas data, dan penyelarasan proses bisnis;
- Memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui peningkatan kualitas data, standarisasi metadata, serta optimalisasi pemanfaatan data lintas perangkat daerah;
- Meningkatkan cakupan dan kualitas infrastruktur jaringan secara bertahap untuk mendukung pelayanan digital dan operasional pemerintahan;
- Memperkuat keamanan informasi melalui peningkatan standar pengamanan, pengelolaan risiko siber, penyediaan sistem cadangan, dan peningkatan kapasitas ASN;

- Melaksanakan edukasi dan peningkatan literasi digital masyarakat dan perangkat daerah agar layanan berbasis teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal;
- Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik secara berkala kepada OPD dan Pemerintah Desa;
- Penguatan peran PPID Kabupaten, dalam melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepatuhan terhadap Badan Publik PPID Pelaksana dan PPID Desa;
- Pendampingan teknis dalam penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan;
- Optimalisasi website OPD dan Desa, media sosial, dan aplikasi layanan informasi sebagai sarana publikasi;
- Pengembangan sistem digital terintegrasi untuk pengelolaan dan penyajian informasi publik.
- Dilakukan pendampingan lanjutan terhadap produsen data di luar jadwal kegiatan bersama BPS Kendal sebagai pembina data;
- Dilakukan penyesuaian oleh programmer dan monitoring secara rutin atas data-data yang berbasis API dari produsen data;
- Melakukan rakor berkolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) beserta desk penginputan kembali data geospasial yang dimiliki oleh produsen data;
- Kegiatan sosialisasi Kudasakti versi.2 akan dilaksanakan di tahun 2026 mengingat keterbatasan anggaran di tahun 2025.
- Penyusunan formulasi kebutuhan sumber daya pendukung penyelenggaraan manajemen keamanan informasi dan konsolidasi kerja sama antar bidang;
- Diperlukan strategi peningkatan kesadaran keamanan informasi dan penegasan dalam penerapan prosedur dan kebijakan manajemen keamanan informasi bagi pengelola layanan digital pada Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Menyiapkan rencana penerapan Business Continuity Management dalam pengelolaan layanan digital pada Pemerintah Kabupaten Kendal.

V. DOKUMENTASI



Selanjutnya mohon arahan dari Bapak Kepala Dinas Perihal hasil kegiatan diatas.
Demikian laporan ini kami buat untuk menjadi periksa.

Ketua Tim Rerencanaan dan Keuangan,

Mochamad Kodhirin, S.Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp./Fax. (0294) 384353
Laman diskominfo.kendalkab.go.id Pos-el diskominfo@kendalkab.go.id

Kendal, 5 Januari 2026

Nomor : 000.7.5/19/DISKOMINFO
Sifat : Penting
Lampiran : - lembar
Hal : Undangan

Kepada Yth.

1. Sekretaris Dinas Kominfo
 2. Para Kabid pada Dinas Kominfo
 3. Plt Kasubbag Umpeg pada Dinas Kominfo
 4. Ketua Tim pada Dinas Kominfo
 5. Anggota Tim Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kominfo
- di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Baperlibang Nomor 000.7.5/2/BAPERLITBANG tanggal 5 Januari 2026 perihal Undangan Desk Evaluasi Renja PD dan RPJMD Kab Kendal s.d TW IV Tahun 2025, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Januari 2025
Waktu : 07.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Kab Kendal
Acara : Desk Evaluasi Renja PD dan Renstra Diskominfo s.d TW IV Tahun 2025

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal



ARDHI PRASETIYO, S.STP, MM.
Pembina Tk. I
NIR 19810925 200012 1 001

DAFTAR HADIR
DESK CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Januari 2025

No.	NAMA	JABATAN	L	P	TANDA TANGAN	KET
1	Ardhi	Kadis	L		1	
2	Ragil Hidayat	Selektaris	L		2	
3	M. Kodhirin	Katim P & L	L		3	
4	Heri Setoko	Ketum PSDK	✓		4	
5	Zahrotul Faradis	Staf	P		5	
6	Heri Aryanto	Kabid. Aprika	L		6	
7	Pima Lovita Ardianthony	Pelaksana		✓	7	
8	Dewi N.	Katim PPIP		✓	8	
9	Si Wahyuni	Katim Infra		✓	9	
10	Ufi AF	Staf	✓		10	
11	Yoga	Apikon	L		11	
12	Nursi Per	BPD SP	✓		12	
13	EKO ISTANTO	Kabid IKP	✓		13	
14	Khusnul Hidayat	Katim Smd	✓		14	
15	Iv. Lufman	Staf Selektaris	✓		15	
16	Ida S	Staf		✓	16	
17	Fatimah	Staf		✓	17	
18					18	
19					19	
20					20	
21					21	
22					22	
23					23	
24					24	
25					25	

Kendal,
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Kendal



Ardhi Prasetyo, S.STP, MM.
NIP. 198109252000121001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
a. Mandat Kinerja	2
b. Peta Proses Bisnis	18
c. Struktur Organisasi	24
C. ISU-ISU STRATEGIS	25
D. DUKUNGAN SDM, SARANA-PRASARANA DAN ANGGARAN	27
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	31
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN LALU	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	37
A. TUJUAN,SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGDA.....	37
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	57
D. INSTRUMENT PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA.....	61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	65
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	65
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	67
2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2021-2024....	72
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah...	77
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	80
5. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.....	81
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	86

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	89
B. REALISASI ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL.....	100
C. INOVASI	105
D. PENGHARGAAN	106
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....	108
A. PENGHARGAAN	108
B. REKOMENDASI	111
LAMPIRAN	
1. RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO 2021-2026	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DISKOMINFO	
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DISKOMINFO TAHUN 2024	
4. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2024	
5. LKjIP DISKOMINFO TAHUN 2023	
6. AKUNTABILITAS (LHE AKIP 2023 DAN MATRIKS TINDAK LANJUT LHE AKIP 2023)	
7. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
8. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Mandat Kinerja.....	3
Tabel 1.2	Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal ..	27
Tabel 1.3	Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.....	28
Tabel 1.4	Rincian Alokasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024	29
Tabel 1.5	Matriks Rencana Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	34
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Target Daerah dan Tujuan Jangka Menengah Dinas Kominfo Kabupaten Kendal.....	40
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.....	42
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.....	45
Tabel 2.4	Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.....	52
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	59
Tabel 3.1	Skala Capaian Kinerja.....	65
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	66
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	68
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024.....	73
Tabel 3.5	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	78
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.....	82

Tabel 3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	88
Tabel 3.8	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024.....	90
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024	102
Tabel 3.10	Penghargaan yang Diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Renstra 2021-2026	17
Gambar 1.2	Peta Proses Bisnis Level 0 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	19
Gambar 1.3	Peta Proses Bisnis Level 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	20
Gambar 1.3	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	25
Gambar 2.1	Keterkaitan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal dengan Tujuan Jangka Menengah Dinas Kominfo.....	39
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	60

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk Implementasi dari amanat pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari kontribusi seluruh pegawai dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik.

Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini masih perlu penyempurnaan, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai pembelajaran demi penyempurnaan LKjIP di masa mendatang.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,



ARDHI PRASETIYO, S.STP., M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19810925 200012 1 002

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LKjIP Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 8 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja tujuan “Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Kendal” berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) indeks SPBE tahun 2024, Kabupaten Kendal memperoleh **skor 3,66**, skor tersebut masih dibawah target Renstra yaitu skor 3,75. Meskipun belum mencapai target Renstra, indeks SPBE mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu 0,71 poin dari pada tahun 2023 (skor 2,95). Persentase capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97,60% (Kategori Baik), ada kenaikan 11,59% dari pada capaian kinerja tahun 2023 (86,01%). Faktor penyebab tidak tercapainya target karena belum maksimalnya kinerja tim koordinasi SPBE Kabupaten Kendal

sehingga kurang maksimal dalam pemenuhan data dukung evaluasi SPBE oleh Kemenpan RB serta masih lemahnya aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE dan audit TIK.

2. Pencapaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya pembangunan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terpadu terintegrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal” tahun 2024 terhadap target dengan indikator kinerja Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebesar 100,22% (Sangat Baik), Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 206,46% (Sangat Baik), , masuk kategori berhasil karena sudah melampaui target.
3. Pencapaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal” tahun 2024 terhadap target dengan indikator kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP) sebesar 107,02% (Sangat Baik), masuk kategori berhasil karena telah mencapai target, hal ini didukung dengan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award dengan predikat Informatif dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah.
4. Pencapaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data indonesia” tahun 2024 terhadap target dengan indikator kinerja Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) sebesar 228,08% (Sangat Baik), masuk

kategori berhasil karena sudah melampaui target. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal untuk memberikan pembinaan kepada perangkat daerah serta melaksanakan kegiatan penyusunan metadata statistik sektoral perangkat daerah Kabupaten Kendal.

5. Pencapaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Kendal” tahun 2024 terhadap target dengan indikator kinerja Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sebesar 269,50% (Sangat Baik), masuk kategori berhasil karena sudah melampaui target, hal ini didukung dengan evaluasi kematangan keamanan informasi dari BSSN dengan hasil Tingkat Kesiapan PSE dalam Pemenuhan Kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 : 539 (Cukup Baik).
6. Pencapaian sasaran strategis 5 “Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kab. Kendal” tahun 2024 terhadap indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal sebesar 105,01% (Sangat Baik), Tingkat Kepuasan Masyarakat (Skore IKM/ Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Kominfo Kab. Kendal) sebesar 107,14% (Sangat Baik), masuk kategori berhasil karena sudah melampaui target. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
7. Rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebesar **152,63%** masuk dalam kategori **sangat baik** dengan capaian rata rata telah melampaui target yang ditetapkan.

8. Realisasi Keuangan sampai akhir bulan Desember 2024 sebesar Rp. 17.166.885.073,- (92,44%) dengan efisiensi sebesar Rp. 1.403.958.552,- (7,56%), hal ini dikarenakan : efisiensi belanja barang dan jasa, efisiensi penggunaan jasa listrik, air dan telekomunikasi, serta efisiensi belanja modal.

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal pada tahun selanjutnya, maka perlu dilakukan :

1. Pengawasan, pemantauan atau pengukuran kinerja sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan.
2. Publikasi dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Diskominfo dan <https://esr.menpan.go.id/> tepat waktu dan dapat dibuktikan.
3. Penyempurnaan sistematika penulisan dan isi konten pada dokumen laporan kinerja.
4. Perbaikan pelayanan dan manajemen kinerja secara berkelanjutan, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah.
5. Penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan SPBE dan Smart City.
6. Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan dinas/ instansi terkait untuk mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kendal guna mewujudkan e-government.
7. Pengembangan SuperApp berkelanjutan dan integrasi aplikasi layanan Pemerintah Kabupaten Kendal.
8. Pembangunan jaringan intra Pemerintah Daerah sampai ke tingkat

UPTD/UPTB/ Korwil secara bertahap.

9. Peningkatan pelayanan dalam bidang informasi publik melalui berbagai media dan sarana komunikasi yang ada.
10. Pembinaan dan pendampingan ke PPID Pelaksana maupun PPID Desa terkait penyusunan DIP dan DIK serta penyampaian informasi berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat di website dan media sosial.
11. Peningkatan sinergitas dan koordinasi terkait time schedule dan peran masing-masing instansi guna memperlancar pelaksanaan kegiatan perluasan ketersediaan dan updating data.
12. Pendampingan dalam penyusunan metadata kegiatan, metadata variabel dan metadata indikator statistik sektoral secara bertahap.
13. Pengintegrasian antar sistem elektronik untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia yaitu interoperabilitas data.
14. Pelaksanaan IT Assessment dan Self Assessment serta penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi (Indeks KAMI), serta penyelenggaraan operasional persandian.
15. Peningkatan IT asesment, penetration test (PENTEST), dan implementasi sertifikat elektronik.
16. Audit sistem elektronik Pemkab Kendal oleh auditor yang bersertifikasi BSSN secara bertahap.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL,



ARDHI PRASETIYO, S.STP., M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19810925 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp./Fax. (0294) 384353
Laman diskominfo.kendalkab.go.id Pos-el diskominfo@kendalkab.go.id

Kendal, 30 Januari 2026

Nomor : 000.8.6.3/56/DISKOMINFO
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Tindak Lanjut LHE AKIP 2024

Kepada Yth.
BUPATI KENDAL
c.q Plt. Inspektur Daerah
Kabupaten Kendal
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Kendal Nomor 000.8.6.3/433/Insp Tanggal 8 November 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan Matriks Tindak Lanjut LHE AKIP 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Ardhi Prasetyo, S.STP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 198109252000121001

Lampiran Surat
 Nomor : 000.8.6.3/56/DISKOMINFO
 Tanggal : 30 Januari 2026

Matriks Rencana Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE 2024	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Penyelesaian (in progress/selesai)
1	Dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian anggaran, agar memprioritaskan pencapaian kinerja pada program / kegiatan yang belum tercapai kinerjanya	Melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan memprioritaskan program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum tercapai, disertai percepatan pelaksanaan, penajaman target kinerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan target dapat tercapai.	Penyusunan Anggaran 2026	Kepala Dinas	Telah dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan memprioritaskan program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum tercapai kinerjanya pada APBD 2026 (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1BegkIri16O4RQQHKuRzRLP1WapIKWOcA?usp=drive_link
2	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ tepat waktu dengan memunculkan tanggal dan tahun upload pada website resmi	Mengupload dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Diskominfo dan https://esr.menpan.go.id/ tepat waktu	Januari 2026	Sekretaris	Dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja tahun 2025 telah dipublikasikan pada website resmi Diskominfo dan https://esr.menpan.go.id/ (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1TMC9KzH0yZS1rdoqtv-j_Z7xzM46B-h1?usp=drive_link
3		Melakukan penyusunan revisi SOP tentang pengumpulan data kinerja	Januari 2026	Kepala Dinas	SOP Pengumpulan Data Kinerja telah disusun dan dilakukan revisi pertama (melalui

	Agar menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja				aplikasi arutala) (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/167uMHj5GgGZo1SuvOFCfHX_CPLJNdc2w?usp=drive_link
4	Agar dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan /kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik , terutama terkait indikator kinerja yang belum tercapai	Melaksanakan kegiatan desk capaian kinerja untuk mengumpulkan data capaian kinerja tahun 2025 beserta menggali informasi faktor pendukung, penghambat, upaya yang sudah dilakukan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja.	Januari 2026	Kepala Dinas	Desk capaian kinerja TW IV tahun 2025 telah dilaksanakan (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1wKwrv0DPqssm0x-OXL2y4NFzS7p3dAvJ?usp=drive_link
		Menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan /kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik pada dokumen LKjIP	Januari 2026	Kepala Dinas	Informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan /kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik pada dokumen LKjIP Bab III (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1wKwrv0DPqssm0x-OXL2y4NFzS7p3dAvJ?usp=drive_link
5	Agar secara rutin menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal	Melaksanakan rapat koordinasi rutin setiap bulan untuk struktural dan sub koordinator untuk pengawasan, pemantauan atau pengukuran kinerja (rapat internal dan POK)	Rutin setiap bulan	Kepala Dinas	Rapat hasil evaluasi kinerja internal / monev POK telah dilaksanakan setiap bulan, yang dihadiri oleh Pejabat Struktural, Ketua Tim dan Bendahara (BP dan BPP) (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1g1FdJeRFyp92K1iKQ6oV6MwqeSLBuUwE?usp=drive_link

		Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal	Rutin setiap bulan		Laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal telah disusun dan dikirimkan melalui Bagian Administrasi Pembangunan (selesai) https://drive.google.com/drive/folders/1g1FdJeRFyp92K1iKQ6oV6MwqeSLBuUwE?usp=drive_link
6	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya sesuai Rencana Aksi dan menyampaikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 dengan mekanisme monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran / rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sudah ditindaklanjuti	Tahun 2026	Kepala Dinas	Rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 sudah dilaksanakan (selesai)

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Diskominfo Kab. Kendal Tahun 2024

Matriks Rencana Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE 2024	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Penyelesaian (in progress/selesai)	Link Bukti Dukung (jika ada)
1	Dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian anggaran, agar memprioritaskan pencapaian kinerja pada program / kegiatan yang belum tercapai kinerjanya	Melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan memprioritaskan program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum tercapai, disertai percepatan pelaksanaan, penajaman target kinerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan target dapat tercapai.	Penyusunan Anggaran 2026	Kepala Dinas	Telah dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan memprioritaskan program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum tercapai kinerjanya pada APBD 2026 (selesai)	https://drive.google.com/drive/folders/1B3gklri16O4RQQHKuRzRLP1WaplKWOcA?usp=drive_link
2	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ tepat waktu dengan memunculkan tanggal dan tahun upload pada website resmi	Mengupload dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Diskominfo dan https://esr.menpan.go.id/ tepat waktu	Jan-26	Sekretaris	Dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja tahun 2025 telah dipublikasikan pada website resmi Diskominfo dan https://esr.menpan.go.id/ (selesai)	https://drive.google.com/drive/folders/1TMC9KzH0yZS1rdogtv-j_Z7xzIM46B-h1?usp=drive_link
3	Agar menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja	Melakukan penyusunan revisi SOP tentang pengumpulan data kinerja	Jan-26	Kepala Dinas	SOP Pengumpulan Data Kinerja telah disusun dan dilakukan revisi pertama (melalui aplikasi arutala) (selesai)	https://drive.google.com/drive/folders/167uMHj5GgGZo1SuvOFCfHX_CPLUNdc2w?usp=drive_link
4	Agar dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan /kendala yang dihadapi disajikan secara	Melaksanakan kegiatan desk capaian kinerja untuk mengumpulkan data capaian kinerja tahun 2025 beserta menggali informasi faktor pendukung, penghambat, upaya yang sudah dilakukan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja.	Jan-26	Kepala Dinas	Desk capaian kinerja TW IV tahun 2025 telah dilaksanakan (selesai)	https://drive.google.com/drive/folders/1wKwrv0DPqssmIX-OxL2y4NFzS7p3dAvJ?usp=drive_link

No	Rekomendasi LHE 2024	Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status Penyelesaian (in progress/selesai)	Link Bukti Dukung (jika ada)
	spesifik , terutama terkait indikator kinerja yang belum tercapai	Menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan /kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik pada dokumen LKjIP	Jan-26	Kepala Dinas	Informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan /kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik pada dokumen LKjIP Bab III (selesai)	https://drive.google.com/drive/folders/1wKwrv0DPqssm0x-OxL2y4NFzS7p3dAvJ?usp=drive_link
5	Agar secara rutin menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal	Melaksanakan rapat koordinasi rutin setiap bulan untuk struktural dan sub koordinator untuk pengawasan, pemantauan atau pengukuran kinerja (rapat internal dan POK)	Rutin setiap bulan	Kepala Dinas	Rapat hasil evaluasi kinerja internal / monev POK telah dilaksanakan setiap bulan, yang dihadiri oleh Pejabat Struktural, Ketua Tim dan Bendahara (BP dan BPP) (selesai)	https://drive.google.com/drive/folders/1g1FdJeRFyp92K1iKQ6oV6MwqeSLBuUwE?usp=drive_link
		Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal	Rutin setiap bulan		Laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal telah disusun dan dikirimkan melalui Bagian Administrasi Pembangunan (selesai)	https://drive.google.com/drive/folders/1g1FdJeRFyp92K1iKQ6oV6MwqeSLBuUwE?usp=drive_link
6	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya sesuai Rencana Aksi dan menyampaikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 dengan mekanisme monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran / rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sudah ditindaklanjuti	Tahun 2025-2026	Kepala Dinas	Rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 sudah dilaksanakan (selesai)	https://drive.google.com/drive/folders/1V4ral30xFYU4FTGSTRl5hfqRCY1UOF/k?usp=drive_link

Kendal, 30 Januari 2026



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,

ARDHI PRASETIYO, S.STP, MM
NIP. 19810925 200012 1 001



BUPATI KENDAL

Kendal, 4 November 2025

Nomor : 000.8.6.3/433/Ansp
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kendal
Tahun 2024.

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal
di -
KENDAL

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana terlampir, di samping hal-hal yang sudah baik dan sesuai dengan ketentuan, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Saudara.

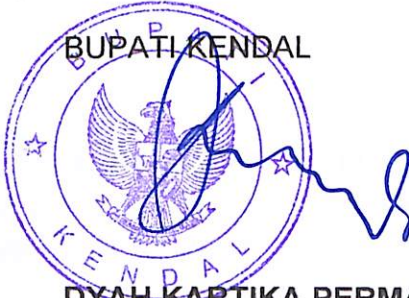
Selanjutnya kami minta perhatian Saudara agar mempelajari Laporan Hasil Evaluasi terlampir dan melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian anggaran, agar memprioritaskan pencapaian kinerja pada program/kegiatan yang belum tercapai kinerjanya;
2. Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan <https://esr.menpan.go.id/> tepat waktu dengan memunculkan tanggal dan tahun upload pada website resmitarget kinerja setiap tahun memperhatikan tren capaian indikator tahun sebelumnya;
3. Agar menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja;
4. Dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja agar menyajikan informasi

pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan/kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik, terutama terkait indikator kinerja yang belum tercapai;

5. Agar secara rutin menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal ; dan
6. Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya sesuai Rencana Aksi dan menyampaikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.

Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.


DYAH KARTIKA PERMANASARI, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal.

Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 381232 -381251
Fax (0294) 381062 Psw. 212
e-mail : bupati@kendalkab.go.id website : www.kendalkab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**

**PADA :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL**

LHE Nomor : 000.8.6.3/398/Insp .
Tanggal : 24 Oktober 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Notomudigdo No. 5 Kendal Telp.: (0294) 381498 Fax.: (0294) 381498
Email: inspektorat@kendalkab.go.id Website:

Kendal, 24 Oktober 2025

Nomor : 000.8.6.3/398/InsP
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal Tahun
2024.

Yth. Bupati Kendal
di
KENDAL

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2024. Evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Laporan hasil evaluasi disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI
BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 70);
10. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kendal Nomor 023 Tahun 2024 tentang Kriteria, Penjelasan Kriteria, Gradasi *Professional Judgements* atas Pemenuhan Kriteria, dan Nilai atas Gradasi Kebijakan Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
11. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 800.1.11.1/402/INSP tanggal 21 Juli 2025, perihal untuk melaksanakan Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 atas Implementasi AKIP di Tahun 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atau evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

C. Tim Evaluasi

1. Penanggung Jawab : Rini Utami, S.H., M.A.
2. Supervisor : Anggoro Pramubinawan, ST
3. Ketua Tim : Suryanto, S.AP .
4. Anggota : 1. Nur Chasanah, S.Si.T., M.H.
2. Tomi Priyadi, S.Sos.

D. Tujuan Evaluasi

Secara umum, tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan oleh Tim Evaluator kepada seluruh Perangkat Daerah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan *monitoring* pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup, antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian nasional terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

G. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian ;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

H. Gambaran Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya didapatkan nilai sebesar **77,60 (tujuh puluh tujuh koma enam nol)** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**.

I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tahun 2023 sudah ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi, berupa gambaran baik dan catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 22,50 (dua puluh dua koma lima nol), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 4,80 (lima koma empat nol) dengan kriteria :

- Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja;
- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang;
- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah;
- Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek;
- Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja; dan
- Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

b. Kualitas

Kualitas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 7,20 (tujuh koma dua nol) dengan kriteria :

- Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan ;
- Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan tepat waktu;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai ;
- Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai ;
- Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bounded (SMART);
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis.
- Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai

di setiap level jabatan (Cascading);

- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan Pimpinan telah menandatangani Perjanjian Kinerjanya; dan
- Semua pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

c. Pemanfaatan

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, memperoleh nilai 10,50 (sepuluh koma lima nol), dengan kriteria sebagai berikut :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik atau setidaknya masih on the right track;
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya ;
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; dan
- Sebagian besar pegawai telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, namun bukti penyampaian informasi pada setiap pegawai belum ada.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,40 (dua puluh tiga koma empat nol), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 4,20 (empat koma dua nol), dengan kriteria :

- Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;

- Telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja; dan
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berupa SOP.

b. Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai 7,20 (tujuh koma dua nol), dengan kriteria :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi; dan
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi.

c. Pemanfaatan

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, memperoleh nilai 12,00 (Dua belas koma nol nol), dengan kriteria :

- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan, baik struktural maupun fungsional;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam

mencapai kinerja;

- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- Dinas Komunikasi dan Informatika telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; dan
- Pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3 Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,00 (Dua belas koma nol nol), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 2,40 (dua koma empat nol), dengan kriteria :

- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun;
- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
- Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
- Dokumen Laporan Kinerja telah direviu;
- Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu; dan
- ▪ Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

b. Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, memperoleh nilai 3,60 (tiga koma enam nol), dengan kriteria :

- Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, namun belum disajikan informasi pada pencapaian kinerja program beserta analisisnya;
- Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja pada indikator kinerja utama, beserta analisisnya;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;

- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, namun analisis hambatan belum disampaikan secara spesifik, terutama terkait indikator kinerja yang belum tercapai;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; dan
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

c. Pemanfaatan

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, memperoleh nilai 6,00 (enam koma nol nol), dengan kriteria :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan;
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai, namun belum ada dokumen bukti atau informasi yang menyatakan bahwa laporan kinerja telah disampaikan kepada seluruh Pegawai;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; dan
- Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4 Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,00 (dua puluh koma nol nol), dengan kriteria sebagai berikut:

a. Keberadaan

Keberadaan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 4,00 (empat koma nol nol), dengan kriteria :

- Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- Evaluasi Kinerja Internal sudah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal; dan
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

b. Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, memperoleh nilai 6,00 (enam koma nol nol), dengan kriteria sebagai berikut:

- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memadai;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan di internal Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi.

c. Pemanfaatan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja, memperoleh nilai 10,00 (sepuluh koma nol nol), dengan kriteria sebagai berikut :

- Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi telah disusun dan status selesai;
- Telah terjadi peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dipergunakan untuk penyesuaian anggaran dan penyesuaian rencana kerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
- Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan

hasil evaluasi akuntabilitas di internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

B. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Hasil evaluasi secara keseluruhan dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Sesuai hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar **77,90 (tujuh puluh tujuh koma sembilan nol)** dengan kategori predikat **BB, Interpretasi (Sangat Baik)**.

Nilai Akuntabilitas Kinerja tersebut diperoleh dari akumulasi hasil analisis komponen penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

C. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian anggaran, agar memprioritaskan pencapaian kinerja pada program/kegiatan yang belum tercapai kinerjanya;
2. Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan <https://esr.menpan.go.id/> tepat waktu dengan memunculkan tanggal dan tahun upload pada website resmi;
3. Agar menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja;
4. Agar dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisisnya dan hambatan/kendala yang dihadapi disajikan secara spesifik, terutama terkait indikator kinerja yang belum tercapai;
5. Agar secara rutin menyusun laporan hasil evaluasi kinerja internal / monev POK kepada Bupati Kendal ; dan
6. Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya sesuai Rencana Aksi dan menyampaikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai dengan ketentuan;

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Dengan dilaksanakannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa aspek yang sangat penting dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi proses bagaimana memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bagaimana menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bagaimana menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja, bagaimana memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

B. Dorongan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik

1. Perlunya komitmen yang kuat dari Kepala Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan akuntabilitas;
2. Agar Perangkat Daerah dapat mengimplementasikan Informasi dalam laporan kinerja sebagai kontribusi perubahan pada budaya kinerja organisasi;
3. Menerapkan *reward and punishment* secara berjenjang dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KENDAL


— RINI UTAMI, S.H., M.A.

Pembina Tingkat I

NIP. 197005061996032002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kendal ;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Kendal.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDHI PRASETIYO, S.STP., M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KENDAL

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.

Jabatan : BUPATI KENDAL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.

Kendal, 22 Januari 2025
Pihak Pertama,

ARDHI PRASETIYO, S.STP., M.M.
NIP. 19810925 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja layanan manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Nilai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	77,00
		Tingkat Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal)	90,00
2	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kendal	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks Keterbukaan Informasi Publik)	90,50
3	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Kendal	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	70 %
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50,15 %
4	Meningkatnya ketersediaan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Persentase Perangkat Daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019)	91,23 %
5	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks Keamanan Informasi)	359,00

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.346.963.168	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.385.901.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.471.771.600	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	297.437.500	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	974.110.000	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kendal, 22 Januari 2025



Pihak Kedua,

DICO M GANINDUTO, B.Sc., M.Sos.



Pihak Pertama,

ARDHI PRASETIYO, S.STP., M.M.
NIP. 19810925 200012 1 001

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									Pelaksanaan belanja suku cadang alat dan sarana pemeliharaan jaringan telekomunikasi		Subko Persandian dan Keamanan Informasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Kendal, Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL,

ARDHI PRASETIYO, S.STP., M.M.
NIP. 19810925 200012 1 001





DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL

Jl. Soekarno - Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. / Fax. (0294) 384353

e-mail : diskominfo@kendalkab.go.id

website : diskominfo.kendalkab.go.id